



Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah

(RPJMD)

Kabupaten Lampung Barat

2025-2029





BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan strategi perencanaan pembangunan diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
dan
BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN
2025 – 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
13. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

- (1) Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat sektoral yang sudah ada dan masih berlaku wajib disesuaikan dengan RJPMD ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan;

- (2) Sebelum RPJMD periode berikutnya ditetapkan, penyusunan RKPD tahun pertama periode Bupati berikutnya berpedoman kepada RPJMD ini;
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Bupati berikutnya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

NUKMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kabupaten Lampung Barat dibentuk dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tingkat II Lampung Barat. Sebagai daerah otonom Kabupaten Lampung Barat berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan otonomi dan mencapai maksud pembentukannya, Kabupaten Lampung Barat harus memiliki RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, keuangan Daerah, indikator kinerja daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RPJMD Provinsi dan RPJMN. Selanjutnya, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD ini. RPJMD akan digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Karena RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD maka, dalam penyusunannya harus memperhatikan periodisasi RPJPD. RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 terbagi menjadi 4 (empat) tahap pembangunan per 5 (lima) tahunan. RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 berada dalam tahapan pertama RPJPD Kabupaten Lampung Barat 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

pedoman dalam penyusunan RKPD dilakukan dengan penyesuaian:

- prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah kabupaten dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten; dan
- rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah kabupaten dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten.

Penyusunan Renstra PD merupakan proses yang tidak terpisahkan dengan tahap penyusunan RPJMD; dan

Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang ditetapkan dalam RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

Ayat (1)

Evaluasi keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menggunakan Indikator Kinerja Daerah yang terdapat dalam RPJMD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perencanaan Pembangunan bersifat sektoral adalah perencanaan pembangunan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor, yang hanya melingkupi satu sektor pembangunan saja. Misal: pembangunan sektor pertanian, pembangunan sektor pariwisata, pembangunan industri, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antara Dokumen	I-3
1.4. Maksud Dan Tujuan	I-5
1.5. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	II-1
2.2. Gambaran Keuangan Daerah	II-110
2.3. Permasalahan dan Isu Strategis	II-117
BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	III-1
3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	III-1
3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan.....	III-19
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1. Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	IV-33
BAB V PENUTUP	V-1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikator kinerja pembangunan daerah yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 menjadi landasan utama bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis serta program kerja tahunan yang selaras dengan arah pembangunan nasional dan provinsi.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun sebagai pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. RPJMD ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih serta sebagai upaya dalam menjawab tantangan pembangunan yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Barat.

Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan pariwisata. Namun, di sisi lain, daerah ini juga menghadapi berbagai tantangan, seperti infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, ketimpangan sosial-ekonomi, serta ancaman perubahan iklim yang berpengaruh terhadap ketahanan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, RPJMD 2025-2029 disusun untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan pembangunan dengan tetap memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat memiliki nilai strategis karena berperan sebagai:

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberikan arah dan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan.
2. Instrumen Pembangunan Berkelanjutan yang memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial.
3. Panduan Penganggaran yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan daerah.
4. Dasar Evaluasi Kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan daerah secara periodik.

RPJMD ini disusun untuk periode kepemimpinan kepala daerah yang dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 dengan masa bakti tahun 2025-2030. Dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam merancang dan mengimplementasikan program pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah terpilih.

RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini mencakup:

1. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang inklusif.
2. Pengelolaan Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan mitigasi dampak perubahan iklim.
3. Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan yang memperhitungkan aspek ketahanan bencana dan efisiensi energi.
4. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem alam.

Dengan adanya komitmen ini, RPJMD Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pembangunan jangka menengah, tetapi juga memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 448).

1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hubungan ini penting untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, efektivitas implementasi program, serta pencapaian tujuan pembangunan secara optimal. Berikut adalah hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya:

1. RPJPN dan RPJMN

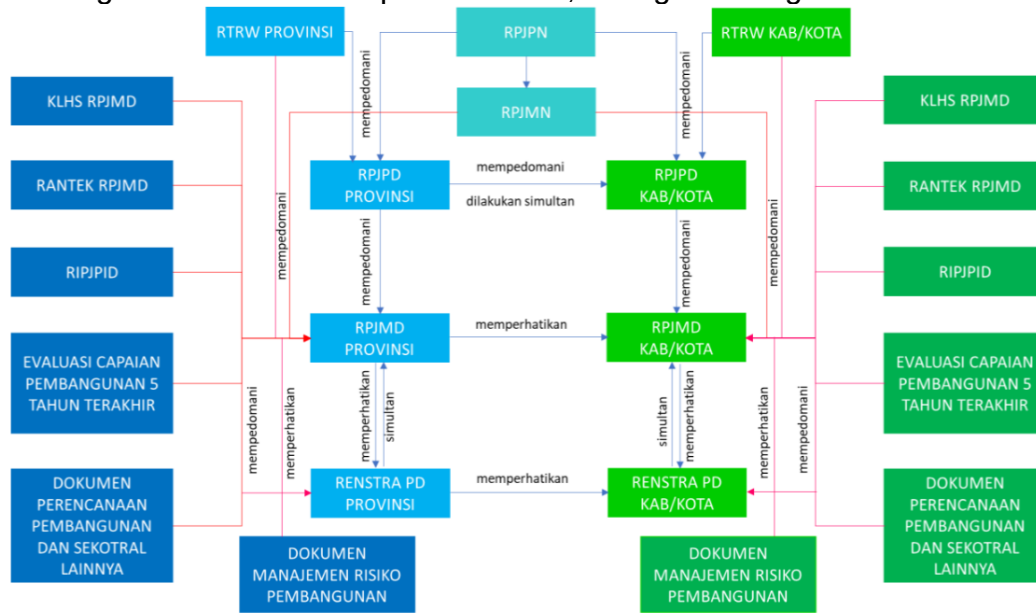
RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai pedoman pembangunan nasional. Keselarasan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi pembangunan nasional dalam berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2. RPJPD Provinsi Lampung dan RPJMD Provinsi Lampung

RPJMD Kabupaten Lampung Barat juga harus mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJMD Provinsi Lampung untuk memastikan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program pembangunan.

3. **RPJPD Kabupaten Lampung Barat**
Sebagai dokumen jangka menengah, RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Barat 2005-2025 serta RPJPD yang baru untuk periode 2025-2045. Hal ini guna menjamin kesinambungan perencanaan pembangunan dalam jangka panjang.
4. **RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)**
RPJMD harus memperhatikan RTRW Kabupaten Lampung Barat agar kebijakan pembangunan yang direncanakan sesuai dengan peruntukan tata ruang, baik untuk sektor permukiman, industri, pertanian, kawasan lindung, maupun infrastruktur lainnya.
5. **Renstra Perangkat Daerah**
Setiap perangkat daerah di Kabupaten Lampung Barat menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang harus selaras dengan RPJMD. Renstra ini menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah.
6. **RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah)**
RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD tahunan yang berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan APBD setiap tahun anggaran. RKPD merupakan tahapan implementasi dari RPJMD yang lebih operasional.
7. **Dokumen Pembangunan Sektoral dan Tematik**
RPJMD juga harus terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan sektoral seperti Rencana Induk Pariwisata Daerah, Rencana Aksi Daerah Perubahan Iklim, Rencana Aksi Pengentasan Kemiskinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
8. **Dokumen KLHS RPJMD**
Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai landasan analisis untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam RPJMD. KLHS mengidentifikasi isu strategis lingkungan, sosial, dan ekonomi serta memberikan rekomendasi kebijakan yang harus diadopsi dalam RPJMD. Hubungan antara KLHS dan RPJMD bersifat saling menguatkan, di mana KLHS menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program pembangunan daerah. Integrasi KLHS ke dalam RPJMD juga merupakan mandat regulasi untuk memastikan rencana pembangunan memperhatikan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Hubungan antar dokumen perencanaan, sebagaimana grafik di bawah ini:



Dengan adanya keterpaduan antara RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya, diharapkan pembangunan Kabupaten Lampung Barat dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang ada di masa depan.

1.4. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud

- Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ke depan.
- Menyelaraskan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi agar tercapai sinergi dan efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan.
- Menjabarkan visi, misi, dan program kepala daerah terpilih ke dalam strategi, kebijakan, dan rencana kerja yang terukur dan sistematis.
- Menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis (Renstra) serta program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah.

2. Tujuan

- Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

- Meningkatkan daya saing daerah dengan memanfaatkan potensi unggulan di berbagai sektor, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
- Memastikan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui program pembangunan yang berbasis kinerja dan hasil.
- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- Meningkatkan ketahanan daerah terhadap berbagai tantangan pembangunan, termasuk perubahan iklim, ketahanan pangan, dan ketahanan sosial-ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJMD Kabupaten Lampung Barat disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antara Dokumen
- 1.4. Maksud Dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2. Gambaran Keuangan Daerah
- 2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

BAB III Visi, Misi, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

- 3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- 3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

- 4.1. Program Perangkat Daerah
- 4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB V PENUTUP

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1 Aspek geografi dan demografi

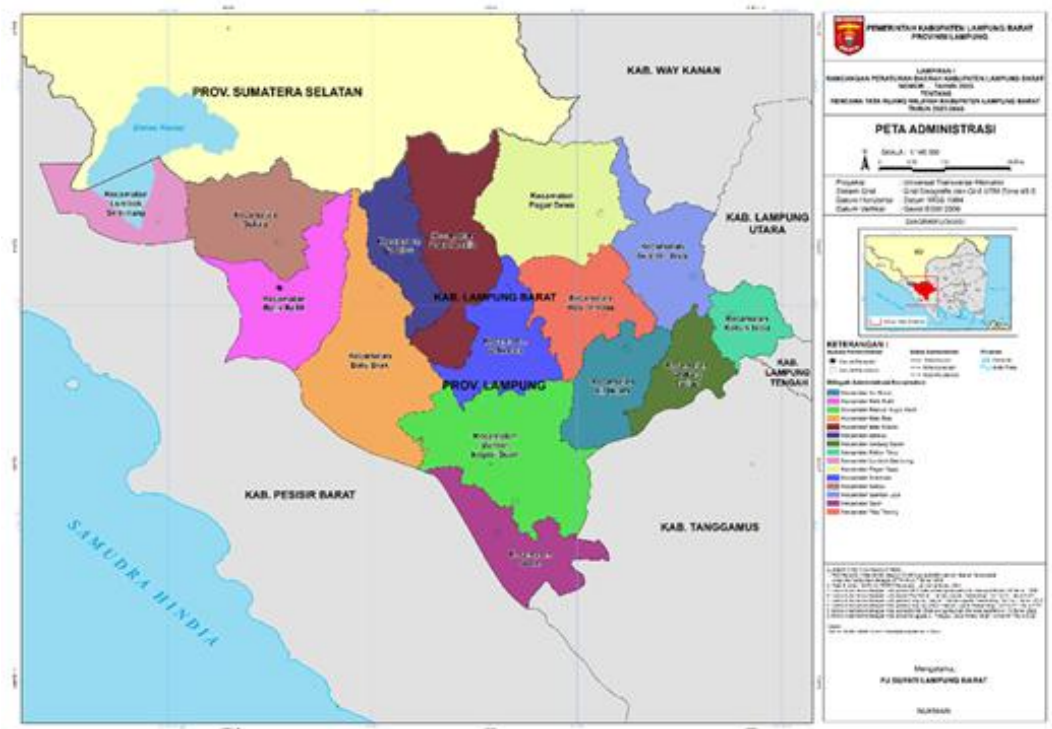
2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Lampung Barat terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 24 September 1991.

Pada tahun 2012, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012, Kabupaten Lampung Barat mengalami pemekaran dengan dibentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pesisir Barat, yang diresmikan pada tanggal 22 April 2013.

Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak pada koordinat 04°51'26" – 05°20'26" Lintang Selatan (LS) dan 103°50'13" – 104°33'49" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah ±210.799 Ha, atau 6,28 % dari luas administrasi Provinsi Lampung.

Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Lampung Barat



Sumber : Lampiran I Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat meliputi:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kabupaten Tanggamus.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus.

Guna mendukung efektivitas dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunannya, Wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat terbagi kedalam 15 wilayah Kecamatan, dengan 131 pekon (desa) dan 5 (lima) kelurahan. Kecamatan terluas berada di Kecamatan Batu Brak ($\pm 24.270,41$ Ha), sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Kebun Tebu ($\pm 6.154,89$ Ha).

Tabel 2.1. Luas Wilayah Perkecamatan

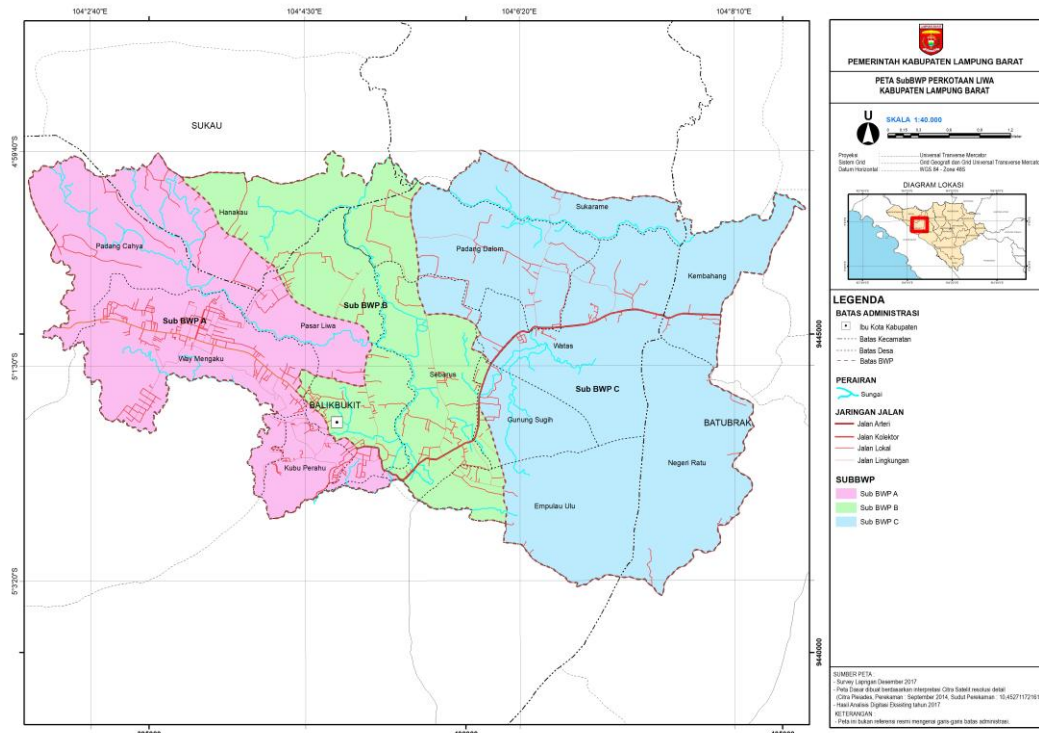
No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Pekon	Juml. Kelurahan	Ibu Kota
1	Balik Bukit	15.853,15	10	2	Pasar Liwa
2	Sukau	14.585,56	10	0	Buay Nyerupa
3	Lumbok Seminung	10.891,42	11	0	Lumbok
4	Belalau	9.390,84	10	0	Kenali
5	Sekincau	11.508,50	4	1	Pampangan
6	Suoh	11.836,20	7	0	Sumber Agung
7	Batu Brak	24.270,41	11	0	Pekon Balak
8	Pagar Dewa	19.770,98	10	0	Basungan
9	Batu Ketulis	18.201,00	10	0	Bakhu
10	Bandar Negeri Suoh	23.839,54	10	0	Sri Mulyo
11	Sumber Jaya	13.098,93	5	1	Tugu Sari
12	Way Tenong	12.969,40	8	1	Mutar Alam
13	Gedung Surian	7.696,22	5	0	Gedung Surian
14	Kebun Tebu	6.154,89	10	0	Pura Jaya
15	Air Hitam	10.812,40	10	0	Semarang Jaya
Lampung Barat		210.799,62	131	5	Liwa

Sumber: Perda Lampung Barat No. 5 tahun 2023

Ibukota Kabupaten Lampung Barat, berkedudukan di Liwa. Dalam Struktur Ruang, Liwa difungsikan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.

Wilayah Kawasan Perkotaan Liwa mencakup 12 pekon dan kelurahan yang meliputi 8 pekon dan 2 kelurahan di Kecamatan Balik Bukit dan 2 (dua) pekon di Kecamatan Sukau, yaitu sebagian pekon Tanjung Raya dan Hanakau. Luas wilayah kawasan perkotaan Liwa ± **5.008,31 Ha.**

Gambar 2.2. Peta SubBWP Perkotaan Liwa



Sumber: RDTR Liwa, Tahun 2018

Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Lampung Barat dikenal sebagai penghasil kopi robusta berkualitas tinggi, yang menjadi komoditas unggulan daerah dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Perkebunan kopi yang luas tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah melalui ekspor.

Kontribusi Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara aktif meningkatkan infrastruktur untuk mendukung sektor ekonomi dan pariwisata. Pada tahun 2024, Lampung Barat menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp3,355 miliar. Dana ini dialokasikan untuk pengadaan sarana pengolahan sampah, seperti truk sampah dan motor roda tiga, guna mendukung destinasi wisata Lumbok Seminung dan menjaga kebersihan lingkungan.

Kontribusi Lingkungan Hidup

Kabupaten Lampung Barat memiliki komitmen kuat terhadap konservasi lingkungan. Sekitar 57% wilayahnya terdiri dari kawasan hutan dan hutan lindung, menjadikannya sebagai daerah penyangga ekosistem yang

penting. Kabupaten ini juga merupakan hulu dari tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Lampung, yaitu DAS Musi, DAS Semangka, dan DAS Tulang Bawang. Pada tahun 2024, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Lampung Barat mencapai 73,09 poin, meningkat 2,54 poin dari tahun sebelumnya, menunjukkan kualitas lingkungan yang baik.

Kontribusi Pariwisata dan Konservasi

Sebagai kabupaten konservasi, Lampung Barat memiliki berbagai destinasi wisata alam, seperti Kebun Raya Liwa dan Danau Ranau, yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Upaya konservasi yang dilakukan tidak hanya menjaga kelestarian alam tetapi juga mendukung sektor pariwisata berkelanjutan, memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Dengan posisi geografis yang strategis dan komitmen terhadap konservasi lingkungan, Kabupaten Lampung Barat memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem regional serta memberikan kontribusi signifikan dalam sektor ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata di Provinsi Lampung.

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Mineral Logam dan Non Logam

Batuan yang umum dijumpai di Kabupaten Lampung Barat adalah endapan gunung api, batu pasir neogen, granit, batu gamping, metamorf, lempung, endapan alluvium, tufa masam, dijumpai endapan emas dan perak serta mineral logam lainnya sebagai mineral ikutan.

Sejak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka urusan dan kewenangan perusahaan pertambangan menjadi kewenangan Pemerintahan Provinsi dan Pusat. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM No.: 115.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Lampung, pada lampiran keputusan, disebutkan bahwa wilayah pertambangan di Kabupaten Lampung Barat, meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN).

Geothermal

Posisi Lampung Barat yang berada pada jalur patahan yang memiliki resiko tinggi terhadap bencana geologi, mengandung pula potensi geologi yang dapat dikembangkan untuk mendukung kedaulatan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan panas bumi (geothermal). Lampung Barat memiliki lima kawasan potensi geothermal, yaitu:

- a) **Panas bumi danau Ranau** telah ditetapkan menjadi Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor. 1551.K/30/MEM/2011, tanggal 21 April 2011, dengan total luas ± 8.561 Ha. Wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat (Provinsi Lampung), dan Kabupaten OKU Selatan (Provinsi Sumatera Selatan).

Wilayah WKP yang berada di Kabupaten Lampung Barat seluas $\pm$ 6.157 Ha (72%) dan sekitar $\pm$ 2.404 Ha (28%) berada di wilayah Kabupaten OKU Selatan. Potensi terduga panas bumi diperkirakan mencapai 210 MWe, dengan rencana pengembangan berupa 1 unit PLTP berkapasitas 40 MWe. Pengusahaan Panas Bumi danau Ranau ditugaskan kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1864 K/30/MEM/2018 tanggal 8 Juni 2018, dengan jangka waktu penugasan selama 37 tahun.

- b) **Panas bumi Sekincau** termasuk sistem panas bumi vulkanik dan berada dalam sistem CAT Kota Agung, memiliki potensi energi panas bumi yang paling tinggi dan paling banyak sebaran titik lokasi manifestasi panas bumi, dengan perkiraan potensi $\pm$ 378 MWe – 485 MWe. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai PLTP dengan Kapasitas 2 x 110 MWe. Manifestasi panas bumi sekincau meliputi kaldera Sekincau, Purunan, Bacingot, Belirang, Suoh-hantatai, Heling, Way Peros, Labuhan Balak-Way Kunjir, Way Ngingi-Way Haru. Meliputi 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Sekincau, Way Tenong, Batu Brak, Suoh dan Bandar Negeri Suoh. Luas wilayah Panas Bumi Sekincau $\pm$ 32.970 Ha dimana sekitar 30.500 Ha berada dalam Kawasan TNBBS. Penugasan Panas Bumi Sekincau diberikan kepada PT Star Energy Geothermal Sekincau Suoh (SGSS) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 1870 K/30/MEM/2018, tanggal 21 Juli 2018.
- c) **Panas Bumi Fajar Bulan**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi sebagian Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, sebagian kecamatan Gedung Surian dan kecamatan Sumberjaya (sisi barat hingga barat daya dari HL Reg 45 B Bukit Rigit). Perkiraan potensi 150- 250 MWe.
- d) **Panas Bumi Way Umpu**, masih merupakan area prospek geothermal, belum ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi oleh Menteri ESDM, meliputi Kecamatan Pagar Dewa, kecamatan Sumberjaya hingga Kabupaten Way Kanan. Perkiraan potensi 110-220 Mwe.
- e) **Panas Bumi Kukusan**, belum tertuang dalam buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 1 (terbitan Kementerian ESDM), akan tetapi tertera dalam peta geologi Belanda tahun 1933. Manifestasi panas bumi berada di sungai Way Penyelan Pekon Buay Nyerupa Kecamatan Sukau dengan kisaran suhu 35°C – 40°C. Hulu dari sungai ini berada di Hutan Lindung Register 43 B Krui Utara dan termasuk dalam CAT Ranau dan sistem panas bumi non vulkanik. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk mengetahui karakteristik dan potensi energi panas bumi yang dapat dihasilkan.

Pemerintah Provinsi Lampung telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2019 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung. Dalam perda ini, pemanfaatan langsung

panas bumi meliputi: a) kegiatan Pariwisata seperti perhotelan, pemandian air panas, dan terapi kesehatan. b) Kegiatan Agrobisnis seperti pengeringan teh, kopi, kopra, jagung, dan green house, c) Kegiatan Industri seperti pengolahan kayu, kulit, dan rotan, d) kegiatan lainnya yang menggunakan Panas Bumi untuk pemanfaatan langsung.

Hidrologi

Geografis Lampung Barat merupakan dataran tinggi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dan kontinuitas siklus hidrologi bagi Provinsi Lampung maupun Propinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah pembentukan hujan sekaligus sebagai daerah tangkapan air (catchment area) yang dialirkan melalui sungai-sungai besar yang membentuk system daerah aliran sungai yang bermuara hingga ke pantai Timur dan Selatan di Propinsi Lampung.

Daerah Aliran Sungai (DAS)

Kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan, karenanya, sangat berperan penting terhadap kinerja sistem hidrologi di dua provinsi tersebut, yaitu sebagai daerah tangkapan air (catchment area) dengan lebih dari 170 anak sungai.

Sungai-sungai besar sebagai inlet dari sistem DAS, diantaranya adalah sungai Way Besai, Way Umpu, Way Giham, yang membentuk sub DAS Way Besai Hulu, yang merupakan bagian dari sistem DAS Mesuji - Tulang Bawang, sungai Way Semaka yang membentuk sub DAS Semaka, dan sungai Way Warkuk yang bermuara di danau Ranau sebagai sub DAS Warkuk yang merupakan bagian dari sistem DAS Musi.

DAS Tulang Bawang (wilayah Sungai Mesuji-Tulang Bawang), memiliki luasan ± 982.292 Ha, dimana sekitar 6,8% dari luasan tersebut atau sekitar 67.411 Ha berada di Kabupaten Lampung Barat sebagai hulu dari sungai-sungai besar pembentuk DAS Tulang Bawang.

Berdasarkan data BPDAS Tahun 2016, sub DAS dari DAS Tulang Bawang yang wilayahnya masuk Kabupaten Lampung Barat antara lain sub DAS Way Besai (41.780 ha), Way Giham (15.315 ha), Way Rarem (1.972 ha), dan Way Tahmi (8.345 ha), yang wilayah alirannya mencakup Kecamatan Way Tenong, Air Hitam, Pagar Dewa, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Kecamatan Sumberjaya. DAS Tulang Bawang masuk sebagai DAS Prioritas Nasional, sebagai pendukung ketahanan pangan dan energi Nasional.

DAS Way Semaka masuk dalam DAS prioritas Provinsi Lampung, dimana wilayahnya meliputi Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Tanggamus, dengan luas daerah catchment area $\pm 1.614,5$ km².

Sungai dan Danau

Lampung Barat dialiri tiga sungai besar yaitu Way Besay, Way Semangka, dan Way Warkuk serta memiliki danau terbesar kedua di Pulau Sumatera yaitu Danau Ranau.

Panjang sungai Way Semaka $\pm 95,47$ km, dengan hulu sungai berada di gunung Pesagi dan gunung Sekincau (Kabupaten Lampung Barat), dan bermuara di Teluk Semaka (Kabupaten Tanggamus). Beberapa anak sungai yang mengalir menuju sungai Semaka yang berada di Kabupaten Lampung Barat antara lain: Way Kegeringan, Way Rubok, Way Lebuy, Way Hantatai, Way Haru, Way Maraman, Way Giham, Way Meneng, Way Ngarip, Way Melebui Balak, Way Andarumon, Way Pampangan, Way Bumbon, Way Bata, Way Laga, dan Way Pasir.

Danau Ranau merupakan outlet dari sub DAS Komering, yang merupakan bagian dari DAS Musi. Luas sub DAS Komering $\pm 407.898,78$ Ha, sedangkan luas Outlet Danau Ranau mencapai $\pm 508 \text{ km}^2$ (50.800 Ha) yang terdiri dari luas daratan dan luas perairan. Luas perairan Danau Ranau mencapai $\pm 12.623,52$ Ha dan luas daratan sebagai daerah tangkapan air (catchment area) mencapai $\pm 38.176,48$ Ha, dengan panjang total garis sempadan danau mencapai: $\pm 64,7$ km.

Perairan danau Ranau seluas $\pm 2.792,19$ Ha (22,12%) berada di Kecamatan Lumbok Seminung, dengan panjang garis sempadan danau $\pm 23,6$ km.

Gambar 2.3. Danau-danau yang ada di Kabupaten Lampung Barat



Keterangan: *Kiri:* danau Ranau dan gunung Seminung di Kecamatan Lumbok Seminung, *Kanan:* danau Lebar dan danau Minyak di Kecamatan Suoh.

Berdasarkan data dari **BBWS Wilayah Sungai Sumatera VIII**, jumlah sungai yang bermuara di danau Ranau (inlet) sebanyak ± 36 sungai dan 1 sungai sebagai outlet yaitu sungai Silabung. Inlet terpanjang adalah sungai Way Warkuk dengan panjang mencapai ± 26 km. Danau Ranau termasuk danau prioritas nasional Tahap II.

Selain Danau Ranau, Lampung Barat juga memiliki 4 danau kecil yang terletak di Kecamatan Suoh yaitu Danau Lebar (67,6 Ha), Danau Asam (121,1 Ha), Danau Minyak (10 Ha), dan Danau Belibis (2 Ha).

Keempat danau tersebut berada pada zona Pemanfaatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS). Wilayah ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan sebagai Geopark, karena keunikan proses geologinya, dimana keempat danau tersebut terbentuk sebagai akibat proses erupsi freatik (semi vulkanik) dari salah satu kaldera di kompleks kaldera pematang bata pada tanggal 10 Juli 1933. Letusan tersebut dipicu oleh kejadian gempa yang terjadi sebelumnya pada tanggal 25 Juni 1933.

Cekungan Air Tanah

Cekungan Air Tanah (CAT) adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung. CAT menyediakan sumber daya air yang berpotensi sebagai bahan baku hydrothermal pada sistem panas bumi. Lampiran Peraturan Menteri ESDM No. 2 tahun 2016 tentang Cekungan Air Tanah di Indonesia, memetakan wilayah hidrogeologis Kabupaten Lampung Barat kedalam 3 (tiga) CAT, yaitu:

- a) **CAT Ranau** dengan luas $\pm 1.501 \text{ km}^2$, CAT Ranau meliputi Kecamatan Lumbok Seminung, Kecamatan Sukau, dan sebagian Kecamatan Balik Bukit.
- b) **CAT Kota Agung** dengan luas $\pm 1.236 \text{ km}^2$, CAT Kota Agung meliputi Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh.
- c) **CAT Metro-Kotabumi** dengan luas $\pm 21.640 \text{ km}^2$. CAT Metro-Kotabumi meliputi Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Sekincau, Pagar Dewa, Way Tenong, Air Hitam, Gedung Surian, Kebun Tebu, dan Sumber Jaya.

Potensi Kandungan

Keberadaan sungai, danau, dan cekungan air tanah, menyediakan pasokan sumber daya air yang melimpah. Ketersediaan air baku yang melimpah akan menjamin, perwujudan ketahanan dan keamanan pangan, ketahanan energi, ketahanan ekologi, serta pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam mendukung perwujudan kawasan permukiman yang berkelanjutan, seperti air bersih, sanitasi, dan energi listrik. Beberapa peranan penting sumber daya air di Lampung Barat sebagai berikut:

a) Pembentuk Sistem Kebudayaan

Sebagian besar permukiman yang berkembang di kabupaten Lampung Barat, berada di sempadan sungai. Hasil penelitian Badan Arkeologi Bandung pada tahun 2019, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 16 situs pemukiman kuno abad 10-14 masehi ditemukan di sepanjang sungai Way Rubok (Kecamatan Balik Bukit). Bagi masyarakat kuno, sungai berperan sebagai sistem navigasi dan jalur migrasi penduduk membentuk koloni (pemukiman), bahkan pada masa kerajaan Sriwijaya (abad 7 – 12 masehi) beberapa sungai besar dipergunakan sebagai jalur perdagangan. Bentuk adaptasi permukiman terhadap sungai terlihat pada arsitektur bangunan rumah tradisional masyarakat asli yang berbentuk rumah panggung dengan

pola penyebaran seperti pita (ribbon) atau linear. Ikatan kekerabatan bagi masyarakat asli (Lampung) juga didasari atau dikelompokkan berdasarkan daerah aliran sungai, yang disebut sebagai Kebuayan. Adaptasi terhadap kondisi sumber daya air, melahirkan bentuk-bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan konservasi, pemanfaatan dan pengendalian daya rusak sumber daya air.

b) Penyedia Sistem Air Baku

Air baku adalah sumber air yang menjadi bahan baku pengolahan untuk dimanfaatkan sebagai konsumsi air minum dan kebutuhan lain-lainnya. Sumber air baku di Lampung Barat meliputi: air tanah, air permukaan, mata air, dan air hujan. Pemanfaatan air baku di Lampung Barat antara lain sebagai penyediaan sistem air bersih untuk air minum, sanitasi dan sistem irigasi.

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Limau Kunci. Hingga tahun 2023, PDAM Limau Kunci memiliki 10 unit SPAM perpipaan dengan kapasitas 6 – 21 liter/detik. Cakupan layanan meliputi sistem perkotaan di kecamatan Balik Bukit, Sukau, Batu Brak, Belalau, Sekincau, Way Tenong, dan Kebun Tebu, dengan jumlah sambungan rumah mencapai 15.310 SR atau baru sekitar 39,2% dari kapasitas terpasang.

Selain penyediaan air minum perkotaan yang dikelola oleh PDAM, dilakukan pula pelayanan penyediaan air minum pedesaan yang pengelolaannya dilakukan oleh pekon, dengan jumlah cakupan layanan air bersih mencapai 74.787 KK atau sekitar 89% dari total kepala keluarga di Lampung Barat.

Pemanfaatan lain dari air baku adalah sebagai sumber air irigasi guna mendukung kedaulatan pangan. Hingga tahun 2024, terbangun sebanyak 118 daerah irigasi (DI) dengan luas DI (baku Sawah) $\pm$ 11.442,76 Ha dengan indek pertanaman (IP) mencapai $\pm$ 121,02 %.

c) Penyedia Energi Baru Terbarukan

Sungai-sungai yang mengalir ke arah Timur maupun Selatan, umumnya memiliki alur yang panjang. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air, baik berupa PLTMH (mikrohidro, minihidro) maupun PLTA. Sungai-sungai yang saat ini sudah dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, adalah sungai Way Besai dan sungai Way Semaka.

Pemanfaatan sungai Way Besai sebagai sumber energi Listrik di Lampung Barat dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) melalui PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 MWe,

Pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe,

PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 MWe.

Potensi Kopi

Tabel 2.2. Produksi Kopi

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Produksi Kopi Robusta (ton)	56,054.4	54,563.2	56,054.4	52,325.8	62,979.5
2	Produksi Lada (ton)	3,061.6	3,061.6	3,061.6	2,649.0	2,698.9

Sumber : Dinas Perkebunan dan Peternakan, Tahun 2025

Tabel di atas menunjukkan bahwa produksi kopi robusta di Lampung Barat mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Produksi kopi tercatat sebesar 56.054,4 ton pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi 54.563,2 ton pada tahun 2021. Meski kembali meningkat pada tahun 2022 dengan jumlah produksi yang sama seperti tahun 2020, yaitu 56.054,4 ton, produksi kembali menurun pada tahun 2023 menjadi 52.325,8 ton. Namun, pada tahun 2024, produksi kopi robusta meningkat signifikan hingga mencapai 62.979,5 ton, mencerminkan pemulihan yang sangat baik dalam sektor ini.

Sementara itu, produksi lada menunjukkan tren yang lebih stabil, meskipun dengan sedikit penurunan. Dari 2020 hingga 2022, produksi lada tetap konstan di angka 3.061,6 ton. Namun, pada tahun 2023, terjadi penurunan menjadi 2.649,0 ton, sebelum kembali mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2024 dengan jumlah produksi 2.698,9 ton.

Lampung Barat memiliki potensi agribisnis yang besar, terutama pada komoditas kopi robusta dan lada. Produksi kopi robusta, yang menjadi salah satu produk unggulan daerah, menunjukkan pola fluktuasi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, produksi kopi robusta mencapai 62.979,5 ton, angka tertinggi selama periode tersebut, mencerminkan potensi besar wilayah ini sebagai penghasil kopi berkualitas. Kenaikan produksi ini menandakan keberhasilan dalam penerapan teknologi pertanian, rehabilitasi lahan, atau perbaikan sistem pengelolaan hasil panen.

Di sisi lain, lada juga menjadi komoditas penting meskipun produksinya cenderung stabil dengan sedikit penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Produksi lada pada tahun 2024 tercatat sebesar 2.698,9 ton, menunjukkan adanya peluang untuk pengembangan lebih lanjut.

Lampung Barat dengan keunggulan agrarisnya memiliki potensi untuk terus meningkatkan daya saing di pasar domestik dan internasional melalui inovasi, pengelolaan yang efisien, dan perluasan akses pasar untuk kedua komoditas ini. Kombinasi kopi dan lada sebagai produk unggulan menjadikan Lampung Barat sebagai salah satu pusat agribisnis strategis di Indonesia.

2.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

1. Daya Dukung Air

Ketersediaan air yang berada di bumi merupakan suatu sistem yang dinamik, artinya selalu berubah dari waktu ke waktu. Neraca air lahan merupakan suatu estimasi ketersediaan air yang berada pada suatu lahan tertentu dengan jenis tutupan tertentu. Ketersediaan air yang merupakan bagian dari fenomena alam, sering sulit untuk diatur dan diprediksi dengan akurat. Hal ini karena ketersediaan air mengandung unsur variabilitas ruang (*spatial variability*) dan variabilitas waktu (*temporal variability*) yang sangat tinggi. Penerapan rencana tata ruang harus memperhatikan aspek keterkaitan ekologis, efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang, serta dalam pengelolaannya memperhatikan kerja sama antar daerah. Berikut rekapitulasi luas tutupan lahan terhadap daya dukung air di Kabupaten Lampung Barat disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 2.3. Rekapitulasi Luas Tutupan Lahan Terhadap Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat

No	Tutupan Lahan	Luas	Koefisien	Luas X Koefisien
1.	Danau	3.094,58	1,00	3.094,58
2.	Hutan Rimba	39.651,51	1,00	39.651,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	98,16	0,21	20,40
5.	Perkebunan/Kebun	121.266,32	0,21	25.591,93
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	384,35	1,00	484,35
8.	Sawah	11.493,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.126,02	0,21	5.318,65
10.	Sungai	466,98	1,00	466,98
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,92	0,21	4,83
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210.799,00	-	81.856,73

Sumber : Perda Nomor 5 tahun 2023, RTRW Kabupaten Lampung Barat 2023-2043.

Berdasarkan perhitungan hasil dari Tabel 3.9 dapat dilihat bahwa jumlah ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat setelah dilakukan perhitungan adalah 1.651.173.935,39 m³/tahun. Kemudian untuk mengetahui selisih antara jumlah ketersediaan dan kebutuhan maka jumlah air yang tersedia di Kabupaten Lampung Barat dikonversikan dalam L/tahun sehingga ketersediaan air di Kabupaten Lampung Barat sebesar 1.651.173.935.390 L/tahun. Sementara itu, kebutuhan air dihitung dari hasil konservasi terhadap kebutuhan hidup layak untuk memenuhi kebutuhan air secara minimal yang harus dipenuhi untuk setiap masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Asumsi kebutuhan air dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 01 Tahun 2014 bahwa kebutuhan air bersih domestik minimal yaitu 60 Liter/orang/hari, sedangkan asumsi 20% untuk kebutuhan air bersih domestik (sekolah, kantor, tempat ibadah, dll).

Kebutuhan perkapita untuk air bersih domestik dan non domestik tersebut kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat. Untuk kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat dengan menggunakan standar yang digunakan maka dapat di ketahui bahwa kebutuhan air domestik Kabupaten Lampung Barat adalah sebesar 6.747.623.060 L/tahun. Angka ini didapatkan dengan mengalikan jumlah kebutuhan air per orang per hari dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Kemudian mengalikannya dengan 365 hari dalam setahun untuk mengetahui jumlah kebutuhan air dalam satu tahun. Asumsi untuk kebutuhan air pada kegiatan pertanian dihitung dengan mengalikan luas lahan pertanian sawah terhadap 1,2 Liter/Detik/Ha pada setiap musim panen sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal untuk irigasi pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum untuk standar pelayanan minimal kebutuhan irigasi sawah. Adapun untuk contoh perhitungan jumlah kebutuhan air untuk kegiatan domestik, non domestik dan pertanian di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel 3.12 dibawah ini. Perhitungan kebutuhan air seperti inilah yang menjadi dasar dalam proyeksi daya dukung air pada tahun berikutnya :

Tabel 2.4. Status Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Air Hitam	10.406	221.687.565	49.337.513	933.304.896	213.639.209.317	SULUS
2	Balik Bukit	36.622	861.523.710	132.304.742	2.310.421.236		SULUS
3	Bandar Negeri Suoh	22.041	542.206.950	68.441.390	54.812.868.903		SULUS
4	Batu Brak	9.727	272.525.487	59.505.097	9.010.932.634		SULUS
5	Batu Ketulis	8.981	256.182.910	56.236.582	2.992.349.789		SULUS
6	Belalau	7.463	222.930.572	49.586.114	15.905.234.831		SULUS
7	Gedung Surian	11.624	414.069.738	62.813.948	16.286.832.337		SULUS
8	Kabun Tebu	16.613	423.326.137	89.665.227	23.978.545.386		SULUS
9	Lumbok Seminung	2.834	121.570.020	29.314.004	3.849.820.615		SULUS
10	Pagar Dewa	13.131	347.066.725	61.413.345	444.006.435		SULUS
11	Sekincau	14.241	371.368.352	71.273.670	5.086.864.184		SULUS
12	Sukau	19.590	488.515.159	97.703.032	17.395.477.356		SULUS
13	Sumber Jaya	19.835	493.885.812	98.777.162	4.465.017.597		SULUS
14	Suoh	12.904	392.100.784	60.420.157	39.080.684.980		SULUS
15	Way Tenong	30.099	768.663.138	93.732.628	9.808.464.357		SULUS
TOTAL		236.111	6.197.623.059	1.080.524.611	206.360.825.536	213.639.209.317	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

2. Status Daya Dukung Air (Proyeksi Kebutuhan Air)

Berdasarkan perhitungan dari Tabel 3.9 ketersediaan dan kebutuhan air maka dalam perhitungan tahun 2025, 2026, 2027, 2028 dan 2029 maka status daya dukung air di Kabupaten Lampung Barat berada pada kondisi sulus, artinya masih memenuhi daya dukung air. Hal ini didasarkan pada perhitungan dengan membandingkan antara kebutuhan air minimum per orang dengan volume ketersediaan air Kabupaten Lampung Barat. Selain itu, penentuan status daya dukung air berdasarkan rasio dapat ditentukan setelah diketahui besarnya ketersediaan air dan kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Kriteria status daya dukung lingkungan berbasis neraca air tidak cukup dinyatakan dengan sulus atau relatif saja. Namun untuk menunjukkan besaran relative, perlu juga dinyatakan dengan nilai supply/demand. Supply menunjukkan jumlah ketersediaan air di wilayah tersebut yaitu berupa jumlah ketersediaan air dari volume curah hujan rerata kawasan, sedangkan demand menunjukkan jumlah kebutuhan air berdasarkan faktor penentu kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat. Proyeksi perhitungan kebutuhan air di Kabupaten Lampung Barat dapat diukur melalui berbagai metode dan pendekatan yang mempertimbangkan faktor-faktor demografis, ekonomi, dan lingkungan.

Model pertumbuhan populasi salah satu perhitungan proyeksi kebutuhan air berdasarkan pertumbuhan populasi. Metode ini memperhitungkan peningkatan jumlah penduduk dan perubahan dalam pola konsumsi air per kapita. Rumus yang umum digunakan adalah: Kebutuhan Air Masa Depan=Populasi Proyeksi× Konsumsi Air Per Kapita.

Dengan melihat perbandingan tersebut untuk Kabupaten Lampung Barat, maka pada tahun 2021 didapat rasio ketersediaan dan kebutuhan air yaitu berada pada kondisi sulus dan aman, begitu juga tahun 2029 memiliki status sulus dan aman. Secara lengkap rasio daya dukung air per kecamatan di Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel-Tabel berikut dengan penggunaan proyeksi masing-masing kebutuhan air setiap tahunnya :

Tabel 2.5. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Air Hitam	17.406	271.688.565	54.337.613	1.533.304.896	266.558.354.318	SULUS
2	Balik Bukit	46.622	911.524.710	182.305.742	4.810.421.236		SULUS
3	Bandar Negeri Suoh	32.041	592.207.950	118.442.390	64.812.868.903		SULUS
4	Batu Brak	19.727	322.526.487	64.506.097	15.010.932.634		SULUS
5	Batu Ketulis	18.981	306.183.910	61.237.582	9.992.349.789		SULUS
6	Belalau	15.463	272.931.572	54.587.114	23.905.234.831		SULUS
7	Gedung Surian	21.624	364.070.738	72.814.948	21.286.832.337		SULUS
8	Kabun Tebu	26.613	473.327.137	94.666.227	33.978.545.386		SULUS
9	Lumbok Seminung	12.834	171.571.020	34.315.004	13.849.820.615		SULUS
10	Pagar Dewa	23.131	397.067.725	79.414.345	10.444.006.435		SULUS
11	Sekincau	24.241	421.369.352	84.274.670	14.086.864.184		SULUS
12	Sukau	29.590	538.516.159	107.704.032	27.395.477.356		SULUS
13	Sumber Jaya	29.835	543.886.812	108.778.162	9.965.017.597		SULUS
14	Suoh	22.904	392.101.784	78.421.157	49.080.684.980		SULUS
15	Way Tenong	40.099	768.663.138	153.731.628	19.808.464.357		SULUS
TOTAL		381.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.354.318	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.6. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	22.406	321.688.565	54.342.613	1.533.309.896	266.558.429.318	SULUS
2	Sukau	51.622	961.524.710	182.310.742	4.810.426.236		SULUS
3	Lumbok Seminung	37.041	642.207.950	118.447.390	64.812.873.903		SULUS
4	Belalau	24.727	372.526.487	64.511.097	15.010.972.634		SULUS
5	Sekincau	23.981	356.183.910	61.242.582	9.992.399.789		SULUS
6	Suoh	20.463	322.931.572	54.592.114	23.905.284.831		SULUS
7	Batu Brak	26.624	414.070.738	72.819.948	21.286.882.337		SULUS
8	Pagar Dewa	31.613	523.327.137	94.671.227	33.978.595.386		SULUS
9	Batu Ketulis	17.834	221.571.020	34.320.004	13.849.870.615		SULUS
10	Bandar Negeri Suoh	28.131	447.067.725	79.419.345	10.444.011.435		SULUS
11	Sumber Jaya	29.241	471.369.352	84.279.670	14.086.869.184		SULUS
12	Way Tenong	34.590	588.516.159	107.709.032	27.395.482.356		SULUS
13	Gedung Surian	34.835	593.886.812	108.781.162	9.965.022.597		SULUS
14	Kabun Tebu	27.904	442.101.784	78.426.157	49.080.734.980		SULUS
15	Air Hitam	45.099	818.663.138	153.736.628	19.808.514.357		SULUS
TOTAL		456.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.429.318	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.7. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2027

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	27.406	371.688.565	54.347.613	1.533.314.896	266.558.514.318	SULUS
2	Sukau	56.622	1.011.524.710	182.315.742	4.810.431.236		SULUS
3	Lumbok Seminung	42.041	692.207.950	118.452.390	64.812.878.903		SULUS
4	Belalau	29.727	422.526.487	64.516.097	15.010.977.634		SULUS
5	Sekincau	28.981	406.183.910	61.247.582	99.923.104.789		SULUS
6	Suoh	25.463	372.931.572	54.597.114	23.905.289.831		SULUS
7	Batu Brak	31.624	464.070.738	72.824.948	21.286.887.337		SULUS
8	Pagar Dewa	36.613	573.327.137	94.676.227	339.785.105.386		SULUS
9	Batu Ketulis	22.834	271.571.020	34.325.004	13.849.920.615		SULUS
10	Bandar Negeri Suoh	43.131	497.067.725	79.424.345	10.444.061.435		SULUS
11	Sumber Jaya	34.241	521.369.352	84.284.670	14.086.874.184		SULUS
12	Way Tenong	39.590	638.516.159	107.714.032	27.395.487.356		SULUS
13	Gedung Surian	39.835	643.886.812	108.786.162	9.965.027.597		SULUS
14	Kabun Tebu	32.904	492.101.784	78.431.157	49.080.739.980		SULUS
15	Air Hitam	50.099	868.663.138	153.741.628	19.808.519.357		SULUS
TOTAL		541.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.514.318	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.8. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2028

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Non-domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	32.406	421.688.565	54.352.613	1.533.320.896	266.558.589.318	SULUS
2	Sukau	61.622	1.511.524.710	182.320.742	4.810.436.236		SULUS
3	Lumbok Seminung	47.041	74.692.207.950	118.457.390	64.812.883.903		SULUS
4	Belalau	34.727	472.526.487	64.521.097	15.010.982.634		SULUS
5	Sekincau	33.981	456.183.910	61.252.582	99.923.154.789		SULUS
6	Suoh	30.463	422.931.572	54.602.114	23.905.339.831		SULUS
7	Batu Brak	36.624	514.070.738	72.829.948	21.286.937.337		SULUS
8	Pagar Dewa	41.613	623.327.137	94.681.227	339.785.155.386		SULUS
9	Batu Ketulis	27.834	321.571.020	34.330.004	13.849.925.615		SULUS
10	Bandar Negeri Suoh	48.131	547.067.725	79.429.345	10.444.066.435		SULUS
11	Sumber Jaya	39.241	571.369.352	84.289.670	14.086.924.184		SULUS
12	Way Tenong	44.590	688.516.159	107.719.032	27.395.537.356		SULUS
13	Gedung Surian	44.835	693.886.812	108.796.162	9.965.107.597		SULUS
14	Kabun Tebu	37.904	542.101.784	78.436.157	49.080.789.980		SULUS
15	Air Hitam	55.099	918.663.138	153.791.628	19.808.569.357		SULUS
TOTAL		616.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.558.589.318	SULUS

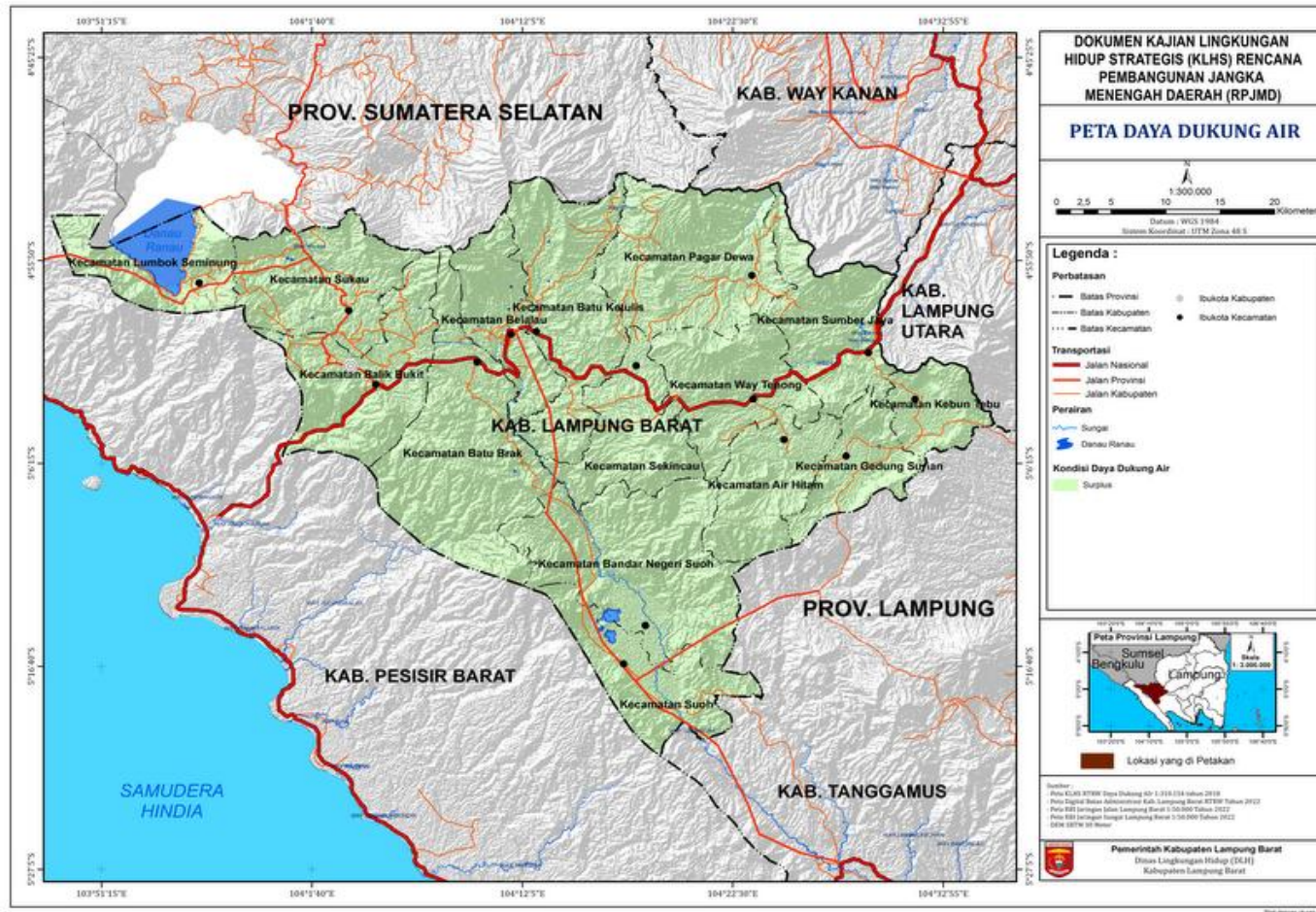
Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.9. Kebutuhan Air Kabupaten Lampung Barat Tahun 2029

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)			Ketersediaan air (L/Tahun)	Status Daya Dukung Air
			Kebutuhan air Domestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air Nondomestik (L/Tahun)	Kebutuhan Air KP2B Per Musim Tanam (L/Tahun)		
1	Balik Bukit	36.406	471.688.565	54.357.613	1.533.335.896	266.561.858.318	SULUS
2	Sukau	66.622	2.011.524.710	182.325.742	4.810.441.236		SULUS
3	Lumbok Seminung	52.041	79.692.207.950	118.462.390	64.812.933.903		SULUS
4	Belalau	39.727	522.526.487	64.526.097	15.011.032.634		SULUS
5	Sekincau	38.981	506.183.910	61.257.582	99.923.204.789		SULUS
6	Suoh	35.463	472.931.572	54.607.114	23.905.389.831		SULUS
7	Batu Brak	41.624	564.070.738	72.834.948	21.286.987.337		SULUS
8	Pagar Dewa	46.613	673.327.137	94.686.227	339.785.205.386		SULUS
9	Batu Ketulis	3.227.834	371.571.020	34.335.004	13.849.930.615		SULUS
10	Bandar Negeri Suoh	53.131	597.067.725	79.434.345	10.444.071.435		SULUS
11	Sumber Jaya	44.241	621.369.352	84.294.670	14.086.974.184		SULUS
12	Way Tenong	49.590	738.516.159	107.724.032	27.395.587.356		SULUS
13	Gedung Surian	49.835	743.886.812	108.846.162	9.965.112.597		SULUS
14	Kabun Tebu	42.904	592.101.784	78.441.157	49.080.794.980		SULUS
15	Air Hitam	60.099	968.663.138	153.796.628	19.808.619.357		SULUS
TOTAL		3.885.111	6.747.623.060	1.349.524.612	258.460.825.535	266.561.858.318	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Gambar 2.4. Peta Daya Dukung Air Kabupaten Lampung Barat



Sumber : KLHS RTRW Kab Lampung Barat 2021 dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

3. Analisis Daya Dukung Lahan

Daya dukung lahan adalah kapasitas lahan untuk mendukung aktivitas manusia, baik dari segi fisik, kimia, maupun biologis, tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan. Daya dukung lahan mencakup kemampuan lahan untuk menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh makhluk hidup (seperti air, makanan, dan ruang), serta kemampuan untuk menyerap dan mengurai limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Konsep daya dukung lahan penting dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan.

4. Status Daya Dukung Lahan

Status daya dukung lahan Kabupaten Lampung Barat ditentukan berdasarkan jumlah atau persentase luasan lahan potensial, kendala atau limitasi yang ada. Dari hasil analisis yang telah dilakukan daya dukung lahan di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh lahan potensi sebesar 30% secara keseluruhan, hasil analisis daya dukung lahan yang ditunjukkan pada Tabel 3.17 dibawah ini:

Tabel 2.10. Daya Dukung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021

No	Kecamatan	Daya Dukung Lahan		
		Limit	Kendala	Potensi
1.	Air Hitam	6.130,75	764,23	3.917,42
2.	Balik Bukit	6.069,81	3.969,79	5.827,02
3.	Bandar Negeri Suoh	20.496,28	1.988,42	4.110,41
4.	Batu Brak	10.103,89	7.263,61	2.469,21
5.	Batu Ketulis	4.029,21	7.115,39	8.169,83
6.	Belalau	2.075,84	5.238,63	2.072,34
7.	Gedung Surian	3.439,49	521,08	3.686,79
8.	Kebun Tebu	3.485,06		2.483,85
9.	Lumbok Seminung	3.207,61	1.989,76	4.536,42
10.	Pagar Dewa	9.795,43	3.261,57	7.317,04
11.	Sekincau	6.112,86	764,32	4.631,33
12.	Sukau	4.490,98	7.486,33	2.618,93
13.	Sumber Jaya	8.614,18	1.396,56	2.758,41
14.	Suoh	10.937,44	1.069,27	2.818,00
15.	Way Tenong	5.328,21	2.265,03	5.376,16
	Total	104.317,05	45.093,98	62.793,16

Sumber : KLHS RTRW 2021

5. Analisis Daya Tampung Lahan

Berdasarkan hasil analisis yang diuraikan diatas tentang daya dukung lahan yang sebelumnya telah dilakukan maka dapat menjadikan dasar perhitungan proyeksi daya tampung lahan di Kabupaten Lampung Barat sampai tahun 2041. Kapasitas lahan yang dimaksudkan adalah kapasitas untuk menampung kegiatan perkotaan terdiri dari lahan potensial dan

lahan kendala perkecamatan. Kapasitas lahan potensial dan lahan kendala ini disebut juga sebagai ketersediaan lahan (SL). Setelah mengetahui ketersediaan lahan, analisis daya tampung lahan juga memerlukan angka dari luas kebutuhan lahan pada masa mendatang yaitu menggunakan sistem proyeksi kebutuhan pada 20 tahun kedepan sebagai demand atau permintaan dari lahan (DL). Berdasarkan penetapan standarisasi nasional oleh Dirjen Cipta Karya kebutuhan lahan per keluarga (4 jiwa) yaitu sebesar 36 m², maka hasil akhir daya tampung lahan didapat dari rasio perbandingan SL/DL. Hasil analisis diperoleh $0,8 < 1$, hal ini artinya berdasarkan jumlah lahan yang ada, maka di wilayah tersebut sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Lahan-lahan yang berada pada posisi demikian perlu mendapatkan program peningkatan produktivitas, intensifikasi dan ekstensifikasi melalui perbaikan teknologi atau menekan pertumbuhan penduduk. Berikut daya tampung lahan yang ada di kawasan Lampung Barat dapat dilihat pada Tabel-Tabel dibawah ini:

Tabel 2.11. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	42.566	130,94	38,31	3,42	SULUS
2.	Sukau	25.536	1092,03	22,98	47,52	SULUS
3.	Lumbok Seminung	8.153	299,68	7,34	40,84	SULUS
4.	Belalau	12.500	440,95	11,25	39,19	SULUS
5.	Sekincau	19.447	124,55	17,50	7,12	SULUS
6.	Suoh	17.312	380,26	15,58	24,41	SULUS
7.	Batu Brak	15.197	262,36	13,68	19,18	SULUS
8.	Pagar Dewa	17.751	306,04	15,98	19,16	SULUS
9.	Batu Ketulis	13.749	91,06	12,37	7,36	SULUS
10.	Bandar Negeri Suoh	27.798	774,01	25,02	30,94	SULUS
11.	Sumber Jaya	25.078	211,89	22,57	9,39	SULUS
12.	Way Tenong	35.547	675,67	31,99	21,12	SULUS
13.	Gedung Surian	17.026	287,28	15,32	18,75	SULUS
14.	Kebun Tebu	21.742	196,40	19,57	10,04	SULUS
15.	Air hitam	12.410	422,98	11,17	37,87	SULUS
	Total	311.811	311.811	280,63	20,30	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

**Tabel 2.12. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026**

No	Kecamatan	Tahun 2026			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	47.618	130,94	42,86	3,06	SULUS
2.	Sukau	30.839	1092,03	27,76	39,35	SULUS
3.	Lumbok Seminung	9.950	299,68	8,96	33,46	SULUS
4.	Belalau	12.692	440,95	11,42	38,60	SULUS
5.	Sekincau	20.513	124,55	18,46	6,75	SULUS
6.	Suoh	14.631	380,26	13,17	28,88	SULUS
7.	Batu Brak	17.777	262,36	16,00	16,40	SULUS
8.	Pagar Dewa	15.969	306,04	14,37	21,29	SULUS
9.	Batu Ketulis	12.644	91,06	11,38	8,00	SULUS
10.	Bandar Negeri Suoh	31.912	774,01	28,72	26,95	SULUS
11.	Sumber Jaya	26.328	211,89	23,69	8,94	SULUS
12.	Way Tenong	37.877	675,67	34,09	19,82	SULUS
13.	Gedung Surian	19.187	287,28	17,27	16,64	SULUS
14.	Kebun Tebu	22.395	196,40	20,16	9,74	SULUS
15.	Air hitam	12.431	422,98	11,19	37,81	SULUS
	Total	332.763	332.763	299,49	19,02	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

**Tabel 2.13. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2027**

No	Kecamatan	Tahun 2027			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	53.268	130,94	47,94	2,73	SULUS
2.	Sukau	37.244	1092,03	33,52	32,58	SULUS
3.	Lumbok Seminung	12.144	299,68	10,93	27,42	SULUS
4.	Belalau	12.886	440,95	11,60	38,02	SULUS
5.	Sekincau	21.638	124,55	19,47	6,40	SULUS
6.	Suoh	12.365	380,26	11,13	34,17	SULUS
7.	Batu Brak	20.797	262,36	18,72	14,02	SULUS
8.	Pagar Dewa	14.366	306,04	12,93	23,67	SULUS

No	Kecamatan	Tahun 2027			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
9.	Batu Ketulis	11.628	91,06	10,46	8,70	SULUS
10.	Bandar Negeri Suoh	36.634	774,01	32,97	23,48	SULUS
11.	Sumber Jaya	27.640	211,89	24,88	8,52	SULUS
12.	Way Tenong	40.358	675,67	36,32	18,60	SULUS
13.	Gedung Surian	21.622	287,28	19,46	14,76	SULUS
14.	Kebun Tebu	23.069	196,40	20,76	9,46	SULUS
15.	Air hitam	12.453	422,98	11,21	37,74	SULUS
	Total	358.111	358.111	322,30	17,67	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Tabel 2.14. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2028

No	Kecamatan	Tahun 2028			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	59590	130,94	53,63	2,44	SULUS
2.	Sukau	44979	1092,03	40,48	26,98	SULUS
3.	Lumbok Seminung	14821	299,68	13,34	22,47	SULUS
4.	Belalau	13083	440,95	11,77	37,45	SULUS
5.	Sekincau	22824	124,55	20,54	6,06	SULUS
6.	Suoh	10450	380,26	9,41	40,43	SULUS
7.	Batu Brak	24329	262,36	21,90	11,98	SULUS
8.	Pagar Dewa	12924	306,04	11,63	26,31	SULUS
9.	Batu Ketulis	10693	91,06	9,62	9,46	SULUS
10.	Bandar Negeri Suoh	42055	774,01	37,85	20,45	SULUS
11.	Sumber Jaya	29017	211,89	26,12	8,11	SULUS
12.	Way Tenong	43003	675,67	38,70	17,46	SULUS
13.	Gedung Surian	24367	287,28	21,93	13,10	SULUS
14.	Kebun Tebu	23763	196,40	21,39	9,18	SULUS
15.	Air hitam	12474	422,98	11,23	37,68	SULUS
	Total	388372	5696,10	349,53	16,30	SULUS

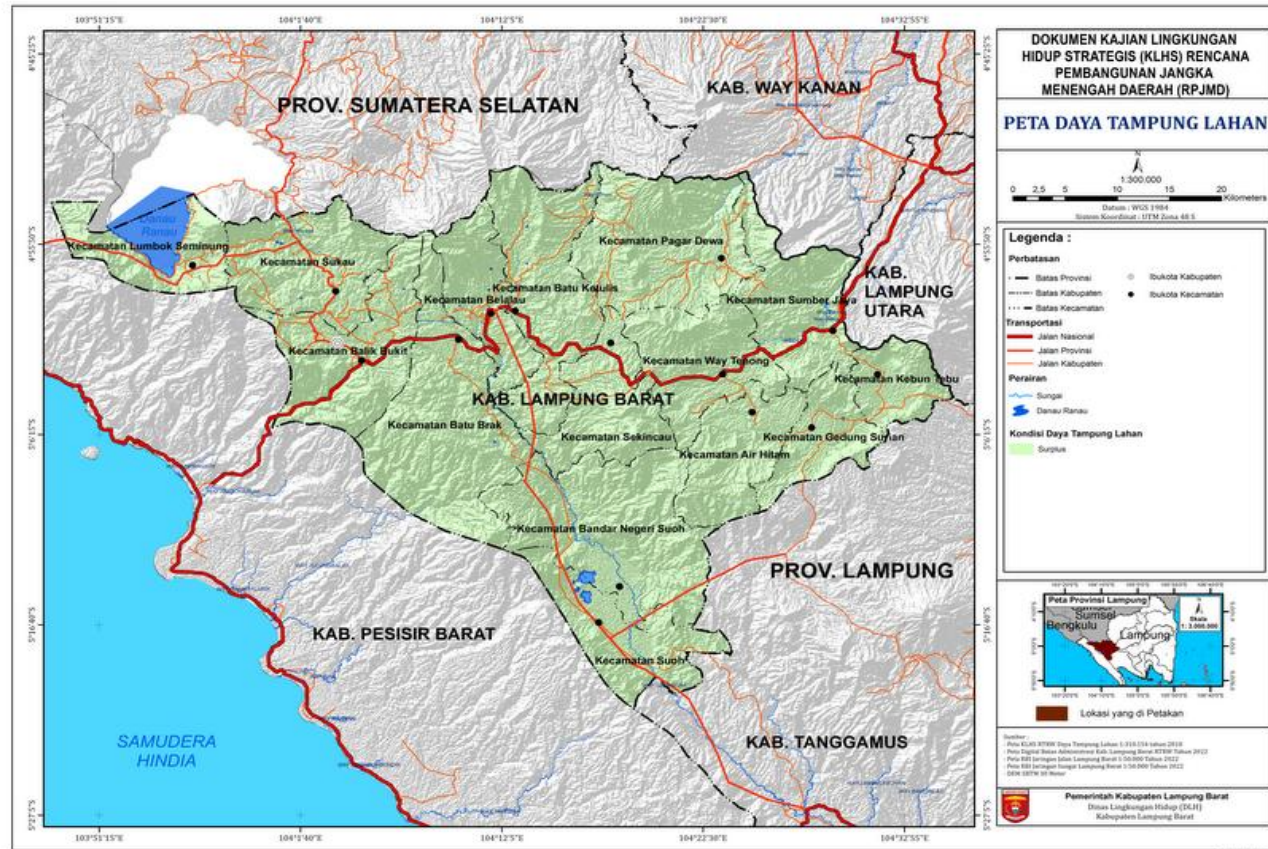
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja RTRW Kabupaten Lampung Barat, 2021

Tabel 2.15. Status dan Proyeksi Daya Tampung Lahan
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2029

No	Kecamatan	Tahun 2029			Rasio	Status Daya Tampung Lahan Permukiman
		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Ketersediaan Lahan Permukiman (Ha)	Kebutuhan Lahan Permukiman (Ha)		
1.	Balik Bukit	66662	130,94	60,00	2,18	SULUS
2.	Sukau	54320	1092,03	48,89	22,34	SULUS
3.	Lumbok Seminung	18089	299,68	16,28	18,41	SULUS
4.	Belalau	13283	440,95	11,95	36,89	SULUS
5.	Sekincau	24076	124,55	21,67	5,75	SULUS
6.	Suoh	8832	380,26	7,95	47,84	SULUS
7.	Batu Brak	2022	262,36	1,82	144,17	SULUS
8.	Pagar Dewa	11626	306,04	10,46	29,25	SULUS
9.	Batu Ketulis	9834	91,06	8,85	10,29	SULUS
10.	Bandar Neger Suoh	48279	774,01	43,45	17,81	SULUS
11.	Sumber Jaya	30463	211,89	27,42	7,73	SULUS
12.	Way Tenong	45821	675,67	41,24	16,38	SULUS
13.	Gedung Surian	27459	287,28	24,71	11,62	SULUS
14.	Kebun Tebu	24478	196,40	22,03	8,92	SULUS
15.	Air hitam	12495	422,98	11,25	37,61	SULUS
	Total	397739	5696,10	357,96	15,91	SULUS

Sumber : KLHS RTRW 2021, Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Lampung Barat Tahun 2024

Gambar 2.5. Peta Daya Tampung Lahan Kabupaten Lampung Barat



Sumber : KLHS RTRW Kab Lampung Barat 2021, Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

6. Daya Dukung Fungsi Lindung

Berdasarkan pedoman perhitungan daya dukung dan daya tampung (KLH, 2014), daya dukung fungsi lindung dapat diidentifikasi dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan, dan luasan wilayah keseluruhan. Adapun klasifikasi daya dukung fungsi lindung yang menjadi pedoman adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16. Klasifikasi Daya Dukung Fungsi Lindung

No.	Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai
1.	Sangat Rendah	0,0 - 0,2
2.	Rendah	0,2 - 0,4
3.	Sedang	0,4 - 0,6
4.	Baik	0,6 - 0,8
5.	Sangat Baik	0,8 - 1,0

Sumber : Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung LH, KLH 2014

Tabel di atas dapat digunakan sebagai pedoman penentuan nilai kualitas daya dukung fungsi lindung. Sehingga dapat dilakukannya analisis daya dukung fungsi lindung kabupaten Lampung Barat yang dijabarkan sebagai berikut :

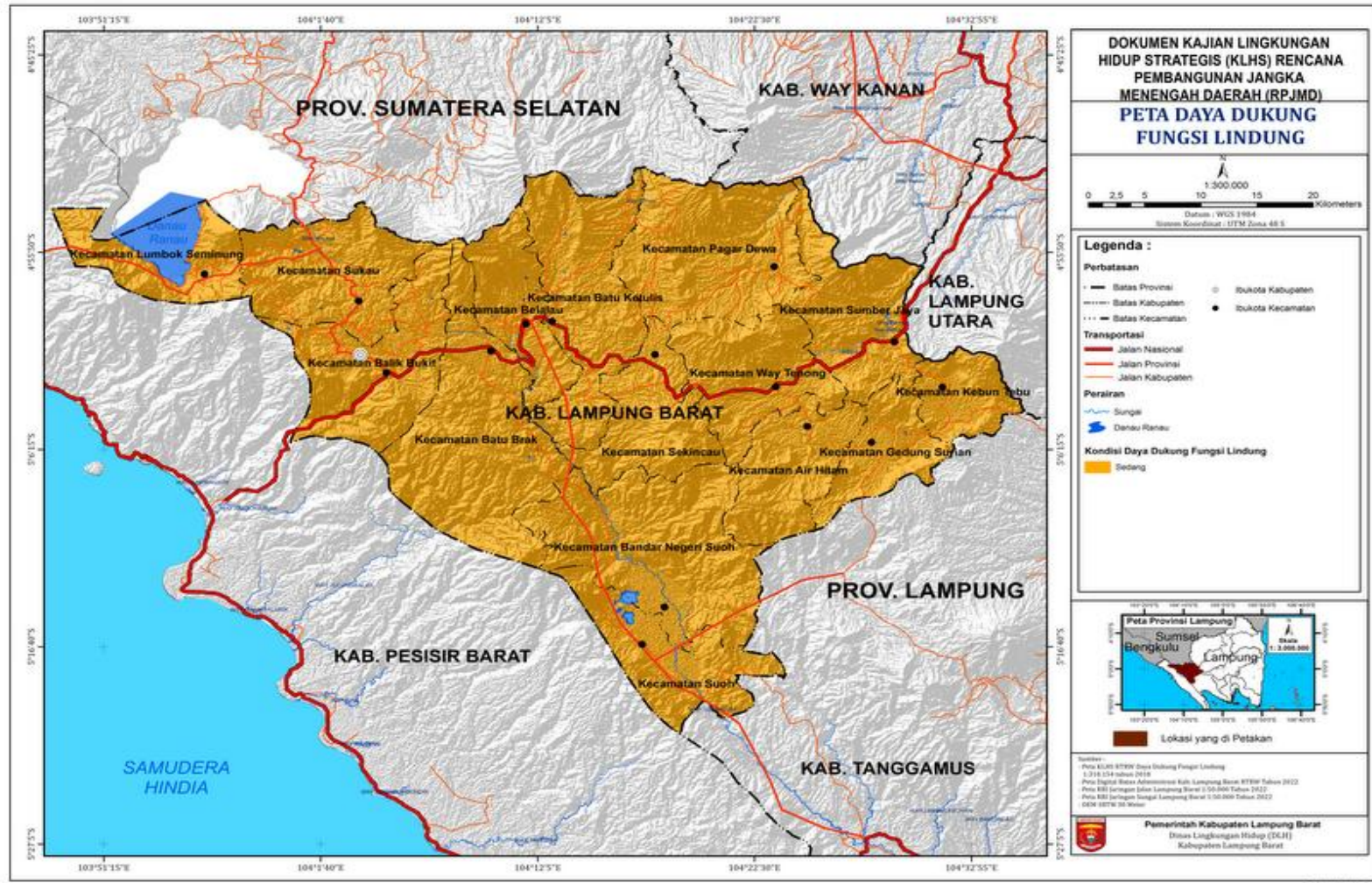
Tabel 2.17. Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung
Kabupaten Lampung Barat

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Koef x Luas
1.	Danau	3.094,58	0,98	3.032,69
2.	Hutan Rimba	39.851,51	1	3.9851,51
3.	Lahan Terbangun	10,23	0,18	1,84
4.	Lahan Tidak Terbangun	97,16	0,01	0,97
5.	Perkebunan/Ke bun	121.866,32	0,54	6.5807,81
6.	Permukiman	3.086,97	0,18	555,65
7.	Rawa	484,35	0,46	222,80
8.	Sawah	11.293,59	0,46	5.195,05
9.	Semak Belukar	25.326,92	0,28	7.091,54
10.	Sungai	456,98	0,98	447,84
11.	Tambak	0,66	0,98	0,65
12.	Tanah Kosong	22,98	0,01	0,23
13.	Tegalan/Ladang	6.096,71	0,21	1.280,31
	TOTAL	210,799,00	-	123.488,89

Sumber : Dinas PUPR Kab. Lampung Barat, 2021.

Berdasarkan Tabel di atas Daya Dukung Fungsi Lindung = $123.488,89/210.799,00 = 0,58$. Dari hasil perhitungan tersebut tingkat kualitas daya dukung fungsi lindung di Kabupaten Lampung Barat berada dalam kelas sedang. Mengingat Kabupaten Lampung Barat sebagai kawasan konservasi, maka daya dukung fungsi lindung Kabupaten Lampung Barat perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan indeks tutupan lahan menjadi lebih hijau, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.6. Peta Daya Dukung Fungsi Lindung Kabupaten Lampung Barat

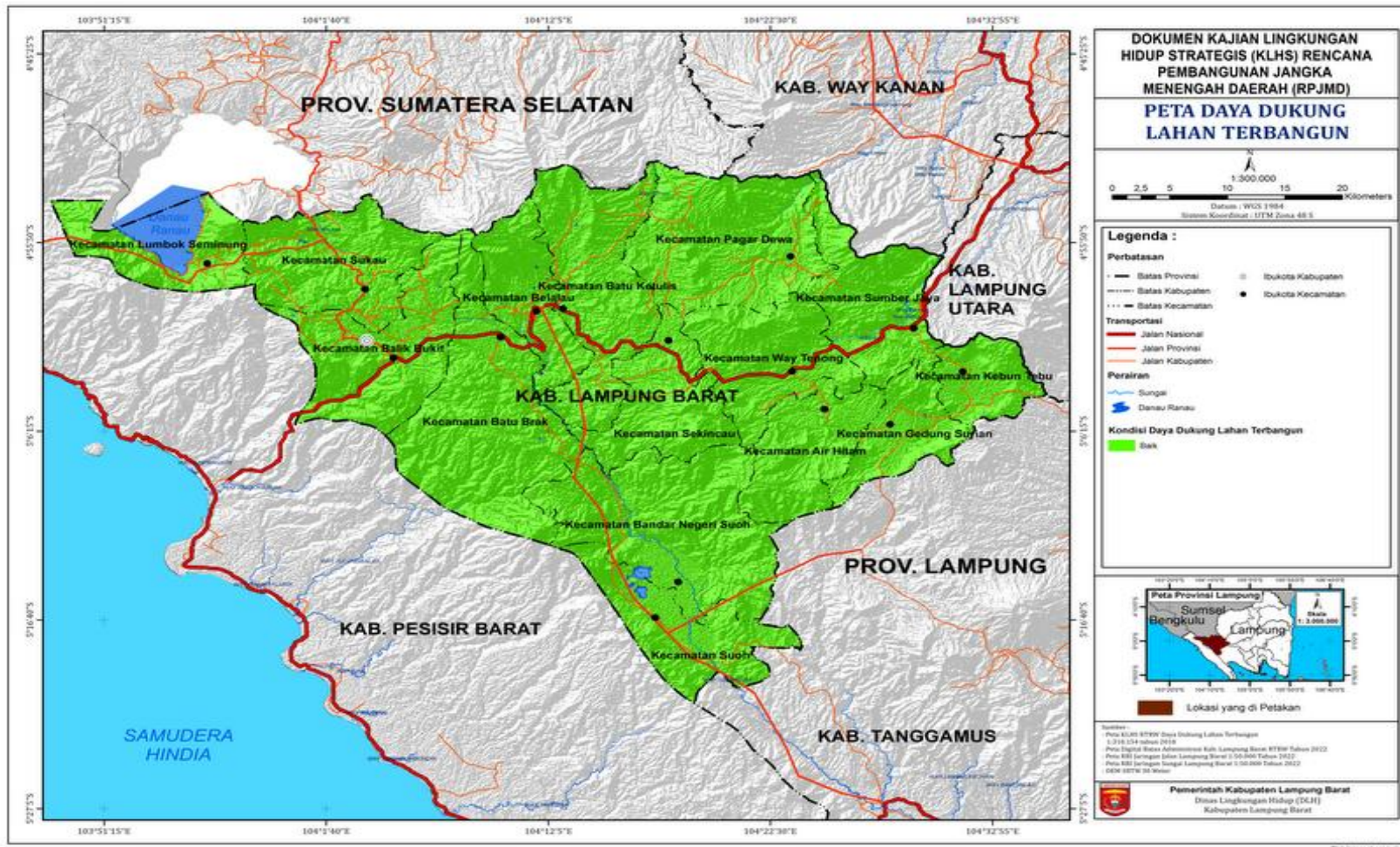


Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

7. Daya Dukung Lahan Terbangun

Daya dukung lahan terbangun adalah kapasitas atau kemampuan suatu area yang telah dikembangkan untuk menopang atau menahan beban penggunaan lahan yang telah ada. Ini mencakup kemampuan infrastruktur yang ada, seperti jalan, bangunan, fasilitas publik, dan layanan, untuk mendukung aktivitas manusia serta menjaga fungsi dan kegunaan lahan yang sudah ada. Daya dukung lahan terbangun penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan perkotaan dan pengembangan wilayah, karena hal ini memengaruhi ketersediaan dan kualitas layanan publik, kepadatan populasi, mobilitas, dan kualitas lingkungan di wilayah tersebut. Daya dukung lahan pada bangunan dapat diketahui dari perhitungan koefisien luas lahan terbangun, luas wilayah, serta luas lahan terbangun. Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, 30% lahan perkotaan wajib digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH), sedangkan untuk pedesaan menggunakan asumsi 50% (untuk kepentingan lahan pertanian dan fungsi lindung). Lahan terbangun di Kabupaten Lampung Barat berdasarkan tutupan lahannya terdiri dari lahan terbangun dan pemukiman dengan total luas 3.097,2 Ha. Koefisien luas lahan terbangun yang digunakan adalah 60% (rata-rata koefisien perdesaan dan perkotaan) maka daya dukung lahan terbangun Kabupaten Lampung setelah dilakukan perhitungan adalah 41,009 yaang berarti bahwa daya dukung lahan terbangun dapat dikategorikan baik yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.7. Peta Daya Dukung Lahan Terbangun Kabupaten Lampung Barat



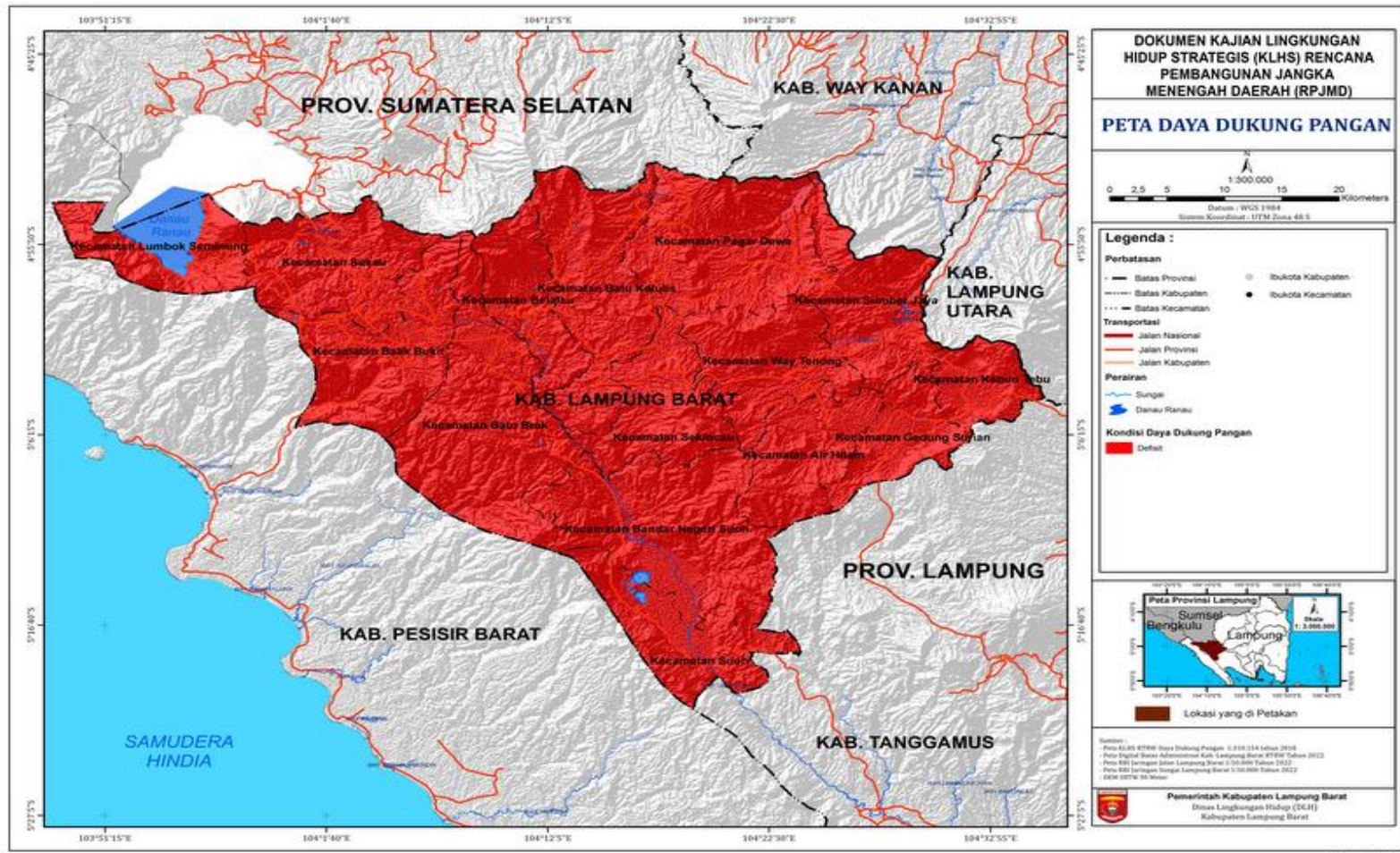
Sumber : Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

8. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merujuk pada kapasitas suatu wilayah untuk menyediakan dan menopang kebutuhan pangan bagi populasi yang tinggal di dalamnya. Ini mencakup sejumlah faktor, termasuk produktivitas pertanian, ketersediaan lahan yang cocok untuk pertanian, akses terhadap air, kondisi iklim, infrastruktur, teknologi pertanian, dan faktor sosial-ekonomi seperti distribusi pendapatan dan keamanan pangan. Evaluasi daya dukung pangan seringkali melibatkan analisis terhadap kemampuan suatu wilayah untuk memproduksi pangan dengan cara yang berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan bagi penduduknya, serta mengakomodasi pertumbuhan populasi dan perubahan dalam pola konsumsi pangan. Ini merupakan pertimbangan penting dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pertanian, serta dalam upaya memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas bagi masyarakat. Perhitungan daya dukung pangan menggunakan metode *Carrying Capacity Ratio (CCR)*.

Analisis CCR merupakan salah satu alat analisis dalam perencanaan pembangunan pertanian daerah yang dapat menggambarkan keadaan daya dukung wilayah pertanian daerah. artinya berdasarkan jumlah lahan, daerah ini masih memiliki keseimbangan antara kemampuan lahan dan jumlah penduduk, *Carrying Capacity Ratio* Tanaman Pangan sebesar 0,88. Berdasarkan hasil perhitungan diatas, maka dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Lampung Barat sudah tidak mungkin lagi dilakukan pembangunan yang bersifat ekspansif dan eksploratif lahan. Tersaji peta daya dukung pangan pada gambar berikut:

Gambar 2.8. Peta Daya Dukung Pangan Kabupaten Lampung Barat



Sumber : KLHS RTRW Lampung Barat 2021, Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJMD Kabupaten Lampung Barat, 2024

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Indeks Ketahanan Pangan

Tabel 2.18. Indeks Ketahanan Pangan

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Ketahanan Pangan	74,02%	70,80%	74,34%	75,39%	76,18%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Ketahanan Pangan berada di angka 74,02%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 70,80%. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan distribusi pangan, dampak pandemi, atau perubahan dalam kebijakan pangan yang berpengaruh terhadap ketersediaan dan akses pangan bagi masyarakat. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2021, indeks ini kembali meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, Indeks Ketahanan Pangan naik menjadi 74,34%, melebihi angka tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan dalam sektor pangan, yang bisa jadi disebabkan oleh perbaikan dalam sistem distribusi, peningkatan produksi pangan, atau kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketahanan pangan.

Pada tahun 2023, indeks ini terus meningkat menjadi 75,39%, menunjukkan tren positif dalam penguatan ketahanan pangan. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti inovasi dalam teknologi pertanian, peningkatan produksi pangan lokal, serta stabilitas dalam kebijakan ekonomi dan sosial yang berpengaruh terhadap sektor pangan.

Tahun 2024 mencatat peningkatan lebih lanjut dengan Indeks Ketahanan Pangan mencapai 76,18%. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam periode lima tahun tersebut, mencerminkan keberhasilan dalam berbagai upaya peningkatan ketahanan pangan. Jika tren ini terus berlanjut, maka kondisi pangan daerah dapat semakin stabil dan berkelanjutan di masa mendatang. Namun, tetap perlu dilakukan upaya untuk menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan agar dapat menghadapi potensi tantangan di masa depan, seperti perubahan iklim dan dinamika ekonomi global.

Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Tabel 2.19. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	10,98%	8,63%	12,82%	8,5%	11,17%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Tabel 2.20. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71.94	65.99	68.31	70.55	73.09
2	IKA		65.14	58.34	66.06	69
3	IKU		84.73	83.84	90.52	93.52
4	IKL		40.42	41.63	40.33	42.32

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada di angka 71,94. Namun, pada tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 65,99. Setelah mengalami penurunan tajam pada tahun 2021, indeks mulai mengalami pemulihan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, indeks meningkat menjadi 68,31, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan, penerapan kebijakan yang lebih ketat, serta program rehabilitasi lingkungan bisa menjadi faktor yang mendukung pemulihan ini.

Pada tahun 2023, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terus mengalami peningkatan menjadi 70,55. Tren positif ini mencerminkan keberlanjutan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, seperti pengurangan emisi karbon, peningkatan ruang hijau, serta penerapan teknologi ramah lingkungan dalam berbagai sektor.

Pada tahun 2024, indeks mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 73,09. Peningkatan ini bisa menjadi indikasi bahwa berbagai kebijakan lingkungan mulai menunjukkan hasil yang lebih signifikan. Keberlanjutan tren positif ini perlu dijaga dengan terus meningkatkan kesadaran lingkungan, memperketat regulasi terkait

pencemaran, serta memperkuat program restorasi ekosistem agar kualitas lingkungan tetap terjaga dan terus membaik di masa depan.

Tabel 2.21. Kinerja Pengelolaan Persampahan dan GRK

No	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	5.316,58	4.837,46	4.215,88	15.467,26	15.034,04
2	Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	1.214	1.228	1.240	1.252	1.265
3	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2021 mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya Indeks Kualitas Lahan (IKL) hal tersebut disebabkan oleh pengurangan jumlah kategori tutupan lahan. Pada tahun 2022- 2024 Indeks Kualitas Lingkungan Kabupaten Lampung Barat terus mengalami peningkatan.

Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada Tahun 2020 Sampai dengan 2024 Jumlah Sampah terkelola di fasilitas Pengelolaan Sampah baru terkelola dari 11 % sampai 34% dilaporkan di Neraca Pengelolaan sampah setiap tahun.

Jumlah Rumah Tangga terlayani skala kabupaten Lampung Barat dari 15 Kecamatan Rumah Tangga Terlayani 1 Kecamatan yaitu Skala Kota Liwa.

Data Penurunan Intesitas Emisi GRK tidak ada dikarenakan Dinas Lingkungan belum melakukan pelaporan penurunan intensitas emisi GRK hingga tahun 2024.

Tabel 2.22. Data TPA dan TPST

No	Uraian	Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
1	TPA	35,49 Ton/Hari	35,85 Ton/Hari	36,20 Ton/Hari	36,57 Ton/Hari	36,93 Ton/Hari
2	TPST Regional	0,672 Ton/Hari	0,678 Ton/Hari	0,685 Ton/Hari	0,692 Ton/Hari	0,699 Ton/Hari

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025

Tabel 2.23. Akses Sanitasi

No	Uraian	Realisasi 2024
1	Sanitasi Aman	0,35%
2	Sanitasi Layak	95,75%
3	Sanitasi Belum Layak	3,90%

Sumber : Dinas PU PR tahun 2025

2.1.1.6 Resilensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Lampung Barat menjadi salah satu daerah yang rawan akan bencana, sehingga perlu melakukan peningkatan kesiapsiagaan bencana. Salah satu yang dapat dilakukan sebagai upaya penanganan bencana dengan melakukan perencanaan penanggulangan yang dimulai dengan menyusun rencana penanggulangan bencana. Penyusunan rencana penanggulangan bencana berdasar pada Kajian Risiko Bencana agar mendapatkan hasil yang lebih fokus dan terarah. Penentuan tingkat risiko bencana dalam Kajian Risiko Bencana (KRB) dilakukan dengan menganalisis tiga komponen yaitu potensi bahaya, kerentanan, dan kapasitas daerah. Potensi bahaya menunjukkan jenis-jenis bahaya yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat baik yang pernah terjadi maupun berpeluang akan terjadi. Kerentanan wilayah menunjukkan potensi kehilangan dan/atau kerugian yang akan dialami jika bahaya terjadi seperti jumlah penduduk terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Komponen ketiga yaitu kapasitas daerah menunjukkan kemampuan lembaga pemerintah dan kesiapan masyarakat di Kabupaten Lampung Barat dalam kaitannya dengan upaya pengurangan dan penanggulangan risiko bencana. Hasil pengkajian Risiko Bencana disajikan dalam bentuk dokumen kajian yang dilengkapi lampiran terpisah yaitu Album Peta Risiko Bencana dan Matriks Kajian Risiko Bencana Kabupaten Lampung Barat. Kajian Risiko Bencana disusun melalui pendekatan dan metodologi standar mengikuti pedoman yang tertera pada PERKA BNPB No 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Melalui Kajian Risiko Bencana besarnya risiko masing-masing bahaya di Kabupaten Lampung Barat dapat diketahui. Mengacu pada hasil analisis, diketahui 8 (delapan) jenis potensi bahaya yang ada di Kabupaten Lampung Barat meliputi banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, dan gunung api. Delapan bahaya tersebut

dihitung nilai kerentanan dan kapasitasnya sehingga menghasilkan risiko. Hasil analisis risiko yang dilakukan menunjukkan, sebagian besar bahaya memiliki risiko Tinggi. Pengambilan kelas risiko di tingkat kecamatan didasarkan pada kelas risiko tertinggi di tingkat desa. Kelas risiko tinggi di kecamatan tidak menunjukkan bahwa seluruh kecamatan berisiko tinggi melainkan terdapat minimal satu desa yang berisiko tinggi di kecamatan tersebut. Berikut deskripsi singkat risiko bencana tinggi di Kabupaten Lampung Barat.

1. Risiko Banjir, Kabupaten Lampung Barat memiliki 15 kecamatan yang memiliki risiko bencana banjir. Adapun 3 kecamatan yang memiliki risiko bencana banjir tertinggi yaitu Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Suoh, dan Kebun Tebu. Analisis luasan pekon yang memiliki potensi risiko terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Bandar Agung (896,67 ha), Pekon Srimulyo (696,51 ha), dan Pekon Gunung Ratu (609,30 ha). Kecamatan ini memiliki kelas risiko sedang dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya yaitu Kecamatan Suoh dengan luasan terbesar yaitu Pekon Sumber Agung (400,05 ha), dan Pekon Tugu Ratu (359,19ha). Kecamatan yang memiliki luasan terbesar lainnya yaitu Kecamatan Kebun Tebu. Pada kecamatan ini, pekon yang memiliki luasan terbesar yaitu Pekon Muara Jaya II (327,87ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Kebun Tebu termasuk dalam kelas sedang, dengan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Sehingga dihasilkan potensi risiko tiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat memiliki kelas sedang. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat memiliki kemungkinan terjadinya bencana banjir sehingga perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak buruk banjir tersebut.

2. Risiko Banjir Bandang, analisis potensi risiko terbesar pada bencana banjir bandang terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dan Kecamatan Belalau. Pekon yang memiliki potensi terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Suoh (321,14ha), Pekon Bumi Hantatai (320,87 ha), dan Pekon Ringin Jaya (199,87 ha). Kemudian pekon yang memiliki risiko potensi bahaya banjir bandang pada Kecamatan Belalau yaitu Pekon Hujung (354,63 ha) dan Pekon Suka Makmur (251,43 ha). Kecamatan-kecamatan tersebut memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, kelas kapasitas sedang, dan kelas risiko sedang. Walaupun kecamatan tersebut memiliki kelas risiko sedang, namun tetap memiliki kemungkinan terjadinya bencana banjir bandang. Sehingga perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak buruk banjir bandang tersebut. Sehingga, Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu dengan Peningkatan koordinasi multisektoral terkait penanganan Konservasi lahan dan air pada hulu DAS, Program pembersihan sungai dari sampah ataupun pengendapan lumpur yang

menyebabkan penyempitan alur sungai, serta penguatan aturan tentang perubahan penggunaan lahan berdasarkan fungsi lahannya.

3. Risiko Cuaca Ekstrim, kelas risiko cuaca ekstrim di Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam kelas tinggi. Kecamatan dengan potensi luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh pada kategori kelas tinggi dengan luasan total sebesar 37.167,86 ha. Pekon-pekon pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang terbesar yaitu Pekon Bumi Hantatai (17.667,64 ha), Pekon Bandar Agung (6.980,18 ha), dan Pekon Suoh (5.018,15 ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas rendah. Sehingga dihasilkan kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh pada kelas tinggi. Pekon-pekon yang terdapat pada kecamatan tersebut memiliki potensi terjadinya bencana cuaca ekstrim. Sehingga perlu diwaspadai dan memerlukan tindakan pencegahan dan penanganan darurat untuk mengurangi dampak buruk cuaca ekstrim tersebut. Cuaca ekstrim yang terjadi di Kabupaten Lampung Barat berupa angin kencang, Dampak dari bencana ini dapat merusak lahan pertanian warga sekitar. Salah satu rekomendasi mitigasi yang dapat dilakukan yaitu penyusunan standar struktur bangunan yang dapat menahan angin di wilayah rawan angin kencang dan peningkatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin kencang.

4. Risiko Gempa Bumi, kelas risiko gempa bumi di Kabupaten Lampung Barat termasuk dalam kelas tinggi. Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luasan total sebesar 37.698,12 ha dan Kecamatan Pagar Dewa dengan luasan total 21.296,92 ha. Analisis luasan Pekon terbesar untuk potensi risiko gempa bumi pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Bumi Hantatai (17.725,48ha), Pekon Bandar Agung (7.088,25 ha) dan Pekon Suoh (5.137,05 ha). Kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh tergolong tinggi, hal tersebut dikarenakan memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Selanjutnya analisis pekon terbesar terdapat pada Kecamatan Pagar Dewa yaitu terdapat pada Pekon Basungan (3.969,50 ha), Sidomulyo (3.580,48 ha), dan Batu Api (2.680,34 ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Pagar Dewa termasuk dalam kelas risiko sedang, dikarenakan memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat masih memiliki potensi terdampak oleh gempa bumi, karena konsekuensi dari bencana gempa bumi yang dapat merambah keseluruhan bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi gempa bumi yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi.

5. Risiko Kebakaran Hutan dan Lahan, di Kabupaten Lampung Barat Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Pagar Dewa, dan Batu Ketulis. Analisis berdasarkan luasan

pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh yaitu Pekon Bumi Hantatai (17.721,72 ha), Pekon Bandar Agung (6.989,76 ha), Pekon Suoh (5.027,04 ha). Analisis kelas risiko pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas risiko kebakaran hutan dan lahan kelas tinggi. Hal tersebut dikarenakan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Pagar Dewa terdapat pada Pekon Basungan (3.952,35 ha) dan Pekon Sidomulyo (3.573,45 ha). Kelas risiko kebakaran hutan dan lahan pada Kecamatan Pagar Dewa memiliki kelas sedang, hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis untuk luasan pekon terbesar pada Kecamatan Batu Ketulis terdapat pada Pekon Bakhu (3.487,41 ha) dan Pekon Sumber Rejo (3.116,07 ha). Pada Kecamatan Batu Ketulis memiliki kelas risiko tinggi dikarenakan pada wilayah ini memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas rendah. Sehingga, seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi terdampak oleh kebakaran hutan dan lahan, karena konsekuensi dari bencana kebakaran hutan dan lahan yang dapat merambat ke seluruh bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi. Data ini memberikan gambaran tentang keparahan risiko kebakaran hutan dan lahan di setiap kecamatan, dengan fokus pada Pekon-Pekon yang memiliki luas risiko tertinggi. Langkah-langkah mitigasi dan pengelolaan risiko perlu ditingkatkan, terutama di Pekon-Pekon yang rentan terhadap kebakaran hutan dan lahan.

6. Risiko Kekeringan, hasil analisis risiko luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luasan sebesar 38.034,10 ha, Kecamatan Pagar Dewa dengan luasan total sebesar 18.770,05 ha dan Kecamatan Balik Bukit dengan luasan total risiko kekeringan sebesar 17.695,05 ha. Analisis luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdapat pada Pekon Bumi Hantatai (17.888,05 ha), Pekon Bandar Agung (7.153,02 ha) dan Pekon Suoh (5.176,01 ha). Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas risiko sedang, hal tersebut dikarenakan pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya sedang, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Pagar Dewa terdapat pada Pekon Basungan (4.022,01 ha) dan Pekon Sidomulyo (3.594,01 ha). Kecamatan Pagar Dewa memiliki kelas risiko sedang dikarenakan, pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya sedang, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Analisis luasan pekon terbesar selanjutnya pada Kecamatan Balik Bukit yaitu pada Pekon Kubu Perahu (4.974,01 ha). Kecamatan ini memiliki kelas risiko tinggi, dikarenakan memiliki kelas bahaya sedang, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Kekeringan dapat menyebabkan dampak serius terhadap sumber daya air, pertanian, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk mengatasi

risiko tersebut, perlu dilakukan upaya mitigasi seperti pengembangan sumber daya air alternatif, peningkatan efisiensi penggunaan air pertanian, dan pembangunan infrastruktur penampungan air hujan dan sebagainya. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi kekeringan yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian dan ekonomi dan kerusakan lingkungan.

7. Risiko Tanah Longsor, kecamatan yang memiliki luas risiko bencana tanah longsorterbesar yaitu Kecamatan Bandar Negeri Suoh dengan luas sebesar 35.825,20 ha, Kecamatan Pagar Dewa dengan luas sebesar 22.354,85 ha, dan Kecamatan Batu Ketulis dengan luas sebesar 15.804,70 ha. Analisis luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdapat pada Pekon Bumi Hantatai (17.156,62 ha), Pekon Bandar Agung (6.730,76 ha) dan Pekon Suoh (4.886,54 ha). Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas risiko tinggi, hal tersebut dikarenakan pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas rendah. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Pagar Dewa terdapat pada Pekon Basungan (3.784,33 ha) dan Pekon Sidomulyo (3.490,86 ha). Kecamatan Pagar Dewa memiliki kelas risiko tinggi dikarenakan pada kecamatan ini memiliki kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi, dan kelas kapasitas sedang. Meskipun demikian, seluruh wilayah di Kabupaten Lampung Barat masih memiliki potensi terdampak oleh tanah longsor, karena konsekuensi dari bencana tanah longsor yang dapat merambah ke seluruh bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi tanah longsor yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi.

8. Risiko Gunung Api, di Kabupaten Lampung Barat Kecamatan dengan luasan terbesar terdapat pada Kecamatan Sekincau dengan luas sebesar 3.135,50 ha dan Bandar Negeri Suoh dengan luas sebesar 2.175,80 ha. Analisis berdasarkan luasan pekon terbesar pada Kecamatan Sekincau yaitu Pekon Tigajaya dengan luas sebesar 3.010,37 ha. Analisis kelas risiko pada Kecamatan Sekincau memiliki potensi kelas risiko gunung api pada kelas tinggi. Hal tersebut dikarenakan kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas sedang. Analisis berikutnya, luasan pekon terbesar pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh terdapat pada Pekon Pekon Suoh dengan luas sebesar 1.665,88 ha. Kelas risiko gunung api pada Kecamatan Bandar Negeri Suoh memiliki kelas rendah, hal tersebut dikarenakan kecamatan tersebut memiliki kelas bahaya rendah, kelas kerentanan sedang, dan kelas kapasitas rendah. Beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi terdampak oleh gunung api, karena konsekuensi dari bencana gunungapi yang dapat merambah ke seluruh bagian wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pengalokasian sumber daya yang memadai dan langkah-langkah mitigasi

gunung api yang tepat untuk melindungi penduduk dan aset daerah dari kerusakan yang dapat menyebabkan kerugian fisik dan ekonomi.

Ketahanan daerah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kajian kapasitas menunjukkan bahwa dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,39 yang berarti kapasitas daerah pada kelas sedang.

Tabel 2.24. Indeks Kapasitas daerah di Kabupaten Lampung Barat

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,64	0,39	Sedang
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,20		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,50		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,46		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,33		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,35		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,42		

Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

Secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Lampung Barat dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas rendah dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,39. Dalam penentuan tingkat kapasitas, indeks ketahanan daerah mengalami penyesuaian atau transformasi. Hasil transformasi nilai indeks ketahanan daerah Kabupaten Lampung Barat yaitu sebesar 0,39. Hasil transformasi nilai IKD tersebut selanjutnya digunakan secara langsung pada proses penggabungan secara spasial antara IKD dengan IKM, tanpa perlu membuat data spasialnya terlebih dahulu. Kelas tersebut ditentukan berdasarkan pencapaian daerah dalam penanggulangan bencana. Pada dasarnya upaya penanggulangan bencana telah mulai dilakukan di Kabupaten Lampung Barat untuk 8 (delapan) kegiatan prioritas penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana tersebut masih membutuhkan peningkatan, sehingga sesuai dengan kualitas standar dan memberikan manfaat secara optimal di Kabupaten Lampung Barat.

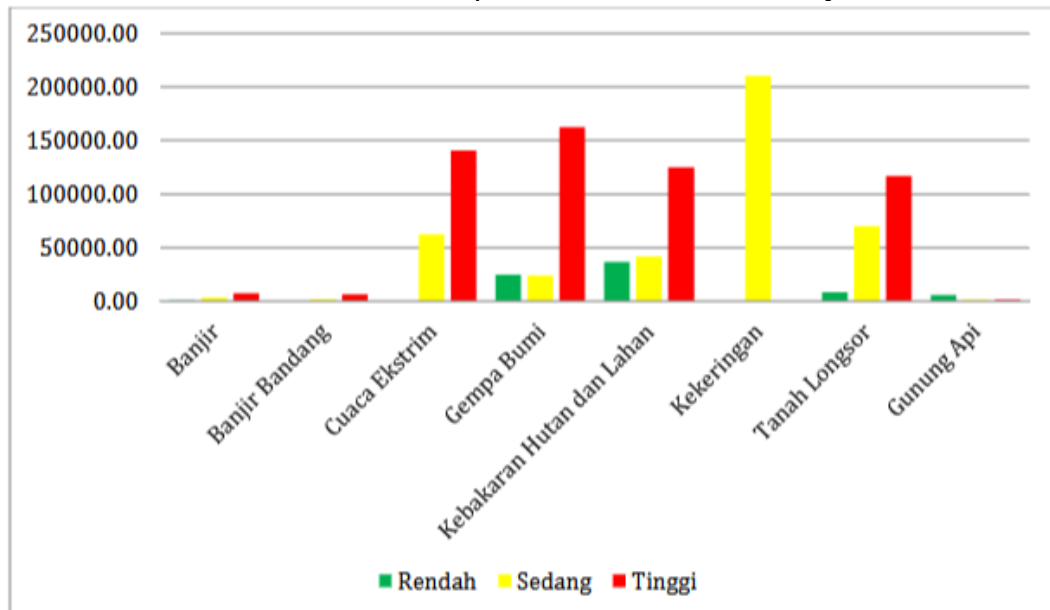
Tabel 2.25. Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Lampung Barat

No	Kecamatan	Bahaya (ha)				
		Luas Bahaya			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1	Banjir	452,88	3.426,57	6.938,19	10.817,64	Tinggi
2	Banjir Bandang	0,00	1.606,68	6.213,51	7.820,19	Tinggi
3	Cuaca Ekstrim	0,00	62.341,56	140.883,57	203.225,13	Tinggi
4	Gempa Bumi	24.381,04	23.991,05	162.426,91	210.799,00	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	36.690,63	42.013,53	124.812,62	203.516,78	Tinggi
6	Kekeringan	0,00	210.799,00	0,00	210.799,00	Sedang
7	Tanah Longsor	8.467,02	70.285,86	116.844,66	195.597,54	Tinggi
8	Gunung Api	5.726,88	1.414,52	1.291,32	8.432,72	Tinggi

Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat bahwa bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, tanah longsor, serta kebakaran hutan dan lahan berada pada kelas bahaya yang tergolong Tinggi. Sedangkan untuk bahaya kekeringan berada pada kelas bahaya yang tergolong sedang. Rekapitulasi tiap bahaya dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :

Gambar 2.9. Rekapitulasi Luas Kelas Bahaya



Sumber : dokumen Kajian Risiko Bencana tahun 2024

Rekapitulasi bahaya bencana Kabupaten Lampung Barat berada pada kelas tinggi. Data menunjukkan bahwa gempa bumi dan kekeringan memiliki kelas bahaya tinggi dan sedang dengan total luas mencapai 210.799,00 ha. Banjir memiliki luas bahaya tinggi sebesar 10.817,64 ha dengan kelas bahaya tinggi. Banjir bandang memiliki total luas sebesar 7.820,19 ha dengan kelas bahaya tinggi. Selanjutnya cuaca ekstrim dan kebakaran hutan dan lahan memiliki luas masing-masing sebesar

203.225,13 ha dan 203.516,78 ha yang berada pada kelas bahaya tinggi. Tanah longsor dan gunung api juga berada dalam kategori kelas bahaya tinggi dengan luas masing-masing sebesar 195.597,54 ha dan 8.432,72 ha. Rekapitulasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang berbagai risiko bencana yang dihadapi Kabupaten Lampung Barat, dengan bahaya-bahaya yang berada pada kelas tinggi untuk menjadi fokus utama yang membutuhkan perhatian mitigasi dan penanganan lebih lanjut.

Indikator Resiko Bencana

Indikator untuk mengukur tingkat resiko bencana di suatu wilayah disajikan atau ditunjukkan dengan ukuran Indek Resiko Bencana. Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan terhadap 3 komponen, yaitu bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.

Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan yang rentan terpapar bencana. Komponen kapasitas terdiri dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan. Berikut data indeks resiko bencana Kabupaten Lampung Barat tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.26. Indeks Risiko Bencana

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	179.29	163.85	178.48	176,61	176,28

Sumber : BPBD Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Risiko Bencana tercatat sebesar 179,29. Angka ini menunjukkan tingkat risiko bencana yang cukup tinggi, yang bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kerentanan wilayah terhadap bencana alam, perubahan iklim, serta kesiapan infrastruktur dan mitigasi bencana yang masih perlu ditingkatkan.

Pada tahun 2021, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 163,85. Penurunan ini bisa diartikan sebagai peningkatan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana atau berkurangnya kejadian bencana besar dalam tahun tersebut. Langkah-langkah mitigasi seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini, serta edukasi kepada masyarakat mungkin telah berkontribusi dalam menurunkan risiko bencana.

Namun, pada tahun 2022, Indeks Risiko Bencana kembali meningkat menjadi 178,48, hampir menyamai angka tahun 2020. Peningkatan ini bisa disebabkan oleh meningkatnya frekuensi atau intensitas bencana

alam seperti banjir, gempa bumi, atau kebakaran hutan. Selain itu, faktor seperti degradasi lingkungan dan urbanisasi yang kurang terkendali juga bisa meningkatkan kerentanan suatu wilayah terhadap bencana.

Pada tahun 2023, indeks sedikit menurun menjadi 176,61, menunjukkan adanya upaya mitigasi yang mulai berdampak meskipun belum terlalu signifikan. Penurunan yang relatif kecil ini menunjukkan bahwa tantangan dalam mengurangi risiko bencana masih cukup besar, dan diperlukan langkah-langkah yang lebih strategis dan berkelanjutan.

Pada tahun 2024, indeks kembali mengalami sedikit penurunan menjadi 176,28. Meskipun penurunannya kecil, angka ini menunjukkan stabilisasi risiko bencana di sekitar level yang masih cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam memperkuat mitigasi bencana, meningkatkan ketahanan infrastruktur, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana agar risiko dapat terus ditekan di masa depan.

Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan perubahan iklim adalah konsep yang penting dalam memahami bagaimana masyarakat dan ekosistem dapat berinteraksi dengan perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca yang terjadi secara alami atau disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pemanasan global. Perubahan iklim dapat menyebabkan dampak terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi.

Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan (SIDIK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut:

Tabel 2.27. Tingkat Kerentanan Perubahan Iklim

No	Kecamatan	IKA	IKS	Tingkat Kerentanan perubahan iklim
1.	Balik Bukit	6,6	6	Rentan
2.	Sukau	5,18	5,08	Rentan
3.	Lumbok Seminung	5,65	5,53	Rentan
4.	Belalau	3,96	5,78	Cukup Rentan
5.	Sekincau	2,73	2,69	Tidak Rentan
6.	Suoh	3,46	3,33	Cukup Rentan
7.	Batubrak	5,44	6,24	Rentan
8.	Pagardewa	4,72	5,46	Cukup Rentan
9.	Batuketulis	4,9	6,21	Cukup Rentan
10.	Bandar Negeri Suoh	4,98	5,71	Cukup Rentan
11.	Sumber Jaya	3,19	3,19	Tidak Rentan
12.	Way Tenong	4,46	4,3	Cukup Rentan
13.	Gedung Surian	2,55	2,54	Tidak Rentan
14.	Kebun tebu	5,47	5,26	Rentan
15.	Air Hitam	5,71	5,17	Rentan

Sumber : SIDIK, 2021

Indeks Ketahanan Daerah

Tabel 2.28. Indeks Ketahanan Daerah

No	Uraian	IKD 2023	Kelas IKD 2023	IKD 2024	Kelas IKD 2024
1	Indeks Ketahanan Pangan	0,37	Sedang	0,39	Sedang

Sumber : BNPB, Tahun 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan, Indeks Ketahanan Pangan (IKD) mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023, nilai IKD tercatat sebesar 0,37 dan tergolong dalam kelas "Sedang". Sementara itu, pada tahun 2024, nilai IKD naik menjadi 0,39 namun masih berada dalam kategori kelas yang sama, yaitu "Sedang". Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam indeks, peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk mengubah klasifikasi ketahanan pangan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai IKD agar dapat mencapai kelas yang lebih tinggi, yang mencerminkan ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

2.1.1.7 Demografi

Kependudukan saat ini erat kaitannya dengan proses penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan, hal ini dikarenakan salah satu keberhasilan pembangunan akan tercermin melalui kondisi kependudukan yang berkaitan dengan tingkat kesejahteraan penduduk.

Secara lengkap jumlah penduduk dan kepadatan penduduk per kecamatan tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.29. Jumlah Penduduk Tahun 2024 Per Kecamatan

Kecamatan <i>District</i>	Jumlah Penduduk (Jiwa) <i>Population (people)</i>	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2024 (%) <i>Annual Population Growth Rate 2020–2024 (%)</i>
(1)	(2)	(3)
Balik Bukit	43.925	1,36
Sukau	26.200	1,37
Lumbok Seminung	8.865	2,57
Belalau	12.705	0,41
Sekincau	19.388	0,64
Suoh	18.925	0,57
Batu Brak	15.515	0,84
Pagar Dewa	17.117	0,41
Batu Ketulis	13.837	0,80
Bandar Negeri Suoh	26.029	1,41
Sumber Jaya	24.386	0,40
Way Tenong	35.401	0,43
Gedung Surian	17.372	1,14
Kebun Tebu	21.526	1,22
Air Hitam	12.565	2,00
Lampung Barat	313.756	0,95

Sumber data : BPS tahun 2025

Tabel 2.30. Rasio Penduduk

Kecamatan <i>District</i>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk <i>Population Sex Ratio</i>
(1)	(6)
Balik Bukit	105,64
Sukau	106,72
Lumbok Seminung	113,61
Belalau	107,43
Sekincau	107,80
Suoh	110,25
Batu Brak	107,61
Pagar Dewa	113,46
Batu Ketulis	110,16
Bandar Negeri Suoh	112,19
Sumber Jaya	107,12
Way Tenong	104,26
Gedung Surian	106,44
Kebun Tebu	104,13
Air Hitam	110,54
Lampung Barat	107,76

Sumber : BPS tahun 2025

Tabel 2.31. Jumlah Penduduk Tahun 2024 Menurut Umur

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Sex		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	10.618	10.042	20.660
5–9	13.972	13.317	27.289
10–14	14.426	13.732	28.158
15–19	13.942	13.195	27.137
20–24	12.481	12.012	24.493
25–29	12.170	11.263	23.433
30–34	11.746	11.522	23.268
35–39	13.213	12.666	25.879
40–44	12.910	11.836	24.746
45–49	11.734	10.791	22.525
50–54	9.708	8.856	18.564
55–59	8.317	7.426	15.743
60–64	6.328	5.550	11.878
65–69	4.703	3.455	8.158
70–74	3.172	2.456	5.628
75+	3.300	2.897	6.197
Lampung Barat	162.740	151.016	313.756

Sumber : BPS tahun 2025

Tabel 2.32. Proyeksi jumlah penduduk

No	Uraian	Proyeksi 2025	Proyeksi 2026	Proyeksi 2027	Proyeksi 2028	Proyeksi 2029	Proyeksi 2030
1	Jumlah Penduduk	319,301	322589	325770	328860	331850	334742
2	Rasio Ketergantungan	47.40	47.65	47.91	48.20	48.49	48.79

Sumber : BPS, tahun 2024

Kawasan Berfungsi Lindung

Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kebijakan Penataan Ruang bagi kawasan lindung di Lampung Barat adalah dengan memperkuat dan memulihkan fungsi Kawasan Lindung; dan mengembangkan berbagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis konservasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pasal 24 dari Perda Lampung Barat Nomor 5 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Tahun 2023-2043, total luas kawasan berfungsi lindung $\pm$ 106.560 Ha atau sekitar 50,5% dari wilayah administrasi Lampung Barat, yang terdiri dari:

- (1) **Badan air** berupa danau, telaga, embung, dan sungai, dengan luas mencapai $\pm$ 3.194 Ha yang tersebar di 11 Kecamatan. Ekosistem perairan danau Ranau yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung merupakan badan air terluas yang dimiliki Lampung Barat, yakni $\pm$ 2.792,2 Ha.
- (2) **Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya**, yaitu berupa kawasan hutan lindung seluas $\pm$ 44.855 Ha, terdiri dari Hutan Lindung (HL) 9B Gunung Seminung, HL 17B Serarukuh, HL 43 Krui Utara, HL 44B Way Tenong-Kenali, HL 45B Bukit Rgis, HL 48B Palakiah, dan sebagian HL 39 Kota Agung Utara. Pengelolaan Hutan Lindung dilakukan oleh UPT KPHL II Liwa Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, kecuali HL 39 Kota Agung Utara yang berada di Kecamatan Suoh pengelolaannya dilaksanakan oleh KPHL Kota Agung yang berada di Kabupaten Tanggamus. Tutupan lahan berhutan pada kawasan hutan lindung, menunjukkan tingkat kritis, diperkirakan tersisa sekitar 18-20% dari luas kawasan Hutan Lindung, yang masih berupa tegakan hutan primer, selebihnya sudah berubah menjadi, hutan sekunder, kebun campuran, dan semak belukar.

Tabel 2.33. Hutan Lindung dan HKm di wilayah Kerja KPHL II Liwa

No	Nama Kawasan HL	RPHJP KPHL (Ha)	Luas (Ha) sblm	Jml KPS	Luas Hkm (Ha)	Anggota (KK)	Jml DPH
1	HL Reg. 9B Gunung Seminung	1,050.91	1,050.91	1	279.00	129	1
2	HL Reg. 17B Bukit Serarukuh	1,596.10	1,596.10	2	1,781.00	470	2
3	HL Reg. 43B Krui Utara	15,816.59	14,030.00	13	9,944.56	2,671	10
4	HL Reg. 44B Way Tenong-Kenali	13,260.40	13,040.00	19	10,049.34	5,331	12
5	HL Reg. 45B Bukit Rgis	8,549.83	8,345.00	23	7,025.31	4,246	9
6	HL Reg. 48B Bukit Palakiah	1,800.17	1,800.17	1	188.00	58	1
	Jumlah	42,074.00	39,862.18	59	29,267.20	12,905	35

Sumber, KPHL II Liwa, 2025

- (3) Kawasan Perlindungan Setempat berupa sempadan danau Ranau yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PUPR No.: 369/KPTS/M/2023 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Ranau pada Wilayah Sungai Musi-Sugihan-Banyuasin-Lemau, seluas 98 Ha yang berada di Kecamatan Lumbok Seminung. Selain sempadan danau, terdapat pula potensi hutan desa dan hutan adat seluas $\pm 3.285,2$ Ha yang dapat ditetapkan sebagai ekosistem esensial di luar kawasan hutan dan dukungan terhadap pencapaian target FOLU Net Sink 2030 melalui skema REDD+ dalam rangka pemenuhan komitmen penurunan emisi Gas Rumah Kaca Propinsi Lampung. Potensi hutan adat dan hutan desa tersebar di Kecamatan Balik Bukit, Batu Brak, Belalau, Batu Ketulis, Way Tenong dan Sumberjaya.

Gambar 2.10. Kebun Raya Liwa dengan latar belakang hutan konservasi TNBBS

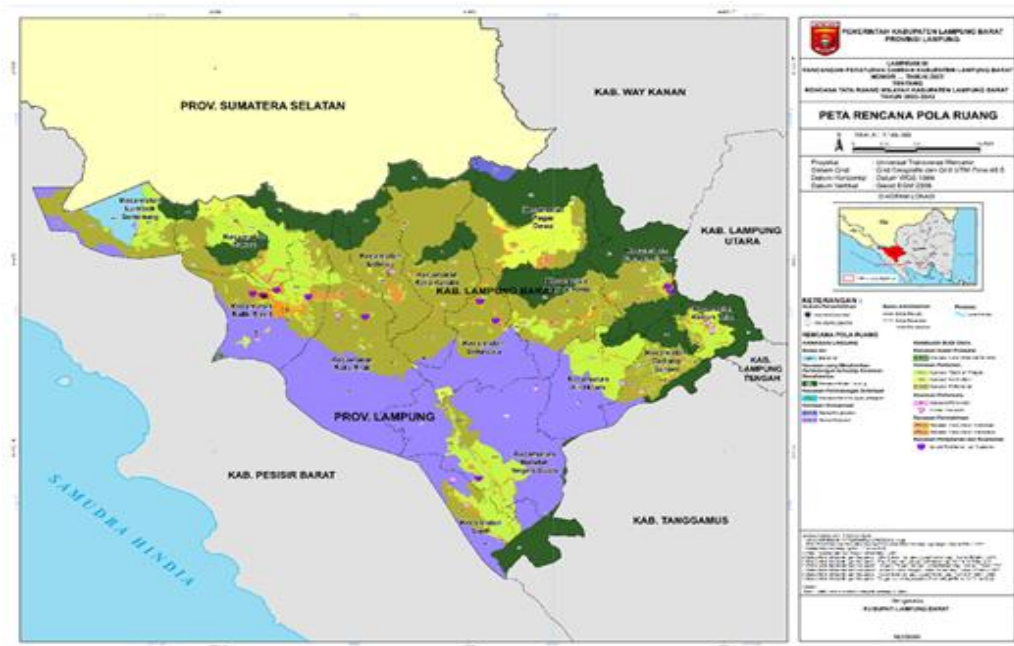


Sumber : lampungbaratkab.go.id

- (4) Kawasan Konservasi di Kabupaten Lampung Barat terbagi menjadi dua, yaitu kawasan konservasi insitu dan kawasan konservasi eksitu. Kawasan Konservasi insitu (pada habitat asli) yang beririsan dengan wilayah administrasi Lampung Barat meliputi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas ± 57.530 Ha, dan Suaka Margasatwa Gunung Raya seluas ± 883 Ha. Hutan Konservasi TNBBS telah ditetapkan oleh UNESCO pada tahun 2004 sebagai Warisan Dunia Hutan Hujan Tropis Sumatera, yang kini berstatus terancam dicabut (in Danger list).

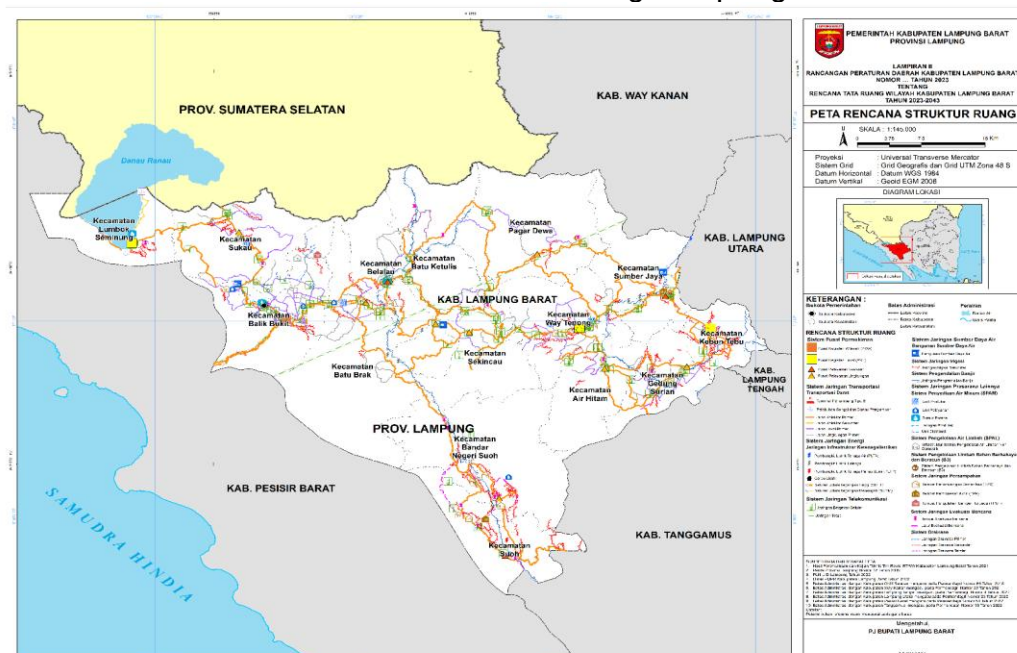
Kawasan konservasi eksitu (di luar habitat aslinya) berupa Kebun Raya Liwa seluas $\pm 86,68$ Ha. Kawasan konservasi eksitu Kebun Raya Liwa bertujuan untuk pengawetan flora khas hutan hujan pegunungan Sumatera, dengan 5 fungsi utama, yaitu fungsi konservasi, pendidikan, penelitian, wisata (rekreasi), dan ekologis (jasa ekosistem / Ruang Terbuka Hijau).

Gambar 2.11. Pola Ruang Kabupaten Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

Gambar 2.12. Struktur Ruang Lampung Barat



Sumber: RTRWK Lampung Barat 2023-2043

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Sektor Ekonomi tahun 2023

Indikator	Tahun 2023		
	Lampung Barat	Provinsi Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,69%	4,55%	5,05%
PDRB per Kapita	28,86 juta	48,19 juta	75,00 juta

Sumber : BPS

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Sektor Ekonomi tahun 2024

Indikator	Tahun 2024		
	Lampung Barat	Provinsi Lampung	Nasional
Pertumbuhan Ekonomi	4,36%	4,57%	5,11%
PDRB per Kapita	31,35 juta	51,4 juta	78,6 juta

Sumber : BPS

Tabel 2.36. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Lampung Barat	-1.16	2.55	4.06	4.68	4.36
2	Tanggamus	-1.77	2.34	4.16	4.7	4.01
3	Lampung Selatan	-1.73	2.6	4.81	4.82	4.62
4	Lampung Timur	-2.26	0.24	2.02	3.51	4.62
5	Lampung Tengah	-1.02	2.88	4.65	4.7	4.62
6	Lampung Utara	-1.45	2.82	3.16	4.22	4.1
7	Way Kanan	-1.16	2.9	4.41	4.63	4.65
8	Tulangbawang	-1.34	2.88	3.87	4.28	4.75
9	Pesawaran	-1.26	2.08	4.55	4.49	3.9
10	Pringsewu	-1.21	2.91	4.37	4.78	4.58
11	Mesuji	-1.35	2.84	3.49	4.06	4.58
12	Tulang Bawang Barat	-1.32	2.89	4.49	4.53	4.55
13	Pesisir Barat	-1.18	2.06	2.82	3.42	2.61

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi				
		2020	2021	2022	2023	2024
14	Kota Bandar Lampung	-1.88	3.12	4.92	4.96	4.97
15	Kota Metro	-1.79	2.91	4.51	4.86	4.88

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat dalam periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren positif, meskipun masih berada pada level menengah dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Lampung. Pada tahun 2020, Lampung Barat mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,16 persen akibat pandemi COVID-19, namun angka ini relatif lebih baik dibandingkan beberapa daerah lain seperti Kota Bandar Lampung yang terkontraksi hingga -1,88 persen. Memasuki 2021, Lampung Barat mulai pulih dengan pertumbuhan sebesar 2,55 persen, sedikit di bawah rata-rata kabupaten lain yang umumnya tumbuh di atas 2,8 persen.

Tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,06 persen, yang kembali menempatkan Lampung Barat pada kategori pertumbuhan menengah, kalah cepat dibandingkan daerah seperti Lampung Selatan yang tumbuh 4,81 persen atau Kota Bandar Lampung yang mencapai 4,92 persen. Pada 2023, pertumbuhan ekonomi Lampung Barat menguat menjadi 4,68 persen, menunjukkan perbaikan berkelanjutan, meskipun pada 2024 sedikit menurun ke angka 4,36 persen. Jika dibandingkan dengan daerah lain, Lampung Barat belum masuk dalam kelompok daerah dengan pertumbuhan tertinggi seperti Kota Bandar Lampung (4,97 persen) dan Kota Metro (4,88 persen), tetapi tetap lebih baik daripada Pesisir Barat yang pertumbuhannya hanya mencapai 2,61 persen.

Melihat kondisi ini, potensi Lampung Barat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa depan cukup besar apabila dapat mengoptimalkan sektor-sektor unggulan. Komoditas kopi robusta yang sudah dikenal sebagai produk ekspor menjadi kekuatan utama yang perlu dikembangkan, terutama melalui hilirisasi industri pengolahan dan penguatan branding kopi Lampung Barat di pasar nasional maupun internasional. Selain itu, sektor pariwisata alam seperti Danau Ranau, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, dan air terjun Sepapa Kiri menawarkan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan berbasis ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan. Diversifikasi di sektor pertanian, pengembangan agroindustri, serta penguatan UMKM berbasis produk lokal juga menjadi faktor kunci yang dapat menjadi pendorong utama atau game changer dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Barat ke depan.

Kemiskinan

Salah satu indikator yang menjadi tolak ukur akan keberhasilan dari Daerah adalah tingkat kemiskinan, pada tahun 2023 di Kabupaten Lampung Barat tingkat kemiskinan sebesar 11,17% sedangkan Untuk jumlah penduduk miskin sendiri di Kabupaten Lampung Barat sebanyak

34.370 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 11,71% setara dengan 36.200 Jiwa, sehingga tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebanyak 0,54%.

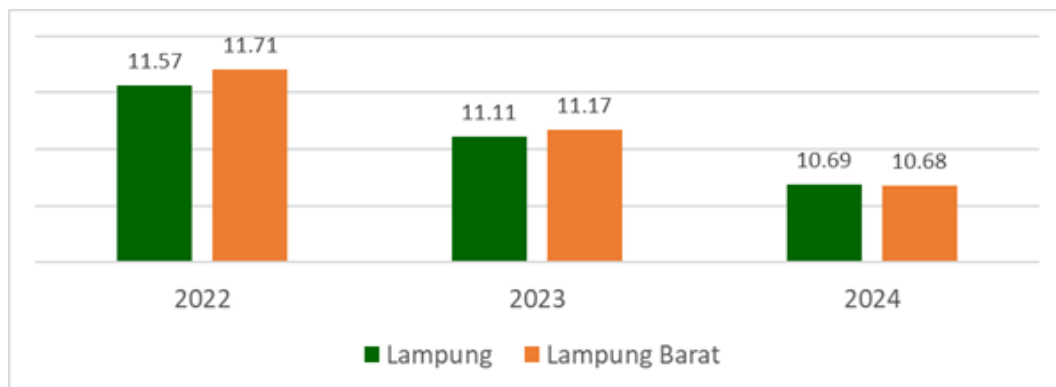
Pada tahun 2024 capaian kinerja kemiskinan menunjukkan hasil yang positif, Angka Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 10,68%, turun 0,49% dari tahun sebelumnya, untuk jumlah penduduk miskin sendiri pada tahun 2024 turun menjadi **33.430 Jiwa**.

Tabel 2.37. Angka Kemiskinan

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Angka Kemiskinan	Persen	11,71	11,17 (↓)	10,68 (↓)

Sumber Data : BPS 2024

Gambar 2.13. Angka Kemiskinan, Provinsi Lampung dan Kabupaten Lampung Barat 2022-2024



Sumber Data : BPS 2024

Jika dilihat dari Grafik diatas Angka kemiskinan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2022 dan 2023 masih diatas Provinsi namun pada tahun 2024 Angka Kemiskinan Lampung Barat dibawah Provinsi Lampung.

Tabel 2.38. Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung, 2024

Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu/Jiwa)	Angka Kemiskinan (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ Bulan)
Lampung Barat	33,43	10,68	1,51	0,40	563.531
Tanggamus	64,22	10,28	1,42	0,35	496.000
Lampung Selatan	132,38	12,57	1,94	0,46	528.226
Lampung Timur	142,70	13,19	1,57	0,29	497.183
Lampung Tengah	137,41	10,37	1,66	0,40	526.313
Lampung Utara	105,91	16,92	2,30	0,51	544.994
Way Kanan	48,88	10,43	1,57	0,36	464.717
Tulangbawang	37,46	7,88	0,82	0,17	560.324
Pesawaran	55,01	11,86	1,70	0,36	524.588
Pringsewu	34,42	8,32	0,92	0,16	583.425
Mesuji	12,91	6,31	0,83	0,16	555.729
Tubaba	20,35	7,22	0,87	0,19	544.020
Pesisir Barat	20,22	12,64	2,10	0,49	566.040
Kota B.Lampung	83,88	7,37	0,97	0,21	787.260
Kota Metro	12,07	6,78	0,77	0,15	503.161
Lampung	941,23	10,69	1,53	0,33	586.551

Sumber Data : BPS 2024

Jika dilihat dari tabel diatas, Tingkat kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat berada di urutan 10 (sepuluh) dari 15 Kab/Kota dimana Kabupaten Mesuji berada di peringkat pertama untuk Kabupaten dengan tingkat kemiskinan terendah dan Kabupaten Lampung Utara diposisi paling akhir dengan angka kemiskinan terbesar.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT dapat dihitung dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja, lalu dikalikan 100. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa banyak angkatan kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Hal ini dapat menjadi masalah dalam perekonomian, karena dapat menyebabkan kemiskinan dan masalah sosial lainnya.

Pada tahun 2023 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lampung Barat sebesar 2,10% atau sebesar 4.272 Jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya Jumlah pengangguran di Kabupaten Lampung Barat mengalami sedikit Kenaikan yang sebelumnya sebesar 0,15%. Namun, pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka kembali mengalami penurunan sebesar 2,09% atau sebesar 4.043 Jiwa,

turun sebanyak 0,16%. Kenaikan dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dapat dilihat dari Tabel dan Grafik Dibawah.

Tabel 2.39. Tingkat Pengangguran Terbuka

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,10	2,25 (↑)	2,09 (↓)

Sumber Data : BPS 2024

Indeks Gini

Pada tahun 2024, Gini Rasio Kabupaten Lampung Barat tercatat **0,290 Point** lebih angka tersebut Naik sedikit jika dibandingkan dengan Gini Rasio pada 2023 yang sebesar 0,274 Point. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun 2023.

Tabel 2.40. Gini Ratio

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
RASIO GINI	Point	0,284	0,274(↓)	0,290 (↑)

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebuah Indikator yang mengindikasikan bahwa kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Berdasarkan skala internasional, pencapaian IPM dikategorikan dalam 4 kategori, yaitu kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$).

IPM Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 (berdasarkan sensus penduduk 2020) mencapai angka 71,72 poin naik 0,71 poin dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 71,01 poin. Pada tahun 2023, IPM Kabupaten Lampung Barat berada di posisi ke-6 se Provinsi Lampung dan masuk kedalam kategori tinggi. Sedangkan untuk capaian di tahun anggaran 2024, IPM Kabupaten Lampung Barat kembali mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 72.41 Point atau naik sebesar 0,69 Point.

Tabel 2.41. Indeks Pembangunan Manusia

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
IPM	Point	71,01	71,72 (↑)	72,41 (↑)

Sumber Data : BPS 2024

IPM dapat digunakan untuk menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. IPM merupakan ukuran kualitas

hidup yang dihitung berdasarkan tiga dimensi dasar, Adapun Komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara lain :
Komponen-komponen pembentuk IPM adalah:

- **Umur panjang dan hidup sehat:** Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir
- **Pengetahuan:** Diukur dengan angka harapan sekolah dan rata-rata lama sekolah
- **Standar hidup layak:** Diukur dengan produk nasional bruto per kapita

Capaian Komponen IPM

Komposit dalam perhitungan IPM terdiri dari 4 (empat) Indikator antara lain :

- **Angka Harapan Hidup (AHH)**
2023 : 73,78 Tahun (↑) sebesar 0,55 dari tahun sebelumnya.
2024 : 73,96 Tahun (↑) sebesar 0,18 dari tahun sebelumnya.
- **Harapan Lama Sekolah (HLS)**
2023 : 12,26 Tahun (↑) sebesar 0,02 dari tahun sebelumnya.
2024 : 12,30 Tahun (↑) sebesar 0,04 dari tahun sebelumnya.
- **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**
2023 : 8,36 Tahun (↑) sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya.
2024 : 8,56 Tahun (↑) sebesar 0,2 dari tahun sebelumnya.
- **Pengeluaran Perkapita**
2023 : Rp 10.593.000 (↑) sebesar Rp.418.000 dari tahun sebelumnya.
2024 : Rp 10.965.000 (↑) sebesar Rp.372.000 dari tahun sebelumnya.

2.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu mengalami fluktuasi besar sepanjang periode 2020–2024. Terjadi lonjakan tajam dari 72,4 pada 2020 menjadi 145,6 pada 2021 (peningkatan lebih dari dua kali lipat), yang mungkin terkait dengan faktor eksternal, seperti dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan. Setelah lonjakan tahun 2021, AKI menurun drastis menjadi 36,1 pada 2022 dan stabil di angka 38,04 pada 2023. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelayanan kesehatan ibu, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas pelayanan.

Tabel 2.42. Angka Kematian Ibu

Tahun	Angka Kematian Ibu
2020	72,4/100.000 KH
2021	145,6/100.000 KH
2022	36,1/100.000 KH
2023	38,04/100.000 KH
2024	114,33/100.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Namun, pada tahun 2024, angka kematian ibu kembali melonjak ke 114,33 per 100.000 KH. Kenaikan ini cukup signifikan dan menunjukkan adanya masalah serius, seperti kemungkinan penurunan mutu layanan kesehatan, krisis tenaga medis, kurangnya intervensi kesehatan ibu, atau faktor lain seperti bencana atau wabah penyakit. Data ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perbaikan kesehatan ibu belum tercapai sepenuhnya, mengingat terjadi ketidakstabilan dari tahun ke tahun.

Tingginya AKI, terutama pada 2021 dan 2024, menjadi alarm bahwa perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap sistem kesehatan ibu di daerah ini, mencakup aspek layanan prenatal, persalinan, pasca-persalinan, serta faktor sosial-ekonomi yang berpengaruh.

Tabel 2.43. Perbandingan AKI dan jumlah kasus kematian ibu

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKI	72,4	145,6	36,1	38,04	114,33
kasus kematian ibu	4 kasus	8 kasus	2 kasus	2 Kasus	6 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jumlah kematian Ibu pada tahun 2024 adalah 6 kasus kematian dengan penyebab kematian adalah 1 kasus dengan eklamsi, 3 kasus dengan perdarahan dan 2 kasus dengan komplikasi non obstetrik. Kemudian untuk tempat kematian 5 kasus kematian meninggal di rumah sakit rujukan serta 1 kasus dalam perjalanan proses rujukan dari PMB ke Puskesmas. Semua kasus kematian ini sudah terentri di dalam aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) yang merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan kematian berdasarkan Alamat Mati, Alamat KTP dan Alamat Domisili.

Jumlah kematian Ibu pada tahun 2024 adalah 6 kasus dengan jumlah Kelahiran Hidup Lampung Barat tahun 2024 adalah 5.248 Lahir Hidup. Sehingga jika dihitung jumlah rasio kematian ibu atau (*Maternal Mortality Ratio – MMR*) maka akan didapatkan hasil 114,33 persen. MMR menunjukkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dalam suatu periode waktu tertentu. Semakin rendah MMR, semakin baik kinerja kesehatan ibu di suatu wilayah. Untuk Kabupaten Lampung Barat terjadi peningkatan jumlah kasus kematian dari tahun sebelumnya yaitu dari 2 kasus kematian menjadi 6 kasus kematian.

Angka Kematian Bayi (AKB)

Tabel 2.44. Angka Kematian Bayi

Tahun	Angka Kematian Bayi
2020	2,90/1.000 KH
2021	4,55/1.000 KH
2022	1,1/1.000 KH

Tahun	Angka Kematian Bayi
2023	2,28/ 1000 KH
2024	2,29/1.000 KH

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jumlah kematian bayi pada tahun 2024 adalah 12 kasus kematian, dengan penyebab kematian adalah 4 kasus dengan BBLR, 2 kasus dengan Asfiksia, 2 kasus dengan Kelainan Kongenital, 4 kasus dengan gangguan respirasi dan 1 kasus dengan Sepsis. Untuk tempat kematian semua kasus meninggal di Rumah Sakit dan Klinik. Semua kasus kematian ini sudah terentri di dalam aplikasi MPDN (*Maternal Perinatal Death Notification*) yang merupakan aplikasi dari Kementerian Kesehatan dalam pencatatan dan pelaporan kematian berdasarkan Alamat Mati, Alamat KTP dan Alamat Domisili.

Tabel 2.45. Angka Kematian Bayi dan Jumlah Kasus Kematian Bayi

Uraian	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
AKB	2,9	4,55	1,1	2,28	2,29
Kasus Kematian Bayi	16 kasus	25 kasus	8 kasus	11 Kasus	12 Kasus

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Jumlah kematian bayi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 adalah 12 kasus kematian dengan jumlah Lahir Hidup adalah 5.248 Lahir Hidup. Sehingga jika dilakukan perhitungan rasio kematian Bayi maka akan didapatkan hasil 2,29. AKB memberikan gambaran tentang tren kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, sehingga dapat digunakan untuk melihat perubahan kematian bayi dari waktu ke waktu. Jumlah kasus kematian bayi meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 11 kasus menjadi 12 kasus kematian bayi.

Prevalensi Stunting,

Tabel 2.46. Data stunting tahun 2020 – 2024

No	Tahun	Prosentase Stunting	Target Nasional	Keterangan
1	2020	-	-	Tidak ada Survei Status Gizi (SSGI) di Tahun 2020
2	2021	22,7%	24,4%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021

No	Tahun	Prosentase Stunting	Target Nasional	Keterangan
3	2022	16,6%	21,6%	Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022
4	2023	24,6	16 %	Hasil Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023
5	2024	-	14 %	Hasil Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2024 belum keluar

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk prevalensi stunting data yang digunakan adalah data hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Pada tahun 2024 Kementerian Kesehatan sudah melaksanakan kegiatan Survei Status Gizi Indonesia yang dilakukan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2024. Sedangkan untuk hasil survei saat ini sedang dilaksanakan pengolahan data dan belum ada rilis hasil survei.

Upaya Kabupaten Lampung Barat dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu kegiatan analisis situasi indikator layanan, Tahapan kedua dengan mengidentifikasi kendala cakupan layanan serta masalah yang dihadapi dalam upaya Pencegahan dan Percepatan penurunan stunting meliputi indikator, kelompok sasaran, penyebab masalah dan solusinya. Tahapan ketiga dengan pemetaan kegiatan tahun rencana berjalan dan tahun rencana, tahapan selanjutnya yaitu monitoring dan evaluasi pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pelaporan cakupan layanan setiap 6 bulan sekali dengan data bersumber dari pekon/kelurahan.

Indeks Keluarga Sehat

Pada tahun 2024, indeks keluarga sehat mencapai angka 0,25 poin. Capaian ini menempatkan Lampung Barat pada posisi ke 5 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.

PENYAKIT MENULAR

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator program masing-masing jenis penyakit menular yang menjadi prioritas pembangunan kesehatan, capaian indikator tersebut secara rinci dalam uraian di bawah ini

TBC

Tabel 2.47. Angka Penemuan BTA (+) Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2020 – 2024

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS BARU YANG DITEMUKAN	TARGET KASUS	CDR (%)	SR (%)
1	2020	207	980	20,9	91,47%
2	2021	230	530	43,39%	91,43%
3	2022	423	1.094	38,67%	94,72%
4	2023	427	1151	41,36%	94,4%
5	2024	497	932	53,31%	92,59%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Tuberkulosis di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 adalah sebanyak 497 kasus TBC yang ditemukan dan di obati dari target 932 kasus yang harus ditemukan (53,31%) dan untuk capaian success rate (SR) 92,59% sementara target SR adalah 90%..

HIV

Tabel 2.48. Jumlah Penderita HIV Kabupaten Lampung Barat

TAHUN	KASUS BARU (ORG)	KUMULATIF (ORG)	MENINGGAL (ORG)	KET
2020	3	9	0	-
2021	1	10	0	-
2022	2	12	1	-
2023	2	14	1	-
2024	2	16	0	-

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk pelaksanaan program pelayanan Kesehatan orang dengan HIV/AIDS (ODHIV) di kabupaten lampung barat pada tahun 2024 mengalami penambahan kasus baru sebanyak 2 (dua) orang, sehingga total kasus HIV yang sedang dalam pengobatan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 16 orang.

DBD

Tabel 2.49. Jumlah Penderita DBD Kabupaten Lampung Barat TAHUN 2020 – 2024

No	Puskesmas	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sumber Jaya	16	0	0	0	52
2	Gedung Surian	1	0	0	1	3
3	Fajar Bulan	8	0	1	0	30
4	Sekincau	6	0	4	0	17
5	Srimulyo	2	0	0	0	1
6	Kenali	1	0	0	0	11
7	Batu Brak	4	1	1	0	16
8	Liwa	29	9	22	28	167
9	Buay Nyerupa	15	2	5	28	110
10	Lombok	2	0	0	5	107
11	BNS	0	0	0	1	3
12	Pagar Dewa	4	0	0	0	9
13	Kebun Tebu	5	1	0	0	108
14	Air Hitam	0	0	0	1	0
15	Batu Ketulis	3	0	4	4	21
Kabupaten		96	13	37	69	655

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular DBD di kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 mengalami kenaikan kasus yang sangat tinggi. Kasus DBD yang ditemukan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 655 kasus. Peningkatan kasus DBD ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih meningkatkan kembali tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kebersihan pribadi untuk mencegah munculnya tempat – tempat perindukan nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan penularan penyakit DBD.

MALARIA

Tabel 2.50. Angka Insidens Malaria Per Diobati Per Mil Penduduk Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020– 2024

No	TAHUN	API
1.	2020	0
2.	2021	0
3.	2022	0
4.	2023	0
5.	2024	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Untuk program Malaria pada tahun 2024 ditemukan adanya 3 kasus malaria import dan API pada tahun 2024 adalah sebesar 0,01/1.000 penduduk. Kegiatan yang tetap harus dilakukan untuk mencegah

munculnya kasus malaria dan penularan malaria adalah dengan penguatan surveilans kasus malaria dan penguatan surveilans migrasi malaria di Kabupaten Lampung Barat.

PENYAKIT KECACINGAN

Tabel 2.51. Capaian Pelaksanaan POPM Kecacingan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024

NO	PUSKESMAS	2020	2021	2022	2023	2024
1	SUMBER JAYA	100,00	100%	100%	100 %	100%
2	BUNGIN	100,00	100%	100%	99,9 %	72,97%
3	FAJAR BULAN	100,00	100%	100%	101,42 %	96,74%
4	SEKINCAU	100,00	101,86%	100%	100 %	105,68%
5	SRIMULYO	99,69	99,69%	99,32%	90,52 %	91,14%
6	KENALI	98,99	98,84%	161%	100 %	100%
7	BATU BRAK	100,00	100%	100%	100 %	100%
8	LIWA	103,31	100%	100%	100 %	100%
9	B. NYERUPA	100,00	100%	100%	99,54 %	100%
10	LOMBOK	106,13	89,69%	95,38%	91,87 %	92,57%
11	B.N.SUOH	100,00	100%	100%	100 %	100%
12	PAGAR DEWA	100,00	100%	100%	100 %	100%
13	KEBUN TEBU	97,33	99,71%	100%	100 %	97,41%
14	BATU KETULIS	100,00	99,01%	100%	100,26 %	100,44%
15	AIR HITAM	100,00	100%	100%	97,76 %	100%
	KABUPATEN	99,94	99,26%	101,5%	99.42 %	97,83%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Pelaksanaan program Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) kecacingan di Kabupaten Lampung Barat pda Tahun 2024 adalah sebesar 97,82%, Dimana target yang harus di capai adalah sebesar 90%.

PENYAKIT TIDAK MENULAR

Tabel 2.52. Kasus Kesakitan Penyakit Tidak Menular (20 besar penyakit)

Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Gastritis	6049	Hipertensi	17.221	Hipertensi	31.361
Hipertensi	5436	Penyakit Jantung Koroner	305	Penyakit Jantung Koroner	85
Influenza	4828	Gagal Jantung	382	Gagal Jantung	37

Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
Diabetes Mellitus Tipe II	2411	Diabetes Melitus	3.320	Diabetes Melitus	4.363
Arthritis reumatoid	2311	Obesitas	5.035	Obesitas	2188
Dyspepsia	1847	Penyakit Tiroid	73	Penyakit Tiroid	17
Myalgia	1816	Stroke	144	Stroke	62
Common Cold	1494	Asma Bronchiale	538	Asma Bronchiale	427
Dermatitis Kontak Alergi	1356	SLE	-	SLE	18
Skabies	1151	Thalasemia	6	Thalasemia	0
Vertigo	1061	PPOK (Penyakit Pernafasan Obstruktif Kronis)	265	PPOK (Penyakit Pernafasan Obstruktif Kronis)	29
Diare	953	Osteoporosis	1	Osteoporosis	0
ISPA	890	Ginjal Kronik	21	Ginjal Kronik	2
Bronkitis Akut	759	Tumor Payudara	12	Tumor Payudara	0
Migrain	662	Retinoblastoma	2	Retinoblastoma	0
Kehamilan Normal	518	Leukimia	1	Leukimia	0
Persistensi Gigi Sulung	516	Kanker Serviks	-	Kanker Serviks	0
Asma bronkial	513	Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	628	Cedera Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	382
Demam Typoid	444	Cedera Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3	Cedera Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga	3
CHF	403	Cedera Akibat Lain	46	Cedera Akibat Lain	27

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Universal Health Coverage (UHC)

Pada Tahun 2024 Dukungan anggaran untuk program Jaminan Kesehatan Nasional/JKN (75% dari 50% pajak rokok yang diterima). Pajak Rokok yang di terima Tahun 2024 sebesar : Rp. 9.671.246.298 dan di

alokasikan untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar Rp. 7.963.996.810. Capaian Kabupaten Lampung Barat dalam memenuhi batas minimal 75%. Dukungan anggaran untuk JKN telah memenuhi batas minimal, dimana pada tahun 2024 telah dialokasikan sebesar 82%.

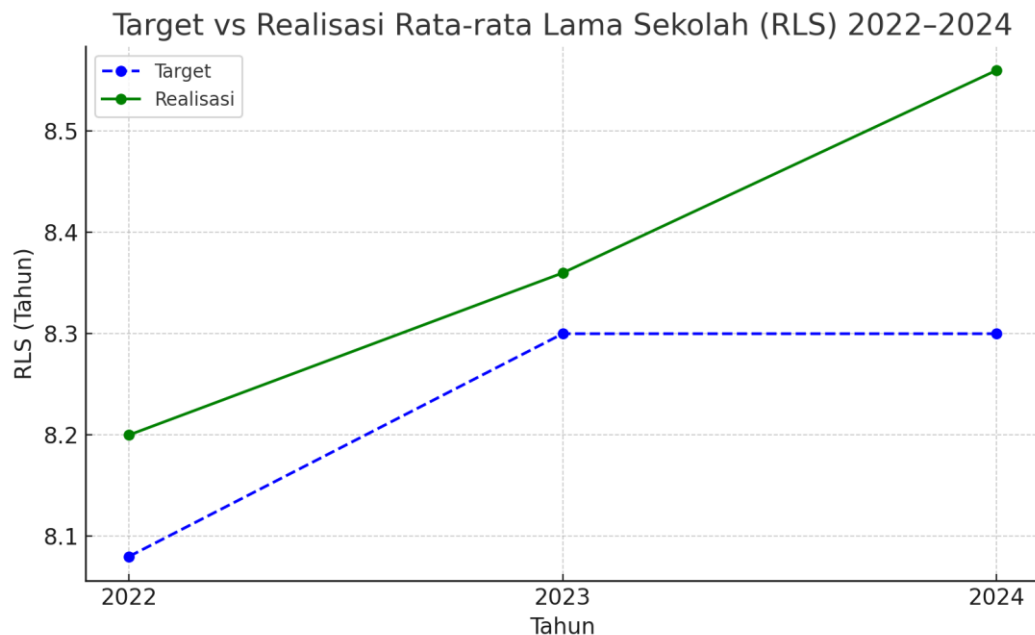
2.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

Rata-Rata Lama Sekolah

Tabel 2.53. Rata-Rata Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	RLS	8,08 tahun	8,20 tahun	8,30 tahun	8,36 tahun	8,30 tahun	8,56 tahun

Sumber: BPS, 2025



Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk untuk menempuh pendidikan formal. RLS merupakan salah satu unsur dalam menghitung Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Semakin tinggi angka RLS, semakin lama jenjang pendidikan yang sudah dicapai oleh penduduk. Dari table diatas dapat diketahui Peningkatan RLS Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2022 dengan capaian 8,20 Tahun meningkat menjadi 8,36 Tahun pada tahun 2023, dan tahun 2024 capaian RLS Lampung Barat sebesar 8,56 Tahun. Artinya, secara rata-rata, penduduk Kabupaten Lampung Barat yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,56 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP. Jika dibandingkan dengan capaian Nasional sebesar 8,85 Tahun maka

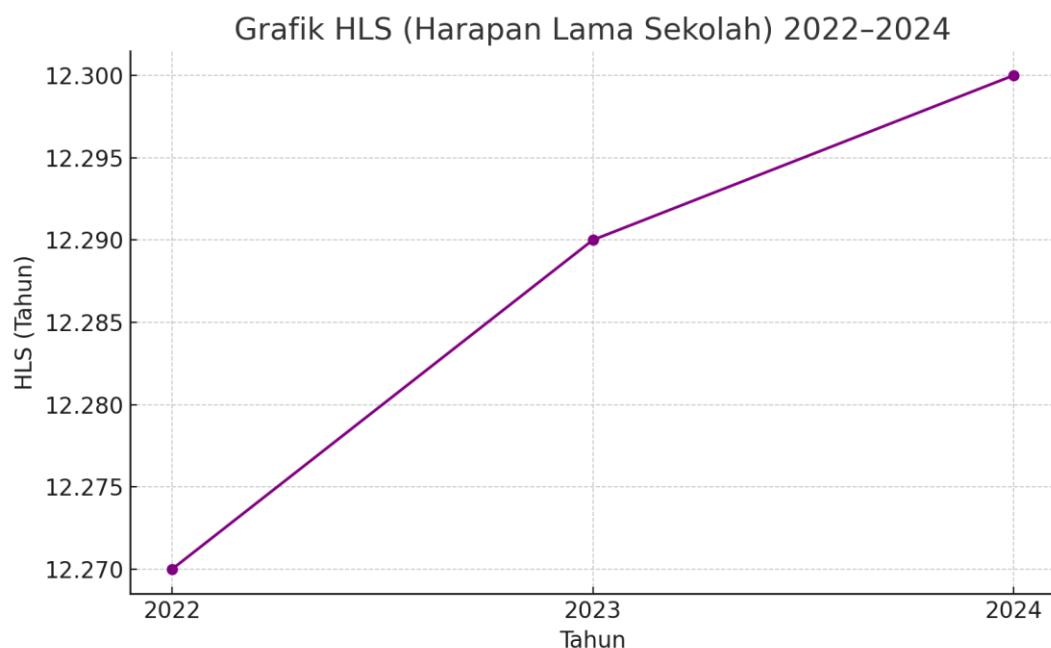
capaian RLS Kabupaten Lampung Barat masih dibawah Nasional, akan tetapi angka RLS Lampung Barat masih lebih tinggi dari capaian Propinsi Lampung yaitu sebesar 8,36 Tahun. Upaya untuk meningkatkan RLS Kabupaten Lampung Barat telah dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan non formal bagi masyarakat umum setiap tahunnya, namun yang menjadi kendala selama ini adalah masih sangat rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti pendidikan non formal melalui pendidikan Kejar Paket A, B dan C. Rendahnya minat masyarakat tersebut dapat disebabkan karena penduduk usia 25 tahun ke atas tersebut tidak menjadikan status pendidikannya sebagai prioritas karena mereka lebih berfokus pada pekerjaannya sebagai mata pencaharian sehari-hari.

Harapan Lama Sekolah

Tabel 2.54. Harapan Lama Sekolah

NO	URAIAN	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024
1	HLS	12,27	12,29	12,30

Sumber: BPS, 2025



Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan jumlah tahun pendidikan yang dapat ditempuh oleh penduduk usia sekolah yang diukur pada penduduk usia 7 tahun ke atas. HLS Lampung Barat tahun 2024 sebesar 12,30 tahun yang berarti bahwa penduduk Lampung Barat diperkirakan akan dapat menempuh pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tahun pertama perguruan tinggi. Capaian ini masih lebih rendah dibandingkan HLS Provinsi Lampung yang sebesar 12,78 tahun. HLS juga menunjukkan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dapat diakses di Kabupaten Lampung Barat baik oleh penduduk Lampung Barat ataupun penduduk dari luar Lampung Barat. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk

dapat meningkatkan minat masyarakat setempat dan pendatang untuk dapat melanjutkan pendidikannya di Kabupaten Lampung Barat.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) masyarakatnya. Salah satu langkah konkret adalah penyediaan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa baru di jenjang SD/MI dan SMP/MTs sejak tahun 2018. Program ini bertujuan meringankan beban ekonomi keluarga sehingga dapat meningkatkan partisipasi sekolah. Pada tahun ajaran terbaru, program ini telah mencakup lebih dari 6.000 siswa di masing-masing jenjang pendidikan.

Selain itu, pemerintah daerah juga aktif melobi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendapatkan dukungan dalam peningkatan infrastruktur dan mutu pendidikan. Ini termasuk pembangunan serta rehabilitasi fasilitas pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Untuk menjangkau masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal, Pemkab Lampung Barat juga mengintensifkan pelaksanaan pendidikan kesetaraan melalui jalur non-formal.

Capaian SPM Urusan Pendidikan

Tabel 2.55. Capaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2024

No	Indikator	Jenjang	Capaian Tahun 2024
1	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	75,51%
2	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	71,07%
3	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	65,18%
4	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	68,81%
5	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	55,93%
6	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	97,98%
7	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	KKesetaraan	12,36%
8	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	38,82%
9	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	62,89%
10	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	56,20%
11	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	55,82%
12	D.4 Iklim Keamanan	SD	72,78%

No	Indikator	Jenjang	Capaian Tahun 2024
13	D.4 Iklim Keamanan	SMP	68,23%
14	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	70,90%
15	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	71,62%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2025

Capaian SPM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 berdasarkan Raport Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar 70,49% dengan kategori tuntas pratama,

Dari masing-masing indicator SPM diatas ada satu indicator dengan capaian tinggi yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 – 15 dengan capaian 97,98%, delapan indicator dengan capaian baik yaitu Kemampuan Literasi SD dengan capaian 75,51%, Kemampuan Literasi SMP dengan capaian 71,07%, Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SD dengan capaian 72,78%, Iklim Keamanan Satuan Pendidikan SMP dengan capaian 68,23%, Iklim Kebinekaan SD dengan capaian 70,90%, Iklim Kebinekaan SMP dengan capaian 71,62%, Iklim Inklusivitas SD dengan capaian 56,20%, dan Iklim Inklusivitas SMP 55,82%, dan ada tiga indicator dengan ketercapaian sedang diantaranya Skor Kemampuan Numerasi SD dengan capaian 65,18%, Skor Kemampuan Numerasi SMP dengan capaian 68,81% serta Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4 dengan capaian 62,89%,

Untuk indicator dengan capaian rendah terdiri dari tiga indicator diantaranya Angka Partisipasi Sekolah (5-6) dengan capaian 55,93%, Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan dengan capaian 12,36% dan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B, berdasarkan ketercapaian indicator diatas Langkah-langkah yang harus dilakukan Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan ketercapaian SPM dengan melakukan berbagai pembenahan diantaranya melakukan sinkron data antara Disdukcapil dengan Data Pokok Pendidikan, ataupun melakukan pendataan mandiri dengan melibatkan kecamatan/pekon guna mengetahui jumlah anak dan alasan mengapa anak tidak terdaftar di Layanan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Membangun Kerjasama dengan Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan, Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus, Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, Refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, Kecukupan buku teks dan non teks yang berkualitas, Kecukupan Fasilitas TIK, Peningkatan Kualitas Guru/Kepala Sekolah/Pengawas Sekolah agar memiliki kompetensi memadai untuk menyelenggarakan layanan yang berkualitas bagi peserta didik, Pengajuan formasi guru ASN ataupun melakukan penataan/pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tingkat kemampuan literasi dan numerasi di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Pada jenjang SD, skor kemampuan literasi mencapai 75,51%, sementara pada jenjang SMP tercatat sebesar 71,07%. Untuk kemampuan numerasi, capaian pada jenjang SD adalah sebesar 65,18%, sedangkan pada jenjang SMP sebesar 68,81%. Dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, secara umum terdapat tren peningkatan, meskipun peningkatannya relatif moderat. Pada tahun 2022, misalnya, skor literasi SD masih berada di kisaran 73%, sedangkan SMP sekitar 69%. Untuk numerasi, capaian di tahun 2022 di tingkat SD berkisar 63%, sementara SMP sekitar 66%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, kemampuan literasi dan numerasi siswa di Lampung Barat masih perlu terus ditingkatkan, terutama dalam hal numerasi di tingkat SD.

Kondisi di daerah ini mencerminkan adanya tantangan terkait kualitas pembelajaran dasar, ketersediaan sumber belajar, serta kompetensi guru dalam mengajarkan literasi dan numerasi secara efektif. Berbagai faktor seperti keterbatasan sarana prasarana, belum meratanya kualitas tenaga pendidik, serta perbedaan tingkat sosio-ekonomi keluarga turut mempengaruhi capaian kemampuan siswa.

Untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Kabupaten Lampung Barat, beberapa program dapat diimplementasikan. Di antaranya adalah penguatan pelatihan guru berbasis literasi dan numerasi, penerapan program pembelajaran berbasis proyek (Project-Based Learning) yang mendorong keterampilan berpikir kritis, serta penyediaan bahan bacaan yang berkualitas di sekolah-sekolah dasar dan menengah. Program lain yang perlu dikuatkan adalah literasi keluarga dan masyarakat, di mana orang tua dan lingkungan sekitar didorong untuk aktif mendukung kegiatan membaca dan berhitung anak-anak di luar jam sekolah. Selain itu, pelaksanaan asesmen literasi dan numerasi secara berkala penting dilakukan untuk memantau kemajuan siswa dan menyesuaikan intervensi pembelajaran sesuai kebutuhan.

Dengan kombinasi program peningkatan kapasitas guru, penyediaan sarana belajar yang memadai, serta keterlibatan komunitas pendidikan dan masyarakat luas, diharapkan kemampuan literasi dan numerasi siswa di Kabupaten Lampung Barat akan terus mengalami peningkatan yang signifikan dalam tahun-tahun mendatang.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Tabel 2.56. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	-	56,57	63,08	68,29

Sumber: Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas pencapaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024 Kabupaten Lampung Barat mendapat nilai sebesar Rp.68,29 dan masuk dalam katagori Sedang.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap upaya pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk meningkatkan literasi masyarakat. IPLM mengukur beberapa unsur, seperti pemerataan layanan perpustakaan, ketersediaan koleksi, tenaga perpustakaan, dan keterlibatan masyarakat.

2.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Data PPKS

Tabel 2.57. Jumlah PPKS Kabupaten Lampung Barat

No.	PPKS	Tahun (Orang)		
		2022	2023	2024
1.	Anak			
a.	Anak balita terlantar	1	1	0
b.	Anak terlantar	8	8	21
c.	Anak Jalanan	0	0	0
d.	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	1	43
e.	Anak dengan kedisabilitasan	215	119	139
f.	Anak yang menjadi korban tindak kekerasan	5	5	0
g.	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	0	1	1
2.	Wanita			
a.	Wanita rawan sosial ekonomi	736	736	736
3.	Lanjut Usia Terlantar	49	44	241
4.	Penyandang Cacat			

No.	PPKS	Tahun (Orang)		
		2022	2023	2024
a.	Penyandang disabilitas	3067	2702	2653
5	Tuna Sosial			
a.	Tuna Susila	1	1	1
b.	Gelandangan		1	1
c.	Pengemis			0
d.	Pemulung	4	4	5
e.	Bekas warga binaan	4	4	57
6	Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya			
a.	Korban penyalahgunaan napza	2	2	0
7	Keluarga			
a.	Fakir miskin	16.768 (jiwa)	15.223 (Jiwa)	15.339
b.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	3	3	0
8	Masyarakat			
a.	Korban Trackfiking	0	0	0
b.	Korban tindak kekerasan	0	0	0
c.	Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	0
d.	Korban bencana alam	137	81	723
e.	Korban bencana sosial	63	78	78
f.	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	0	0	12
g.	Komunitas Adat Terpencil	0	0	92
h.	Kelompok minoritas	0	0	0

Sumber: Dinas Sosial, 2025

Data PSKS

Tabel 2.58. Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	PSKS	Tahun (Org)		
		2022	2023	2024
1.	Pekerja sosial professional	10	10	10
2.	Pekerja sosial masyarakat	136	136	136
3.	Taruna Siaga Bencana	80	80	80
4.	Lembaga kesejahteraan sosial	12	12	9
5.	Karang Taruna	436	436	436
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	0	0	0
7.	Keluarga Pioner	22	22	22
8.	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga	0	0	0

	Berbasis Masyarakat			
9.	Wanita pemimpin kesejahteraan sosial	1	1	1
10.	Penyuluh Sosial	78	83	83
11.	Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan	15	15	15
12.	Dunia usaha	240	240	240

Sumber: Dinas Sosial, 2025

2.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Tabel 2.59. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kerukunan Umat Beragama	72.39	84.06	84.06	89.58	90.50

Sumber : Badan Kesbangpol Tahun 2025

Pada tahun 2020, Indeks Kerukunan Umat Beragama berada di angka 72,39. Angka ini menunjukkan kondisi kerukunan yang relatif baik, meskipun masih ada tantangan dalam menjaga harmoni antarumat beragama. Faktor-faktor seperti perbedaan pandangan, dinamika sosial, serta isu-isu intoleransi mungkin masih memengaruhi kondisi kerukunan pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2021, indeks mengalami lonjakan signifikan menjadi 84,06. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya yang berhasil dalam memperkuat toleransi, membangun dialog antaragama, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Program-program pemerintah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama dalam membangun harmoni sosial bisa menjadi faktor pendorong utama dalam peningkatan ini.

Pada tahun 2022, indeks tetap berada di angka 84,06, yang menunjukkan bahwa kondisi kerukunan tetap stabil. Meskipun tidak ada peningkatan, kestabilan ini bisa menjadi tanda bahwa upaya menjaga toleransi masih berjalan dengan baik, meskipun mungkin masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi agar indeks dapat meningkat lebih lanjut.

Pada tahun 2023, indeks kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 89,58. Peningkatan ini mengindikasikan semakin kuatnya rasa saling menghormati dan kerja sama antarumat beragama. Kebijakan yang lebih inklusif, peningkatan dialog antaragama, serta peran

aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan bisa menjadi faktor yang mendukung tren positif ini.

Pada tahun 2024, indeks mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, yaitu 90,50. Ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama semakin baik dan kuat. Angka ini mencerminkan keberhasilan berbagai pihak dalam membangun harmoni sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat. Ke depan, upaya mempertahankan dan meningkatkan kerukunan tetap perlu dilakukan agar situasi yang kondusif ini terus terjaga dan tidak mudah terpengaruh oleh dinamika sosial atau politik yang bisa memicu ketegangan.

Tabel 2.60. Jumlah Penggiat Seni dan Budaya

Penggiat Seni Dan Budaya		Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
Seni Rupa					
	Jumlah Kelompok Seni Lukis	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Kriya/Kerajinan Tangan	7	7	7	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Patung	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Dekorasi	3	3	3	Kelompok
	Jumlah Kelompok Seni Reklame				Kelompok
2. Seni Tari/Gerak					
	Tari Kreasi Baru				
	Jumlah Kelompok	16	16	16	Kelompok
	Jumlah Anggota Tari Kreasi Baru	500	550	575	Orang
	Tari Tradisional				
	Jumlah Kelompok	10	10	10	Kelompok
	Jumlah Anggota Tari Tradisional	400	410	450	Orang
3. Seni Suara/Vocal					
	Jumlah Kelompok Seni Suara/Vocal	2	2	2	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Suara/Vocal	30	30	40	Orang
4. Seni Musik Tradisional					
	Jumlah Kelompok Seni Musik Tradisional	70	70	70	Kelompok
	Jumlah Anggota Seni Musik Tradisional	490	495	500	Orang
5. Seni Sastra					
	1. Jumlah Kelompok Seni Sastra	3	3	3	Kelompok

Penggiat Seni Dan Budaya				Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
	2.	Jumlah Anggota Seni Sastra		90	93	150	Orang
6. Seni Teater/Drama							
		Jumlah Kelompok Seni Teater/Drama		3	3	3	Kelompok
		Jumlah Anggota Seni Teater/Drama		90	94	100	Orang
7. Pagelaran/Pameran Seni Budaya							
		Pagelaran Seni Budaya					
		Jumlah Pagelaran		5	5	5	Kali
		Jumlah Pengunjung		7000	7000	7000	Orang
8. Celugam							
		Kerajinan Celugam					
		Jumlah pengrajin		5	5	5	IKM Aktif

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

Lampung Barat memiliki beragam seni budaya yang harus dilestarikan dan berkembang sehingga bisa lebih dikenal masyarakat. Dalam hal ini dapat dilihat pada table diatas tentang perkembangan data seni dan budaya diKabupaten Lampung Barat.

Tabel 2.61. Kinerja Sektor Kebudayaan

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	11,24%	12.25
2	Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	3,22%	5.32

Sumber : Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2025

2.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Tabel 2.62. Data Perlindungan Perempuan dan Anak

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A. Perempuan dan Anak Berhadapan dengan	Kasus	4	24	11	2	

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Hukum						
1. Jumlah Perempuan Berhadapan dengan Hukum		2	7	3	0	
(a) Jumlah Perempuan Sebagai Pelaku	Orang	0	0	1	0	
(b) Jumlah Perempuan Sebagai Korban	Orang	2	7	3	2	
2. Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum	Orang	4	17	8	2	
(a) Jumlah Anak Sebagai Pelaku	Orang	0	4	8	2	
(b) Jumlah Anak Sebagai Korban	Orang	4	13	10	7	
(c) Jumlah Anak Sebagai Saksi	Orang	0	0	0	0	
B. Laporan Pengaduan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		6	20	9	9	
1. Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan		2	7	3	2	

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	2	1	3	2	
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Perempuan Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	0	0	0	0	
2. Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan		4	13	6	7	
(a) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Ditindak Lanjuti	Kasus	4	13	6	7	
(b) Jumlah Laporan Pengaduan Anak Korban Kekerasan Belum Ditindak Lanjuti	Kasus	0	0	0	0	
C. Lembaga Perlindungan	Unit	1	3	3	3	

Perlindungan Perempuan dan Anak	Satuan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perempuan dan Anak						
1. Jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA)/ P2TP2A	Unit	1	1	1	1	
2. LPAI (Lembaga perlindungan anak Indonesia)		-	1	1	1	
3. KPAI (Komisi Perlindungan anak Indonesia)		-	1	1	1	
Indeks Perlindungan Anak			58,66	60,94	60,16	

Sumber Data: Dinas KBPP&PPPA Tahun 2025

Indeks Gender

Tabel 2.63. Perkembangan IPG dan IDG Tahun 2022 – 2023

Uraian	2022	2023
IPG (%)	93,4	93,4
IDG (%)	65,92	65,92

Sumber : Dinas PPKBPPPA Tahun 2025

Pembangunan Pemuda

Tabel 2.64. Indeks Pembangunan Pemuda

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Pembangunan Pemuda	60,63	62,59	63	61,34	61,84

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2025

Indeks Pembangunan Pemuda mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 dengan menunjukkan perbaikan kondisi pemuda, tetapi terjadi penurunan pada 2023 sebelum sedikit naik lagi pada 2024. Merencanakan program-program yang dapat mendukung potensi pemuda, serta peningkatan pendidikan para pemuda dirasa sangat perlu untuk meningkatkan IPP Lampung Barat kedepannya. Selain itu perlu kebijakan yang lebih konsisten untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan pemuda agar mereka mempunyai peran lebih dalam pembangunan.

2.1.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Angka Ketergantungan,

Tabel 2.65. Angka Ketergantungan Penduduk Tahun 2024

Jumlah Penduduk	313.756
Penduduk Produktif	217.666
Non Produktif	96.090
Angka Ketergantungan Penduduk	44,15%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025

Total jumlah penduduk tercatat sebanyak 313.756 jiwa, yang terdiri dari kelompok penduduk produktif dan non-produktif. Dari jumlah tersebut, sebanyak 217.666 jiwa masuk dalam kategori penduduk produktif, yaitu mereka yang berada dalam rentang usia kerja, biasanya 15–64 tahun. Sementara itu, terdapat 96.090 jiwa yang masuk dalam kategori penduduk non-produktif, yaitu mereka yang berada di usia anak-anak (di bawah 15 tahun) atau lanjut usia (di atas 64 tahun).

Angka ketergantungan penduduk tercatat sebesar 44,15%, yang menunjukkan jumlah penduduk non-produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk produktif. Artinya, setiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung sekitar 44 orang penduduk non-produktif. Angka ini cukup baik, karena semakin rendah angka ketergantungan, semakin ringan beban penduduk produktif dalam menopang penduduk non-produktif.

Rasio ketergantungan yang berada pada level 44,15% menandakan bahwa wilayah ini memiliki potensi demografi yang baik, di mana jumlah tenaga kerja produktif lebih besar dibandingkan jumlah penduduk yang bergantung pada mereka. Kondisi ini bisa menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi jika tenaga kerja produktif dapat dimanfaatkan secara optimal melalui penciptaan lapangan kerja yang memadai, peningkatan keterampilan, dan investasi di sektor ekonomi yang mendukung pertumbuhan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, bonus

demografi ini bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan dan layanan sosial bagi kelompok non-produktif.

2.1.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. TPAK menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. TPAK dihitung dengan membagi jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau mencari pekerjaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi TPAK, antara lain: Upah minimum, Rerata lama sekolah, Penduduk usia kerja.

Pada tahun 2023 TPAK Kabupaten Lampung Barat mengalami Penurunan sebesar 82,01% turun sebanyak 1,16%. Hal tersebut tentunya sejalan dengan kenaikan Tingkat pengangguran terbuka dimana pada tahun 2023, TPT di Kabupaten Lampung Barat mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022. Namun, pada tahun 2024 TPAK kembali mengalami kenaikan sebesar 82,83% atau naik sebanyak 0,82%

Tabel 2.66. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	83,17	82,01 (↓)	82,83 (↑)

Sumber : BPS Tahun 2025

Jika dilihat dari jumlah angkatan Kerja cenderung mengalami naik turun pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Untuk jumlah angkatan kerja serta jenisnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67. Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis

INDIKATOR	SATUAN	2022	2023	2024
Penduduk Usia 15+ yang merupakan Angkatan Kerja	Jiwa	194.053	189.541 (↓)	193.092 (↑)
Penduduk Usia 15+ Bukan Angkatan Kerja	Jiwa	39.275	41.588 (↑)	40.021 (↓)
Penduduk Usia 15+ Yang Bekerja	Jiwa	189.970	185.269 (↓)	189.049 (↑)
Penduduk Usia 15+ Yang Termasuk Penganggura Terbuka	Jiwa	4.083	4.272 (↑)	4.043 (↓)

Sumber : BPS Tahun 2025

Indeks Inovasi Daerah

Tabel 2.68. Capaian Indeks Inovasi Daerah

No.	Tahun	Peringkat	Capaian Indeks Inovasi Daerah	
			Nilai	Kategori
1	2020	6	11,288	Terinovatif
2	2021	5	62,8	Sangat Inovatif
3	2022	14	65,39	Sangat Inovatif
4	2023	31	61,46	Sangat Inovatif
5	2024	30	69,93	Sangat Inovatif

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2025

Capaian Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat dari Tahun 2020 – 2024 mengalami fluktuasi dalam hal peringkat dan nilai, namun secara kategori masih masuk dalam kategori sangat inovatif. Kategori sangat inovatif berada pada interval nilai 60 – 100.

Capaian Indeks Inovasi Daerah pada Tahun 2024 mengalami kenaikan dari 61,46 poin menjadi 69,93 poin. Jumlah Inovasi yang dilaporkan pada Tahun 2024 sebanyak 129 Inovasi Daerah. Beberapa catatan evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan tabel kematangan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 :

- Lampung Barat sebagian besar berada pada parameter nilai maksimal yaitu 3
- Indikator yang harus diperbaiki dan dimaksimalkan adalah Bimtek Inovasi, Integrasi Program dan Kegiatan Inovasi Daerah dalam RKPD, Kecepatan Penciptaan Inovasi dan Kualitas Inovasi Daerah.

Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Tabel 2.69. Capaian Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	96,06	96,23	108,54	123,87	136,04

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Tahun 2025

Peranan kategori Penyedia Akomodasi dan Makan Minum terhadap total PDRB selama lima tahun terakhir berada dibawah 3 persen. Pada tahun 2020 kontribusi kategori ini sebesar 1,35 persen dan stabil di tahun 2024 menjadi 1,37 persen. Pada tahun 2024, nilai tambah yang tercipta dari kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah sebesar 136,04 miliar rupiah.

Laju pertumbuhan kategori ini selama lima tahun menunjukkan pertumbuhan yang berfluktuasi. Dari tahun 2020 sebesar 8,09 persen menjadi 10,25 persen pada tahun 2024. Terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022 dikarenakan kunjungan ke penyedia akomodasi maupun penyedia makan minum yang menurun sebagai akibat pandemi Covid-19 menjadi 5,33 persen, dan kembali meningkat di tahun 2023 dan 2024, dikarenakan kembali normalnya kegiatan di masyarakat setelah pandemi.

Pelaku Ekonomi Kreatif

Tabel 2.70. Pelaku Ekonomi Kreatif

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Pelaku Ekonomi Kreatif	na	na	64	64	683

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2025

Sebelum tahun 2022 para pelaku ekonomi kreatif belum terdata dengan baik karena belum pernah ada program ekonomi kreatif dilaksanakan di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Masa Covid-19 menjadi salah satu penyebab terbatasnya kegiatan pengumpulan data dan pelatihan terkait ekonomi kreatif. Pada tahun 2022 data mulai dikumpulkan namun dengan pengetahuan terbatas mengenai ekonomi kreatif sehingga data yang didapat hanya sedikit, dan tahun 2024 dengan koordinasi lintas OPD yang tepat dan lebih baik terdata sebanyak 683 pelaku ekonomi kreatif di Lampung Barat. Dari 683 pelaku ekonomi kreatif, subsektor kuliner yang paling banyak pelaku ekrafnya, yaitu

sebanyak 455 pelaku yang terbagi menjadi beberapa jenis usaha diantaranya Kedai Makanan, Kedai Minuman, Cafe, Restoran, dan lainnya. Bisnis kuliner memang lebih mudah dimulai dibandingkan subsektor lain, seperti film, animasi, atau pengembang teknologi yang memerlukan keterampilan dan modal yang lebih kompleks. Dengan banyaknya pelaku ekraf di subsektor kuliner menunjukkan bahwa Lampung barat mempunyai keanekaragaman kuliner, dari makanan tradisional hingga makanan modern. Sebagian pelaku ekraf memanfaatkan warisan kuliner daerah sebagai menu utama ataupun makanan kemasan untuk dijual sebagai oleh-oleh.

Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Barat tergolong rendah. Pada tahun 2021 tercatat bahwa rasio kewirausahaan daerah ini sebesar 0.1%. Kemudian meningkat menjadi 0.7% pada tahun 2022, selanjutnya pada tahun 2023 menjadi 1,6% dan pada tahun 2024 tercatat angka rasio kewirausahaan Kabupaten Lampung Barat meningkat menjadi 1.88%. Meskipun angka diatas terus meningkat setiap tahunnya, namun masih sangat jauh dari target pemerintah dimana angka kewirausahaan mencapai 4% dari total populasi.

2.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Kinerja Sektor Perikanan

Tabel 2.71. Capaian Kinerja Sektor Perikanan

No	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya	8.850,84	9.935,41	8.940,05	9.349	10.002,36
2	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap	475,3	586,2	714,90	750,60	766,2
3	Total Pertumbuhan produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	9.326,14	10.521,61	9.654,95	10.099,6	10.768,56

Sumber : Dinas Perikanan Tahun 2025

Selama periode tahun 2020 hingga 2024 pertumbuhan produksi perikanan Kabupaten Lampung Barat yang mencakup dua subsektor, yaitu perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Secara umum, terjadi

peningkatan tren produksi dari tahun ke tahun, meskipun terdapat beberapa fluktuasi. Perikanan Budidaya menunjukkan peningkatan produksi yang cukup konsisten. Pada tahun 2020, produksi tercatat sebesar 8.850,84 ton dan meningkat menjadi 9.935,41 ton pada tahun 2021. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 8.940,05 ton, produksi kembali meningkat di tahun 2023 menjadi 9.349 ton dan mencapai produksi sebesar 10.002,36 ton pada Tahun 2024. Sektor Perikanan Tangkap juga menunjukkan peningkatan yang relatif baik. Produksi pada tahun 2020 adalah 475,3 ton, dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 766,2 ton pada tahun 2024. Kenaikan paling signifikan terjadi antara tahun 2020 dan 2021, yakni dari 475,3 ke 586,2 ton, serta antara tahun 2021 dan 2022, mencapai 714,90 ton.

2.1.3.4 Transformasi Digital

Kinerja Telekomunikasi

Tabel 2.72. Data telekomunikasi

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah Pekon dan Kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet	134	134	134	Pekon
2. Jumlah Tower Komunikasi	112	112	116	Unit
3. Jumlah Smartvillage	7	7	7	Pekon/ Kel

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

Berdasarkan tabel di atas tentang Data Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 terdapat peningkatan pada jumlah tower komunikasi yang semula pada tahun 2023 sebanyak 112 menara tower, pada tahun 2024 bertambah 4 unit menjadi 116 menara tower. Sedangkan untuk jumlah pekon dan kelurahan yang sudah terhubung jaringan internet dan jumlah *smartvillage* tidak mengalami peningkatan.

2.1.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Investasi PMDN/PMA

Tabel 2.73. Capaian Investasi PMDN/PMA

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Jumlah Investasi PMDN/PMA	113.483.975.551	112.921.542.189	261.030.787.440	119.605.298.159	187.253.670.764

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP Tahun 2025

Investasi adalah salah satu faktor strategis dalam kegiatan perekonomian. Investasi juga biasa disebut dengan penanaman modal. Sumber investasi secara umum dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan Laporan LKPM. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang disampaikan secara berkala, dikecualikan bagi pelaku usaha skala mikro, perusahaan di bidang usaha hulu migas, perbankan, lembaga keuangan nonbank dan asuransi.

Kewajiban LKPM dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan bagi pelaku usaha skala kecil dan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan) bagi pelaku usaha skala menengah dan besar secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu "Pelaporan LKPM".

Dari tabel di atas, realisasi investasi di Kabupaten Lampung Barat dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Rata-rata pelaku usaha di Kabupaten Lampung Barat didominasi oleh skala UMK dengan realisasi investasi < 15 Milyar per tahun, namun kenaikan investasi dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh adanya pembangunan 3 (tiga) pembangkit listrik tenaga minihydro (PLTM) yang saat ini sudah dalam tahap produksi.

Ekspor Barang dan Jasa

Tabel 2.74. Ekspor Barang dan Jasa

Uraian	2022	2023	2024
Net Ekspor Barang dan Jasa	(2,795.23)	(3,082.05)	(3,237.65)

Sumber : BPS, Tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel, diketahui bahwa nilai net ekspor barang dan jasa di Kabupaten Lampung Barat mengalami tren defisit yang semakin membesar dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, nilai net ekspor tercatat sebesar -2.795,23, kemudian menurun menjadi -3.082,05 pada tahun 2023, dan terus melebar hingga -3.237,65 pada tahun 2024. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat mengimpor lebih banyak barang dan jasa dibandingkan yang diekspornya, sehingga terjadi defisit dalam neraca perdagangan daerah. Kondisi ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi terhadap produk luar daerah dan kemungkinan lemahnya kapasitas produksi atau daya saing komoditas lokal. Jika tren ini tidak segera diatasi, maka dapat berdampak pada kestabilan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan produksi lokal, memperkuat sektor UMKM, dan memperluas akses pasar bagi produk-produk unggulan Lampung Barat.

2.1.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Tabel 2.75. Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Infrastruktur /Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	-	-	-	76,12	62,71

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2025

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat baik yang dibangun oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Metode yang digunakan untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPANRB) No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Layanan Infrastruktur yang dinilai adalah Layanan Air Minum, Kualitas Lingkungan Hidup, Jaringan Listrik, Ruang Terbuka Hijau, Infrastruktur Internet, Infrastruktur Jalan, Infrastruktur Jalan, Transportasi Publik, Infrastruktur Irigasi, Lampu Penerangan Jalan Umum, Layanan Pengelolaan Sampah, dan Drainase.

Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur di Kabupaten Lampung Barat baru dilaksanakan 2 kali pada tahun 2023 dan 2024. Nilai IKLI pada tahun 2024 sebesar 62,71 dengan Mutu pelayanan D atau Berkinerja Tidak Baik. Nilai pada tahun 2024 ini mengalami penurunan 13,41 poin dari tahun 2023.

Dari 12 Layanan Infrastruktur yang dinilai, ada 6 Layanan yang memiliki Mutu pelayanan Berkinerja Tidak Baik (D) yaitu Jembatan, Transportasi Publik, Irigasi, Lampu Penerangan Jalan Umum, Layanan Pengelolaan Sampah, dan Drainase.

Desa Mandiri

Pada Tahun 2024, terdapat peningkatan status pekon sebagai berikut

- Terdapat 5 pekon "berkembang" dari 16 pekon (tahun 2023) berubah status menjadi pekon "Maju"
- Dari 64 Pekon "Maju" di tahun 2023, terdapat 12 pekon "Maju" yang berubah status menjadi pekon "Mandiri" dan mendapat penambahan 5 pekon "Maju" baru pada tahun 2023
- Terdapat penambahan sebanyak 12 pekon "Mandiri" baru dari Tahun 2023 dengan persentase sebesar 8,51%. Hal ini melebihi dari target (Target penambahan 5 Pekon).

Dapat disimpulkan pencapaian pekon Mandiri tahun 2024 sebanyak 63 pekon dari target 56 pekon dengan pencapaian 111,3% atau sebesar 48,1% dari 131 Pekon di kabupaten Lampung Barat telah berstatus Pekon mandiri.

2.1.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Tabel 2.76. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

No	Uraian	Realisasi				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pajak Daerah (milyar)	11.79	13.05	14.39	14.85	15.82
2	PDRB ADHB (milyar)	7,131.89	7,477.51	8,277.70	9,015.23	9,903.24
3	Rasio Pajak terhadap PDRB	0.17%	0.17%	0.17%	0.16%	0.16%

Sumber : BPS, Tahun 2025

Pajak Daerah terus meningkat setiap tahun, dari Rp11,79 milyar pada 2020 menjadi Rp15,82 milyar pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang stabil. Sejalan dengan itu, PDRB ADHB juga mengalami kenaikan signifikan, dari Rp7.131,89 milyar pada 2020 menjadi Rp9.903,24 milyar pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang positif di wilayah tersebut selama lima tahun terakhir.

Namun, meskipun Pajak Daerah dan PDRB ADHB sama-sama menunjukkan tren peningkatan, Rasio Pajak terhadap PDRB cenderung stagnan pada 0,17% selama periode 2020 hingga 2022, kemudian sedikit menurun menjadi 0,16% pada 2023 dan 2024. Penurunan rasio ini mengindikasikan bahwa meskipun nilai nominal pajak daerah bertambah, kontribusinya terhadap total PDRB tidak meningkat, bahkan sedikit menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh pertumbuhan PDRB yang lebih cepat dibandingkan peningkatan pajak, atau potensi optimalisasi pengumpulan pajak yang belum maksimal. Dengan demikian, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap PDRB perlu menjadi fokus dalam upaya mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.

INFLASI

Indeks harga konsumen pada bulan Januari 2019 sebesar 137,77 persen dan pada bulan Desember 2019 sebesar 142,28 persen. Dengan kata lain, selama tahun 2019, terjadi kenaikan harga secara umum sebesar 3,53 persen.

Tabel 2.77. Tingkat Inflasi Tahunan Kabupaten Lampung Barat

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Lampung Barat	-	-	-	-	-
Provinsi Lampung	2,00	2,19	5,51	3,47%	1,57%

Sumber : BPS

Keterangan: Tidak terdapat data inflasi tahun 2020 s.d 2024 dikarenakan BPS Kabupaten Lampung Barat tidak melakukan perhitungan untuk kabupaten pada tahun 2020 s.d 2024.

2.1.4 Aspek Pelayanan Umum

2.1.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Indeks RB	57.35	61.28	70.74
2	Nilai SAKIP	67,97	66.41	67.25

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Indeks RB menunjukkan peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, yaitu dari 57,35 pada 2022 menjadi 61,28 pada 2023, dan selanjutnya mencapai 70,74 pada 2024. Tren ini mencerminkan adanya kemajuan signifikan dalam upaya reformasi birokrasi, yang dapat mengindikasikan perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, efisiensi, dan transparansi.

Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Lampung Barat selama periode 2022 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil namun signifikan dari sisi evaluasi kinerja birokrasi. Pada tahun 2022, nilai SAKIP berada di angka 67,97, kemudian mengalami penurunan menjadi 66,41 di tahun 2023, yang mengindikasikan adanya penurunan kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Namun, pada tahun 2024, nilai tersebut meningkat kembali menjadi 67,25, yang meskipun belum melampaui capaian tahun 2022, menunjukkan adanya perbaikan atau upaya perbaikan dari sisi tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Fluktuasi ini menandakan bahwa meskipun terdapat upaya menuju perbaikan, konsistensi dan penguatan sistem manajemen kinerja masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara lebih sistematis dan berkelanjutan.

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 2.78. Hasil Evaluasi SPBE Tahun 2024

NO	NAMA INSTANSI	INDEK SPBE	PREDIKAT
1	Pemerintah Provinsi Lampung	4,09	Sangat Baik
2	Pemerintah Kab.Lampung Tengah	2,68	Baik
3	Pemerintah Kab.Lampung Utara	3,12	Baik
4	Pemerintah Kab.Lampung Barat	2,62	Baik
5	Pemerintah Kab.Tanggamus	3,44	Baik

NO	NAMA INSTANSI	INDEK SPBE	PREDIKAT
6	Pemerintah Kab. Way kanan	3,52	Sangat Baik
7	Pemerintah Kab. Tulang Bawang	2,85	Baik
8	Pemerintah Kab.Pringsewu	3,05	Baik
9	Pemerintah Kab.Mesuji	3,99	Sangat Baik
10	Pemerintah Kab.Metro	3,34	Baik
11	Pemerintah Kota Bandar Lampung	2,98	Baik

Sumber : Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Lampung

Berdasarkan tabel di atas, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mendapatkan nilai indeks SPBE sebesar 2,62 poin dengan predikat baik. Nilai indeks SPBE tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengalami penurunan sebesar 0,13 poin dibandingkan tahun 2023 dengan nilai indeks SPBE 2,75 poin predikat baik. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa poin dalam penilaian SPBE yang tidak dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, sehingga berdampak pada menurunnya Nilai Indeks SPBE tahun 2024, sebagai berikut:

1. **Perencanaan Strategis SPBE:** Meskipun sudah ada dokumen Rencana Induk SPBE 2019-2024, dokumen tersebut belum mencakup referensi dan domain Arsitektur SPBE secara lengkap, seperti proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, keamanan, dan layanan SPBE.
2. **Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):** Meskipun beberapa aplikasi SPBE sudah dibangun dan terdapat SOP pembangunan aplikasi, proses pembangunan aplikasi belum mengikuti siklus pengembangan sistem yang terstruktur (SDLC). Selain itu, meskipun ada kerja sama terkait pemanfaatan sertifikat elektronik, bukti penggunaan API masih kosong. Layanan pusat data dan jaringan intra instansi sudah ada, tetapi belum ada prosedur baku dan penerapan di seluruh unit kerja.
3. **Penyelenggara SPBE:** Meskipun Tim Koordinasi SPBE telah dibentuk, belum ada dokumen program kerja yang jelas. Program kerja tim dilaksanakan tanpa perencanaan yang terstruktur dan belum ada kolaborasi penerapan SPBE di instansi terkait.
4. **Manajemen SPBE:** Aspek manajemen seperti manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan sudah diterapkan, namun tanpa program kegiatan yang terencana dan pedoman yang jelas karena belum ada dokumen arsitektur dan peta rencana SPBE.
5. **Audit TIK:** Meskipun sudah ada tim asesor internal untuk pemantauan dan evaluasi SPBE, audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE belum dilaksanakan.

Kinerja Statistik

Tabel 2.79. Data statistik sektoral

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah data Statistik sektoral	300	238	230	Buku

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

Berdasarkan tabel di atas tentang data statistik, Dinas Komunikasi dan Informatik melakukan pencetakan buku Lampung Barat Dalam Angka (LBDA) dan buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didistribusikan kepada seluruh OPD di Kabupaten Lampung Barat untuk dipergunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Jumlah data statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 sebanyak 230 buku. Data tersebut menunjukkan penurunan jumlah buku sebanyak 8 buku dibandingkan tahun 2023 dengan jumlah 238 buku. Hal tersebut disebabkan kurangnya anggaran untuk melakukan pencetakan buku.

Kinerja Persandian

Tabel 2.80. Data Persandian

Uraian	Thn 2022	Thn 2023	Thn 2024	Satuan
1. Jumlah Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	0	0	-
2. Jumlah Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15 Kec	15 Kec	15 Kec	Kec
3. Jumlah Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	3 Ruang	3 Ruang	3 Ruang	Ruang
4. Jumlah Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Bulan

Sumber : Data Dinas Komunikasi dan Informatika 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota, jumlah pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik dan jumlah penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah pada tahun 2024 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2023. Pada indikator kedua, kegiatan yang dilakukan yaitu pemeliharaan rutin berkala peralatan komunikasi sandi posko lambara di 15 kecamatan se-Kabupaten Lampung Barat. Pada indikator ketiga, kegiatan yang dilakukan yaitu pelaksanaan rutin standar keamanan ruang kerja pimpinan (kontra penginderaan) yang meliputi Ruang Kerja Bupati, Ruang Kerja Wakil Bupati dan Ruang Kerja Sekretaris Daerah. Pada indikator keempat, merupakan kegiatan bantuan komunikasi (bankom) kebencanaan yang tersebar pada tiap kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

Indeks Pelayanan Publik

Tabel 2.81. Indeks Pelayanan Publik

Uraian	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2024
Indeks Pelayanan Publik	belum	belum	3.46	4.07	3,09

Sumber data : Setdakab Lampung Barat Tahun 2024

Indeks Integritas Nasional

Tabel 2.82. Capaian Indeks Integritas Nasional

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Integritas Nasional	-	-	70.92	69.09	70,23

Sumber : Inspektorat Daerah tahun 2025

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Kesadaran berintegritas atau kehidupan berintegritas adalah wujud algoritma integritas seperti halnya algoritma yang membaca pola aktivitas atau kebiasaan kita saat menggunakan gadget.

Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk menilai sejauh mana lembaga-lembaga pemerintah menjalankan prinsip transparansi, pengelolaan sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran, serta upaya sosialisasi antikorupsi. Survei ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh tentang integritas masing-masing lembaga dan

mengungkap akar permasalahan yang menyebabkan persepsi korupsi di Indonesia tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan.

KPK menilai bahwa tanpa adanya perbaikan signifikan dalam mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, upaya untuk mengurangi praktik korupsi akan terus menemui jalan buntu. Dengan demikian, di masa mendatang, nilai integritas lembaga tidak hanya mencerminkan kinerja internal, tetapi juga menjadi indikator utama bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Rilis SPI terbaru ini menjadi momentum penting untuk terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas di setiap lapisan pemerintahan. Harapannya, dengan perbaikan sistem dan penegakan hukum yang lebih tegas, Indonesia dapat melangkah lebih jauh menuju era pemerintahan yang transparan dan bebas dari korupsi. SPI bukan hanya sekadar angka, tetapi merupakan cermin dari budaya kerja dan komitmen antikorupsi yang harus terus diperkuat di setiap lini pemerintahan. Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama meningkatkan integritas demi Indonesia yang lebih baik

Pada Tahun 2020 dan 2021 KPK belum melakukan survey terhadap Kabupaten Lampung Barat. Sedangkan Tahun 2022 sampai dengan sekarang terus dilaksanakan dengan sistem Pemda Lampung Barat memberikan data SDM (Perangkat Daerah, Masyarakat dan Pihak Ketiga) dan KPK akan melakukan survey integritas secara acak dari data yang telah disampaikan. Naik turunnya dari skors yang didapatkan Pemda tergantung dari tingkat partisipasi (responden) yang telah dilaksanakan oleh KPK.

2.1.4.2 Hukum Berkeadilan, Kemanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansi

Kinerja Kesbangpol

Tabel 2.83. Kinerja Kesbangpol

No	Uraian	2022	2023	2024
1	Jumlah Kejadian Konflik SARA yang terjadi	0	0	0
2	Jumlah LSM	381	405	429
3	Jumlah Parpol	19	19	19

Sumber : Badan Kesbangpol, Tahun 2025

Indeks Ketenteraman dan Ketertiban

Tabel 2.84. Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)

Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Tahun			Satuan
	2022	2023	2024	
1. Jumlah Pelanggaran K3	106	60	60	Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, 2025

Dari data table diatas dapat kami jelaskan terkait data Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten Lampung Barat Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan priode Januari s/d Desember 2024 terdata sebanyak 60 kasus atas pengawasan, penanganan, laporan, pengaduan yang dilakukan dengan proses penyelesaian kasus Nonyustisi/ pembinaan adapun jenis perda/ perbub yaitu Perda No 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Perizinan tertentu terdapat sebanyak 3 Kasus Pelanggaran, Perda NO 15 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum terdapat sebanyak 22 kasus pelanggaran, Perda No 1 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok terdapat sebanyak 35 kasus pelanggaran.

Kinerja Hukum

Tabel 2.85. Capaian Kinerja Hukum

No	Uraian	Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	na	na	na	na	77,18 (BB)
2	Persentase Capaian Aksi HAM	66,64 (C)	na	85,45(B)	83,3 (B)	83,45 (B)

Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2025

Tabel tersebut menunjukkan data terkait Indeks Reformasi Hukum dan Persentase Capaian Aksi HAM dari tahun 2020 hingga 2024. Pada Indeks Reformasi Hukum, data hanya tersedia pada tahun 2024 dengan nilai 77,18 yang termasuk dalam kategori BB, sementara tidak ada data yang dilaporkan pada tahun 2020 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa pengukuran atau pelaporan indikator ini baru dilakukan pada tahun 2024 atau adanya kendala dalam pengumpulan data pada tahun-tahun sebelumnya. Nilai yang diperoleh pada 2024 menunjukkan pencapaian yang cukup baik, meskipun tanpa data sebelumnya sulit untuk menilai tren kinerja dari waktu ke waktu.

Sementara itu, pada Persentase Capaian Aksi HAM, terlihat adanya tren positif dari tahun 2020 ke 2022. Tahun 2020 mencatatkan capaian sebesar 66,64 dalam kategori C, yang kemudian meningkat signifikan menjadi 85,45 dalam kategori B pada 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, meskipun nilainya sedikit menurun menjadi 83,3 dan 83,45, capaian tersebut tetap berada dalam kategori B, menunjukkan kestabilan kinerja yang cukup baik setelah peningkatan sebelumnya.

2.1.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Indeks Daya Saing Daerah

Tabel 2.86. Capaian Indeks Daya Saing Daerah

Uraian	Realisasi				
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
Indeks Daya Saing Daerah	-	-	2,56	2,91	3,42

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah 2025

Indeks Daya Saing daerah (IDSD) merupakan instrument pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi kedalam 12 pilar. Dengan pengukuran menggunakan data sekunder yang bersumber dari Kementerian/ Lembaga.

Pilar – pilar yang diukur meliputi institusi, infrastruktur, Adopsi TIK, Stabilitas Ekonomi Makro, Kesehatan, Keterampilan, Pasar Produk, Pasar tenaga Kerja, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, Dinamika Bisnis, dan Kapabilitas Inovasi.

Penilaian IDSD Kabupaten Lampung Barat baru diukur pada Tahun 2022 dengan Nilai IDSD mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada Tahun 2024 ada 3 pilar dibawah nilai 3, yaitu :

- Pilar 8 yaitu Pasar tenaga Kerja dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 2,57. Nilai ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2,72. Dengan indikator yang mengalami penurunan Kebijakan Pasar Tenaga Kerja Aktif, Upah Pekerja dan Kesetaraan Upah Perempuan dan Laki-laki.
- Pilar 9 yaitu Sistem Keuangan dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 1,14. Indikator pilar ini meliputi Persentase kredit swasta terhadap PDRB Harga Berlaku, Nilai Akad Kredit Usaha Rakyat dan Persentase premi asuransi jiwa dan non-jiwa terhadap PDRB ADHB.
- Pilar 12 yaitu Kapabilitas Inovasi dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 1,34. Nilai ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 0,88. Pada pilar 12 ini, perlu peningkatan pada indikator

pengembangan klaster, publikasi ilmiah, Aplikasi Kekayaan intelektual (KI), Indeks keunggulan lembaga riset dan Aplikasi merek dagang.

2.1.4.4 Kinerja setiap urusan pemerintahan daerah

Tabel 2.87. Capaian RPD Tahun 2023-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas		Laju pertumbuhan ekonomi	4,69%	4.36%
		Meningkatnya Pendapatan Perkapita	pendapatan perkapita	28,860,000	31,350,000
			Gini Rasio	0.274	0,290
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	11.12%	10,68
			Tingkat Pengangguran Terbuka	2.25%	2,09
2	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat		indeks pembangunan manusia (IPM)	71.72	72,41
		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdayasaing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.72	72,41
3	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta tangguh bencana		Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,12 poin	67.71
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70.55	73,09
			Indeks Resiko Bencana	176,61	176,28
		Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Daerah	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	76,12 poin	67.71

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis	Realisasi 2023	Realisasi 2024
		Meningkatnya Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,55	73,09
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	176,61	176,28
4	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Nilai Reformasi Birokrasi	61,28 poin	70,74
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)	61,28 poin	70,74
			Nilai SAKIP	66,41	67,25
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	2,09 poin	3,90
5	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,58.	90,50
		Meningkatkan Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	89,58.	90,50
		Meningkatnya Pelestarian warisan budaya tak benda dan cagar budaya daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	11,24%	12,25
			Persentase objek cagar budaya peringkat kabupaten	3,22%	5,32

Sumber : data diolah tahun 2025

2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. Penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Lampung Barat memaparkan pelayanan dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya, makna dari pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara dalam hal ini masyarakat Kabupaten Lampung Barat. Pada bab ini akan memaparkan terkait penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Lampung Barat yang telah ditetapkan berdasarkan bidang urusan wajib Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi pangkal munculnya pelayanan dasar.

Sesuai hasil entry pada aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id> maka capaian SPM Lampung Barat.

Tabel 2.88. Capaian SPM Tahun 2024

No	NAMA	CAPAIAN
	KAB. LAMPUNG BARAT	82,31 %
1	PENDIDIKAN	70,77 %
2	KESEHATAN	93,11 %
3	PEKERJAAN UMUM	91,49 %
4	PERUMAHAN RAKYAT	50,00 %
5	TRANTIBUMLINMAS	96,24 %
6	SOSIAL	92,25 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Jenis Pelayanan Dasar dalam SPM adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Selanjutnya Mutu Pelayanan Dasar dalam SPM adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.

Pencapaian SPM Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024 secara keseluruhan sebesar 82,31%. Dimana pencapaian SPM terbesar sebesar 96,24% pada urusan Trantibumlinmas dan pencapaian SPM terendah sebesar 50,00% pada urusan Perumahan Rakyat. Pencapaian yang tidak sesuai target ini dipengaruhi oleh pencapaian pada jenis pelayanan dasar dalam SPM yang memiliki bobot penilaian sebesar 80% dan sisanya dipengaruhi oleh pencapaian dari mutu pelayanan dasar dalam SPM sebesar 20%.

Tabel 2.89. Rincian Capaian SPM Urusan Pendidikan

No	URAIAN	CAPAIAN
1	PAUD	57,45 %
2	Pendidikan Dasar	95,33 %
3	Pendidikan Kesetaraan	59,53 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 berdasarkan Raport Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia sebesar **70,49% dengan kategori tuntas pratama** sedangkan capaian berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagri, untuk PAUD tercapai 57,45%, dari perbandingan 100% maka ada sekitar 42,55% dalam hal ini jika dilihat dari data berarti Proporsi peserta didik usia 5-6 tahun terhadap penduduk kelompok usia 5-6 tahun di Lampung Barat masih kurang.

Untuk Capaian Pendidikan Dasar berdasarkan hasil entry pada aplikasi Bangda Kemendagri adalah sebesar 95,33%, jika dilihat dari ketercapaian Pendidikan Dasar dapat dikategorikan Tinggi, sedangkan Capaian Pendidikan Kesetaraan masih rendah pada tahun 2024 dengan capaian 59,53%. Dalam hal ini Langkah-langkah yang harus dilakukan Kabupaten Lampung Barat untuk meningkatkan ketercapaian SPM dengan melakukan berbagai pembenahan diantaranya melakukan sinkron data antara Disdukcapil dengan Data Pokok Pendidikan ataupun melakukan pendataan mandiri dengan melibatkan kecamatan/pekon, Membangun Kerjasama dengan Masyarakat akan Pentingnya Pendidikan, Pemberian biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus, Penyediaan layanan pendidikan di daerah yang kekurangan daya tampung, Pengajuan formasi guru ASN ataupun melakukan penataan/pemetaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.90. Rincian Capaian SPM Urusan Kesehatan

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88,80 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	98,96 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,48 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	94,95 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	93,16 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	95,08 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	96,14 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	91,19 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	89,92 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	94,46 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92,78 %

No	URAIAN	CAPAIAN
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	85,43 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Urusan Kesehatan pada tahun 2024 berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagr sebesar 93,11% dengan kategori pencapaian Tuntas Utama. Hasil pencapaian rata-rata dari 12 indikator kinerja/ jenis layanan SPM kesehatan ini diperoleh dari hasil jumlah persentase pencapaian layanan dasar dengan bobot 80% dan persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dengan bobot 20%. Hal yang sangat berpengaruh pada nilai capaian SPM urusan Kesehatan ini adalah belum tercapainya secara maksimal terhadap pencapaian penerima layanan dasar pada setiap indikator kinerjanya. Pencapaian penerima layanan dasar terendah terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) yaitu sebesar 66,68% sedangkan pencapaian tertinggi terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif yaitu sebesar 99,47%. Selanjutnya Pencapaian mutu minimal layanan dasar terendah terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yaitu sebesar 14,55% sedangkan pencapaian tertinggi terdapat pada indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut yaitu sebesar 20,00%.

Tabel 2.91. Rincian Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	85,73 %
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	97,25 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum pada tahun 2024 berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagr sebesar 91,49% dengan kategori pencapaian Tuntas Utama. Dapat dijelaskan bahwa nilai capaian SPM urusan Pekerjaan Umum pada capaian indikator Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik sebesar 97,25% dengan pencapaian penerima layanan dasar sebesar 77,80% ditambah dengan pencapaian mutu minimal layanan dasarnya sebesar 19,45%. Selanjutnya nilai capaian SPM urusan Pekerjaan Umum pada capaian indikator Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari sebesar 85,73% dengan pencapaian penerima layanan dasar sebesar 70,78% ditambah dengan pencapaian mutu minimal layanan dasarnya sebesar 14,94%.

Tabel 2.92. Rincian Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0 %

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Capaian SPM Urusan Perumahan rakyat pada tahun 2024 berdasarkan hasil entry pada aplikasi SPM Bangda Kemendagr sebesar 50%% dengan kategori pencapaian Belum Tuntas. Dapat dijelaskan bahwa nilai capaian SPM urusan Perumahan rakyat belum tuntas dikarenakan pencapaian indikator kinerja Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar 0% yang diakibatkan pada entry aplikasi SPM membutuhkan penjelasan dan penginputan berkenaan dengan 4 tahapan SPM yaitu bukti dukung pendataan, perhitungan, perencanaan, dan pelaksanaan. Hal ini belum dilakukan pada urusan perumahan rakyat sehingga disaat Pemerintah Daerah tidak mempunyai program relokasi yang dianggarkan dalam APBD maka pada aplikasi SPM meminta untuk melampirkan form 4 tahapan SPM tersebut. Sedangkan pada indikator Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota mencapai nilai 100% walaupun tidak ada pelaksanaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana. Hal ini dikarenakan Anggaran rehabilitasi rumah bagi korban bencana telah dianggarkan dalam APBD dan telah melampirkan SK bencana pada tahun 2024 dalam aplikasi SPM.

Tabel 2.93. Rincian Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	95,33 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	94,20 %
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	89,93 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	96,60 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	100 %

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mencapai 95,33%. Nilai ini diperoleh dari hasil persentase pencapaian penerima layanan dasar sebesar 80% dan persentase pencapaian mutu layanan dasar sebesar 15,33%.

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar urusan bencana pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 pada Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana mencapai 94.20% dengan rincian sebagai berikut:

1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) dengan target 1 dokumen, dapat direalisasikan pada triwulan ke IV, persentase capaian 100%
2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana dengan target 312.990 orang, terealisasi 312.990 orang, persentase capaian sebesar 100% yang teridentifikasi sesuai dengan informasi yang tertulis dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana
3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia), dengan target 176 orang terealisasi 164 orang, persentase capaian sebesar 93.18%,
4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana dengan target 30 Unit, terealisasi sebanyak 30 Unit dengan persentase capaian 100%.

Realisasi pencapaian SPM jenis pelayanan dasar Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (damkar) mencapai nilai 100%. Nilai ini diperoleh dari hasil pencapaian penerima layanan dasar yang sesuai target total yang harus dilayani sebanyak 120 orang dan pencapaian mutu layanan dasar sebesar 100%.

Realisasi pencapaian SPM urusan bencana pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 pada indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai 89.93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti: tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) target pengadaan sarana dan prasarana tahun 2024 sebanyak 38 Unit terealisasi 38 unit dengan persentase capaian 100%. Progres kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana pada triwulan ke IV sudah sesuai dengan KAK dan Anggaran Kas yang telah disusun termasuk pemasangan 30 Rambu evakuasi bencana.
2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana) Pada kegiatan Pelatihan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan target peserta 26 orang di Kecamatan Balik Bukit namun hanya terelisasi sebanyak 14 Peserta.

Realisasi pencapaian SPM urusan bencana pada Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 pada indikator Pelayanan Pencegahan dan

Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencapai 89.93% dengan rincian sebagai berikut:

1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana), pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana), target pada tahun 2024 sebanyak 2 orang, namun ada 5 orang yang menjadi korban bencana, baik bencana alam maupun non alam
3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) target pada tahun 2024 sebanyak 1 Dokumen terealisasi sebanyak 18 Dokumen
4. Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (respon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam) pada Tahun 2024 tidak ada kegiatan Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas
5. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana, target pada tahun 2024 sebanyak 2 orang, namun ada 5 orang yang menjadi korban bencana, baik bencana alam maupun non alam

Tabel 2.94. Rincian Capaian SPM Urusan Sosial

No	URAIAN	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	95,38 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	91,67 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	93,85 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	88,33 %
5	Pelindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	92,00 %

Sumber : Sekretariat Daerah, 2025

Dari 5 jenis indikator kinerja dan jenis pelayanan dasar SPM bidang sosial sudah hampir tercapai semua target dan realisasinya. Seluruh persentase pencapaian penerima layanan dasar mencapai nilai 80%, akan tetapi pada pencapaian mutu/Jasa/SDM pada layanan dasar SPM tidak dapat terisi semua sehingga formulasi pada pencapaian total dalam aplikasi tidak mencapai nilai 100% mengikuti jumlah mutu layanan yang terisi. Contohnya untuk SPM lansia, hanya diberikan permakannya saja tapi tidak memberikan sandang pengobatan dan lain sebagainya.

2.1.6 Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah menjadi salah satu aspek strategis yang diintegrasikan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, sinergi antar daerah maupun dengan berbagai pihak eksternal menjadi kunci utama untuk mendorong pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kabupaten Lampung Barat menyadari bahwa berbagai tantangan pembangunan yang kompleks tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri, sehingga diperlukan kerjasama yang kokoh dan berkelanjutan dengan berbagai mitra strategis.

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengupayakan kerjasama yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah guna memperkuat kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik. Kerjasama ini meliputi kolaborasi dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota tetangga, pemerintah pusat, hingga lembaga swasta dan masyarakat sipil. Melalui sinergi tersebut, diharapkan dapat tercipta efisiensi sumber daya, pertukaran informasi, serta inovasi bersama yang menunjang percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Selain itu, kerjasama daerah juga diarahkan untuk memperluas akses investasi dan meningkatkan daya saing Kabupaten Lampung Barat di tingkat regional maupun nasional. Pemerintah daerah secara aktif menjalin kemitraan strategis dengan pelaku usaha, lembaga keuangan, serta lembaga internasional yang memiliki kepentingan dan visi yang sejalan dengan program pembangunan Kabupaten. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru, memperkuat basis industri lokal, serta menciptakan lapangan kerja yang berkualitas bagi masyarakat.

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, kerjasama daerah juga menjadi pijakan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melakukan kolaborasi dengan daerah sekitarnya dalam mengelola kawasan hutan, sumber daya air, dan ekosistem penting lainnya secara terpadu. Hal ini akan membantu mengatasi permasalahan lingkungan yang bersifat lintas batas wilayah dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan ekologis.

Kerjasama daerah dalam RPJMD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan administratif, melainkan sebagai strategi pembangunan yang fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Melalui penguatan kemitraan dan sinergi dengan berbagai pihak, Kabupaten Lampung Barat optimis dapat mewujudkan pembangunan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi daerah. Kerjasama yang terjalin diharapkan

menjadi fondasi kokoh dalam menghadapi dinamika pembangunan di masa depan.

2.1.7 Rencana Pembangunan Infrastruktur oleh APBN dan/atau APBD Provinsi di Kabupaten Lampung Barat

Dukungan anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD Provinsi menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Lampung Barat. Sumber pembiayaan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk merealisasikan berbagai program strategis yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD. Tanpa dukungan pendanaan yang memadai, berbagai inisiatif pembangunan akan sulit terealisasi secara optimal, sehingga berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

APBN dan APBD Provinsi tidak hanya berperan sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai wujud komitmen pemerintah pusat dan provinsi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Keterpaduan antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah melalui alokasi anggaran yang tepat sasaran dapat menciptakan sinergi yang kuat. Hal ini memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan dan menghindari tumpang tindih program, sehingga target pembangunan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Lebih jauh, dukungan dari APBN dan APBD Provinsi menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan, mulai dari peningkatan infrastruktur, pelayanan publik, hingga pemberdayaan masyarakat. Dengan alokasi anggaran yang memadai, Kabupaten Lampung Barat dapat melaksanakan program prioritas yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, sinergi dan koordinasi yang baik dalam pengelolaan anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Berikut adalah daftar 10 program prioritas yang perlu didanai oleh APBN dan APBD Provinsi Lampung Barat selama periode 2026–2030 :

1. Pengembangan Pasar Tematik Danau Ranau

Pasar Tematik Danau Ranau, yang terletak di Kecamatan Lumbok Seminung, merupakan proyek strategis yang menggabungkan sektor pariwisata, perdagangan, dan budaya. Dengan anggaran sebesar Rp70 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK), pasar ini diharapkan menjadi pusat ekonomi kreatif yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Pembangunan fisik pasar telah mencapai 30% pada Oktober 2024, dan ditargetkan selesai pada Desember 2024. Setelah selesai, pasar ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Selain sebagai pusat perdagangan, pasar tematik ini juga berfungsi sebagai destinasi wisata yang memperkenalkan produk lokal dan budaya Lampung Barat. Dengan adanya integrasi antara pasar dan sektor pariwisata, diharapkan dapat tercipta lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan daerah. Kerjasama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat setempat sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan program ini.

2. Pembangunan Wisma Sindalapai sebagai Tourist Information Centre

Wisma Sindalapai, yang terletak di kawasan wisata Lumbok Seminung, berfungsi sebagai pusat informasi bagi wisatawan yang berkunjung ke Lampung Barat. Sebagai bagian dari pengembangan sektor pariwisata, wisma ini menyediakan informasi mengenai destinasi wisata, akomodasi, dan budaya lokal. Dengan fasilitas yang memadai, Wisma Sindalapai diharapkan dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dan memperkuat citra Lampung Barat sebagai destinasi wisata unggulan.

Pembangunan dan pengelolaan Wisma Sindalapai memerlukan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD Provinsi untuk memastikan fasilitas yang berkualitas dan pelayanan yang optimal. Selain itu, pelatihan bagi staf pengelola juga penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan informasi dan layanan kepada wisatawan.

3. Peningkatan Infrastruktur Jalan Trans Sumatera

Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan Trans Sumatera di Lampung Barat sangat krusial untuk mendukung mobilitas barang dan orang. Dengan akses yang lebih baik, diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi hasil pertanian, dan menarik investasi ke daerah. Pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai guna merealisasikan proyek ini.

Selain itu, perawatan dan pemeliharaan rutin terhadap jalan yang telah dibangun juga penting untuk memastikan keberlanjutan fungsi infrastruktur tersebut. Partisipasi masyarakat dalam menjaga fasilitas umum juga diperlukan untuk mencegah kerusakan dan memastikan jalan tetap dalam kondisi baik.

4. Pembangunan Jaringan Irigasi Pertanian

Lampung Barat memiliki sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Untuk mendukung produktivitas pertanian, pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi sangat diperlukan. Dengan sistem irigasi yang efisien, petani dapat mengelola sumber daya air dengan baik, meningkatkan hasil pertanian, dan mengurangi risiko gagal panen akibat kekeringan.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi, serta menyediakan pelatihan bagi petani dalam pengelolaan sumber daya air. Kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat juga penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

5. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan

Peningkatan kualitas SDM merupakan kunci untuk mendorong pembangunan daerah. Melalui program pendidikan dan pelatihan, diharapkan dapat mencetak tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di dunia kerja. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyelenggarakan program yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

Selain itu, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu juga penting untuk memastikan akses pendidikan yang merata. Dengan SDM yang berkualitas, Lampung Barat dapat mengembangkan berbagai sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah.

6. Pembangunan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Rumah Sakit

Akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan rumah sakit di Lampung Barat sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan menurunkan angka kematian akibat penyakit.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan, perawatan, dan pengadaan peralatan medis. Selain itu, peningkatan kapasitas tenaga medis melalui pelatihan dan pendidikan juga penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang optimal.

7. Pembangunan Jaringan Telekomunikasi dan Internet

Di era digital, akses terhadap informasi dan komunikasi sangat penting. Pembangunan jaringan telekomunikasi dan internet di Lampung Barat akan membuka peluang bagi masyarakat untuk mengakses informasi, pendidikan, dan layanan publik secara online. Selain itu, jaringan internet yang baik juga mendukung perkembangan sektor ekonomi digital dan UMKM.

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas jangkauan jaringan, terutama di daerah-daerah terpencil. Dengan dukungan pendanaan dari APBN

dan APBD Provinsi, diharapkan infrastruktur telekomunikasi di Lampung Barat dapat berkembang pesat.

8. Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Berkelanjutan

Lampung Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti hutan, pertambangan, dan perikanan. Untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatannya, diperlukan pengelolaan yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan dan regulasi yang mendukung pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pelestariannya.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan juga sangat diperlukan. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya alam dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

9. Peningkatan Kualitas Pendidikan melalui Infrastruktur dan Kurikulum

Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi untuk pembangunan daerah. Peningkatan infrastruktur pendidikan seperti pembangunan gedung sekolah, laboratorium, dan perpustakaan sangat diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Selain itu, pembaruan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman juga penting untuk mencetak generasi yang kompeten.

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas pendidikan, serta penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri dan teknologi. Dengan pendidikan yang berkualitas, diharapkan dapat tercipta SDM yang unggul dan siap menghadapi tantangan global.

10. Pembangunan Infrastruktur Energi Terbarukan

Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan sumber energi yang ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan panel surya di Lampung Barat dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga mendukung upaya mitigasi perubahan iklim.

Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional untuk mendapatkan pendanaan dan teknologi dalam pembangunan infrastruktur energi terbarukan. Dengan dukungan APBN dan APBD Provinsi, diharapkan Lampung Barat dapat menjadi daerah yang mandiri dalam penyediaan energi.

2.1.8 BUMD Yang Mendukung Kinerja Pelayanan Pemda

Kabupaten Lampung Barat memiliki beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berperan penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. BUMD ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi lokal, penyedia layanan publik, dan mitra strategis dalam implementasi program-program pembangunan.

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Lampung Barat didirikan pada 15 September 2015, BPRS ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembiayaan berbasis syariah, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan prinsip kehati-hatian dan fokus pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, BPRS diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat sektor riil di Lampung Barat.

Selain itu, PT. Pesagi Mandiri Perkasa juga memiliki peran strategis dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Sebagai pengelola destinasi wisata dan pusat ekonomi lokal, PT. Pesagi Mandiri Perkasa dapat mendukung program-program unggulan dalam RPJMD, seperti pengembangan pasar tematik dan destinasi wisata berbasis budaya. Dengan penguatan kapasitas dan profesionalisme, BUMD ini dapat menjadi mitra utama dalam meningkatkan daya tarik wisata dan kontribusi ekonomi daerah.

Perumda Air Minum Limau Kunci merupakan BUMD yang fokus pada penyediaan layanan air bersih bagi masyarakat. Dalam konteks RPJMD, peran Perumda ini sangat vital dalam mendukung program pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional, Perumda dapat memastikan akses air bersih yang merata dan berkualitas, yang merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan berkelanjutan.

PT. Bank Lampung juga berperan dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan layanan perbankan dan pembiayaan. Sebagai mitra strategis, PT. Bank Lampung dapat berkolaborasi dengan BUMD lainnya dalam mendanai proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah. Sinergi antara BUMD ini akan memperkuat kapasitas keuangan daerah dan mempercepat realisasi program-program dalam RPJMD.

Secara keseluruhan, BUMD di Lampung Barat memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Dengan peran strategis masing-masing, BUMD ini dapat berkolaborasi secara

sinergis untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Peningkatan kapasitas, profesionalisme, dan akuntabilitas BUMD menjadi kunci utama dalam memastikan kontribusi positif mereka terhadap pembangunan daerah.

2.2. Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran Ringkas Kondisi Keuangan Daerah Lima Tahun Terakhir

Kinerja Pelaksanaan APBD

Tabel 2.95.
Realisasi APBD Tahun 2020 s/d Tahun 2024
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1.	PENDAPATAN DAERAH	1,011,011,754,760	1,007,143,618,928	1,024,279,168,592	985,835,507,765	1,111,191,957,434
5.1.1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	61,219,465,454	71,498,892,558	70,315,342,633	68,747,829,755	71,823,776,728
5.1.1.1.1.	Pajak Daerah	11,794,800,883	13,052,711,728	14,390,450,282	14,854,325,262	15,820,932,765
5.1.1.1.2.	Retribusi Daerah	3,018,063,766	3,516,611,279	2,237,859,703	2,305,628,800	2,166,946,349
5.1.1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	4,809,979,700	5,923,153,837	5,569,077,716	5,653,827,321	5,854,018,935
5.1.1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	41,596,621,105	49,006,415,713	48,117,954,933	45,934,048,372	47,981,878,679
5.1.1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	895,400,401,306	899,997,134,370	941,241,799,959	917,087,678,010	1,039,368,180,706
5.1.1.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	707,243,876,702	844,790,713,397	870,256,487,463	855,646,664,112	956,625,034,394
5.1.1.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62,140,456,604	55,206,420,973	70,985,312,496	61,441,013,898	82,743,146,312
5.1.1.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya	126,016,068,000	-	-	-	-
5.1.1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	54,391,888,000	35,647,592,000	12,722,026,000	-	-
5.1.1.3.1.	Hibah	-	-	12,722,026,000	-	-
5.1.1.3.2.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	54,391,888,000	35,647,592,000	-	-	-
5.1.2.	BELANJA DAERAH	984,638,003,140	1,025,317,695,529	1,081,589,995,536	984,408,509,394	1,068,232,029,401
5.1.2.1.	BELANJA OPERASI	636,827,545,344	709,118,209,923	715,281,044,749	693,087,941,502	734,513,264,699
5.1.2.1.1.	Belanja Pegawai	424,325,254,536	399,752,460,194	395,256,776,924	413,304,423,702	444,086,680,344

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	198,758,705,808	283,144,415,580	293,591,618,382	243,672,753,950	247,658,956,652
5.1.2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	4,469,946,021	3,555,499,062	2,534,971,060
5.1.2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	522,500,000	-	-
5.1.2.1.5.	Belanja Hibah	13,493,585,000	22,250,295,549	19,513,941,922	32,310,714,788	40,232,656,643
5.1.2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	250,000,000	3,971,038,600	1,926,261,500	244,550,000	-
5.1.2.2.	BELANJA MODAL	140,869,506,620	132,249,602,506	191,561,287,922	117,007,426,132	155,348,663,663
5.1.2.2.1.	Belanja Modal Tanah	239,570,000	1,152,130,400	-	-	-
5.1.2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	40,402,844,896	23,110,102,932	37,544,778,356	23,471,410,062	20,116,516,662
5.1.2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	42,336,328,293	35,286,366,461	41,842,220,791	20,128,517,180	88,928,047,259
5.1.2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	48,597,784,030	68,608,479,260	107,650,228,900	67,418,166,745	41,372,206,332
5.1.2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9,292,979,401	4,092,523,453	3,821,418,300	5,836,651,645	4,734,413,410
5.1.2.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	702,641,575	152,680,500	197,480,000
5.1.2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	22,108,088,093	2,220,535,100	2,417,830,965	1,508,132,360	1,961,201,439
5.1.2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	22,108,088,093	2,220,535,100	2,417,830,965	1,508,132,360	1,961,201,439
5.1.2.4.	BELANJA TRANSFER	184,832,863,083	181,729,348,000	172,329,831,900	172,805,009,400	176,408,899,600
5.1.2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	1,317,346,400	1,830,761,000	1,475,794,900	1,634,829,400	1,692,863,600
5.1.2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	183,515,516,683	179,898,587,000	170,854,037,000	171,170,180,000	174,716,036,000
	SURPLUS / (DEFISIT)	26,373,751,620	- 18,174,076,601	- 57,310,826,944	1,426,998,371	42,959,928,033
5.1.4.	PEMBIAYAAN					
5.1.4.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	35,251,996,908	77,278,865,778	114,951,176,859	48,174,340,190	30,683,213,321
5.1.4.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	35,251,996,908	57,625,748,528	56,959,356,109	48,174,340,190	30,683,213,321
5.1.4.1.2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	19,653,117,250	57,991,820,750	-	-
5.1.4.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	4,000,000,000	2,145,433,068	9,466,009,725	18,918,125,240	19,918,098,140
5.1.4.2.1.	Penyertaan Modal Daerah	4,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	1,000,000,000	2,000,000,000
5.1.4.2.2.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	145,433,068	7,466,009,725	17,918,125,240	17,918,098,140
		-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETO	31,251,996,908	75,133,432,710	105,485,167,134	29,256,214,950	10,765,115,181

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.5	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	57,625,748,528	56,959,356,109	48,174,340,190	30,683,213,321	53,725,043,214

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

Neraca Daerah

Tabel 2.96.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.3.1.	ASET					
5.3.1.1.	A. Aset Lancar	92,790,480,221	96,424,355,015	76,200,542,730	92,436,350,840	125,023,378,725
5.3.1.2.	B. Investasi Jangka Panjang	39,151,070,830	40,961,012,190	41,955,870,815	41,330,213,726	42,716,307,711
5.3.1.3.	C. Aset tetap	2,370,966,719,945	2,372,746,206,811	2,540,752,455,850	2,558,944,191,578	2,540,973,890,596
5.3.1.5.	D. Aset Lainnya	132,469,111,769	136,382,645,507	184,239,405,289	225,439,714,024	197,386,200,458
	JUMLAH ASET	2,635,377,382,764	2,646,514,219,524	2,843,148,274,683	2,918,150,470,168	2,906,099,777,491
5.3.2.	KEWAJIBAN					
5.3.2.1.	A. Kewajiban Jangka Pendek	9,676,234,788	17,404,915,165	24,112,385,891	29,937,934,224	39,433,935,209
5.3.2.2.	B. Kewajiban jangka Panjang	302,089,601	17,763,394,438	52,261,014,935	34,342,951,595	16,424,888,255
	JUMLAH KEWAJIBAN	9,978,324,389	35,168,309,603	76,373,400,826	64,280,885,819	55,858,823,464
5.3.3.	EKUITAS	2,625,399,058,375	2,611,345,909,921	2,766,774,873,858	2,853,869,584,349	2,850,240,954,026
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,635,377,382,764	2,646,514,219,524	2,843,148,274,683	2,918,150,470,168	2,906,099,777,491

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2025

Kerangka Pendanaan

Tabel 2.97.
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2025 s.d 2030
Kabupaten Lampung Barat

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	1,107,753,893,942	1,272,428,583,097	1,377,199,691,827	1,472,605,624,231	1,576,770,374,279	1,688,638,690,078
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,878,015,942	89,348,778,171	94,709,704,861	100,392,287,154	106,415,824,382	112,800,773,844
1.1.1	Pajak Daerah	35,238,479,989	31,341,407,075	33,221,891,500	35,215,204,990	37,328,117,289	39,567,804,326
1.1.2	Retribusi Daerah	42,942,841,783	2,627,577,557	2,785,232,211	2,952,346,144	3,129,486,912	3,317,256,126
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5,854,018,934	6,352,640,377	6,733,798,799	7,137,826,727	7,566,096,331	8,020,062,111
1.1.4	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5,842,675,236	49,027,153,162	51,968,782,351	55,086,909,293	58,392,123,850	61,895,651,280
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1,017,875,878,000	1,183,079,804,926	1,282,489,986,966	1,372,213,337,077	1,470,354,549,897	1,575,837,916,235
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	936,357,070,000	1,126,819,538,036	1,222,854,104,063	1,308,999,301,200	1,403,347,671,867	1,504,810,625,522
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	81,518,808,000	56,260,266,890	59,635,882,903	63,214,035,877	67,006,878,030	71,027,290,712

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-	-	-
1.3.1	Hibah						
1.3.2	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya						
1.3.2	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus						
5	BELANJA DAERAH	1,104,835,231,322	1,257,509,920,477	1,380,199,691,827	1,475,605,624,231	1,579,770,374,279	1,691,638,690,078
5.1	BELANJA OPERASI	815,125,033,734	950,417,111,034	1,054,681,313,817	1,130,556,143,541	1,214,017,924,747	1,303,941,093,574
5.1.01	Belanja Pegawai	498,508,061,452	528,418,545,139	560,123,657,847	593,731,077,318	629,354,941,957	667,116,238,475
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	297,574,355,239	401,813,391,829	473,161,371,460	514,145,004,642	560,622,117,514	611,341,537,908
5.1.03	Belanja Bunga	3,079,314,290	3,264,073,147	3,459,917,536	3,667,512,588	3,887,563,344	4,120,817,144
5.1.05	Belanja Hibah	15,933,302,753	16,889,300,918	17,902,658,973	18,976,818,512	20,115,427,622	21,322,353,280
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	30,000,000	31,800,000	33,708,000	35,730,480	37,874,309	40,146,767
5.2	BELANJA MODAL	113,081,887,138	119,866,800,366	127,058,808,388	134,682,336,892	142,763,277,105	151,329,073,731
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,030,913,276	28,652,768,073	30,371,934,157	32,194,250,206	34,125,905,219	36,173,459,532
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	28,249,915,928	29,944,910,884	31,741,605,537	33,646,101,869	35,664,867,981	37,804,760,060
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52,714,541,704	55,877,414,206	59,230,059,059	62,783,862,602	66,550,894,358	70,543,948,020

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4,716,516,230	4,999,507,204	5,299,477,636	5,617,446,294	5,954,493,072	6,311,762,656
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	370,000,000	392,200,000	415,732,000	440,675,920	467,116,475	495,143,464
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2,147,413,550	2,276,258,363	2,412,833,865	2,557,603,897	2,711,060,130	2,873,723,738
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2,147,413,550	2,276,258,363	2,412,833,865	2,557,603,897	2,711,060,130	2,873,723,738
5.4	BELANJA TRANSFER	174,480,896,900	184,949,750,714	196,046,735,757	207,809,539,902	220,278,112,296	233,494,799,034
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3,770,299,900	3,996,517,894	4,236,308,968	4,490,487,506	4,759,916,756	5,045,511,761
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	170,710,597,000	180,953,232,820	191,810,426,789	203,319,052,397	215,518,195,540	228,449,287,273
	Jumlah Belanja	1,104,835,231,322	1,257,509,920,477	1,380,199,691,827	1,475,605,624,231	1,579,770,374,279	1,691,638,690,078
	Total Surplus/(Defisit)	2,918,662,620	14,918,662,620	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)	(3,000,000,000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(2,918,662,620)	(14,918,662,620)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	17,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19,918,662,620	19,918,662,620	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

No	Uraian	Baseline Tahun 2025 (Rp)	Proyeksi Tahun 2026 (Rp)	Proyeksi Tahun 2027 (Rp)	Proyeksi Tahun 2028 (Rp)	Proyeksi Tahun 2029 (Rp)	Proyeksi Tahun 2030 (Rp)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	17,918,662,620	17,918,662,620	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	17,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	19,918,662,620	19,918,662,620	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
	Pembiayaan Netto	(2,918,662,620)	(14,918,662,620)	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

2.3. Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah masalah yang harus dihadapi oleh suatu wilayah. Permasalahan pembangunan daerah memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan sektor publik untuk mengatasi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi saat meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan infrastruktur suatu wilayah.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah terbagi ke dalam berbagai aspek, sebagai berikut :

Aspek SDM

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial dan pengangguran. Pada tahun 2024 angka kemiskinan sebesar 10,68%.

Belum optimalnya upaya penanggulangan kemiskinan, permasalahan sosial, dan pengangguran menjadi tantangan utama dalam pembangunan Lampung Barat. Berdasarkan data tahun 2024, angka kemiskinan mencapai 10,68%, menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif dan terintegrasi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Selain itu, tingginya tingkat pengangguran dan berbagai persoalan sosial, seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan kesehatan, memperburuk kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Lampung Barat 2025–2029 harus difokuskan pada program-program inovatif, seperti peningkatan investasi di sektor padat karya, penguatan UMKM, serta perluasan akses layanan sosial dasar yang berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun 2024 rata-rata lama sekolah sebesar 8,56 tahun.

Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi salah satu tantangan pembangunan di Lampung Barat. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah tercatat hanya 8,56 tahun, yang menunjukkan banyaknya penduduk yang belum menyelesaikan pendidikan menengah atas. Kondisi ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing daerah. Penyusunan RPJMD 2025–2029 perlu mengutamakan program yang mendorong aksesibilitas pendidikan, seperti beasiswa, peningkatan infrastruktur pendidikan, dan kampanye kesadaran pentingnya pendidikan untuk masa depan.

3. Tingkatnya apresiasi terhadap budaya lokal masih rendah. Pada tahun 2024 persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi baru mencapai 12,25%.
Kurangnya apresiasi terhadap budaya lokal di Lampung Barat menjadi tantangan serius untuk melestarikan identitas dan kekayaan budaya daerah. Hingga tahun 2024, hanya 12,25% warisan budaya tak benda yang berhasil disertifikasi, mencerminkan rendahnya upaya pengelolaan dan pelestarian budaya. Dalam RPJMD 2025–2029, perlu ada perhatian khusus pada penguatan identitas budaya melalui sertifikasi warisan budaya, pengembangan festival budaya lokal, serta pemberdayaan komunitas seni untuk meningkatkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan leluhur.
4. Belum optimalnya kualitas kesehatan Masyarakat. Pada tahun 2024 angka harapan hidup sebesar 73,96%.
Kualitas kesehatan masyarakat Lampung Barat masih membutuhkan perhatian serius. Pada tahun 2024, angka harapan hidup mencapai 73,96%, yang masih bisa ditingkatkan melalui berbagai langkah strategis. Penyusunan RPJMD 2025–2029 harus mencakup program peningkatan akses layanan kesehatan, pembangunan fasilitas kesehatan yang merata di seluruh wilayah, serta kampanye gaya hidup sehat untuk mendorong masyarakat menjalani pola hidup lebih baik.
5. Belum optimalnya Pembangunan pemuda. Pada tahun 2024 indeks Pembangunan pemuda baru mencapai 61,84%.
Pembangunan pemuda di Lampung Barat belum menunjukkan hasil yang maksimal. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada tahun 2024 baru mencapai 61,84%, menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar pada sektor pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pemuda. Dalam RPJMD 2025–2029, program-program yang menargetkan peningkatan kapasitas pemuda, seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses modal usaha, dan wadah kreativitas pemuda, perlu mendapatkan prioritas untuk menciptakan generasi yang mandiri dan kompetitif.
6. Belum optimalnya pemberdayaan gender. Pada tahun 2023, indeks pemberdayaan gender baru mencapai 65,92%.
Pemberdayaan gender di Lampung Barat juga masih memerlukan perhatian, dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2023 sebesar 65,92%. Angka ini mencerminkan perlunya penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, dan sosial. RPJMD 2025–2029 harus memuat kebijakan yang mendorong kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, peningkatan partisipasi perempuan di sektor ekonomi formal, serta perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak.

7. Belum terjaganya keamanan dan ketahanan pangan. Pada tahun 2024, indeks ketahanan pangan baru mencapai 76,18%. Keamanan dan ketahanan pangan di Lampung Barat juga belum sepenuhnya terjaga, dengan indeks ketahanan pangan pada tahun 2024 sebesar 76,18%. Hal ini menunjukkan perlunya langkah konkret dalam memperkuat sistem pangan yang berkelanjutan. Penyusunan RPJMD 2025–2029 perlu memprioritaskan program diversifikasi pangan lokal, peningkatan produktivitas pertanian, pengelolaan rantai distribusi, serta edukasi masyarakat tentang pola konsumsi sehat dan bergizi untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih baik.

Aspek Ekonomi

1. Rendahnya PDRB perkapita. Pada tahun 2024, PDRB perkapita baru mencapai RP.31,35 juta.
Rendahnya PDRB per kapita di Lampung Barat mencerminkan masih terbatasnya aktivitas ekonomi dan tingkat produktivitas masyarakat. Pada tahun 2024, PDRB per kapita hanya mencapai Rp31,35 juta, angka ini masih jauh dari potensi maksimal yang dapat dicapai daerah. Dalam RPJMD 2025–2029, diperlukan kebijakan yang mendorong investasi, pengembangan sektor unggulan, dan penguatan ekonomi lokal untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata.
2. Peningkatan produksi dan pengelolaan hasil perikanan belum optimal. Pada tahun 2024, produksi perikanan baru mencapai 10.768,56 ton.
Produksi dan pengelolaan hasil perikanan di Lampung Barat masih menghadapi berbagai kendala, dengan total produksi perikanan pada tahun 2024 hanya mencapai 10.768,56 ton. Optimalisasi sektor ini melalui pengembangan teknologi budidaya, pelatihan bagi nelayan, dan peningkatan akses pasar dapat menjadi strategi penting dalam RPJMD 2025–2029 untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap perekonomian daerah.
3. Belum optimalnya produksi pertanian. Pada tahun 2024, produksi kopi sebesar 2.979,5 ton.
Produksi kopi sebagai salah satu komoditas unggulan Lampung Barat pada tahun 2024 hanya mencapai 2.979,5 ton, menandakan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. RPJMD 2025–2029 harus mencakup program peningkatan produktivitas melalui akses bibit unggul, pelatihan petani, dan peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan pertanian dan irigasi, untuk memacu pertumbuhan sektor pertanian.

Aspek Pemerintahan

1. Belum optimalnya pencapaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2023, nilai SAKIP baru mencapai 67,25 poin.
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Lampung Barat pada tahun 2023 hanya mencapai nilai 67,25 poin, menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola pemerintahan. RPJMD 2025–2029 harus memuat strategi penguatan kapasitas aparatur, peningkatan transparansi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
2. Masih tingginya potensi bencana di Lampung Barat. Pada tahun 2024, indeks resiko bencana sebesar 176,28 poin.
Indeks risiko bencana di Lampung Barat pada tahun 2024 mencapai 176,28 poin, menunjukkan ancaman tinggi terhadap keselamatan dan keberlanjutan pembangunan. RPJMD 2025–2029 perlu mencakup langkah mitigasi yang komprehensif, seperti penguatan infrastruktur tahan bencana, edukasi masyarakat, dan pengembangan sistem peringatan dini untuk mengurangi dampak bencana.
3. Masih rendahnya daya saing daerah. Pada tahun 2024, indeks daya saing daerah baru mencapai 3,42 poin.
Indeks daya saing Lampung Barat pada tahun 2024 baru mencapai 3,42 poin, menandakan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kompetitivitas daerah. Dalam RPJMD 2025–2029, perlu dilakukan pengembangan sektor unggulan, peningkatan konektivitas, dan penyediaan fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi berdaya saing tinggi.
4. Belum optimalnya indeks inovasi daerah. Pada tahun 2024, indeks inovasi daerah baru mencapai 69,93 poin.
Dengan indeks inovasi daerah sebesar 69,93 poin pada tahun 2024, Lampung Barat perlu mendorong pengembangan ide-ide kreatif untuk memacu pembangunan. RPJMD 2025–2029 harus mencakup program pengembangan pusat inovasi, kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha, serta dukungan terhadap penggunaan teknologi inovatif.

Aspek Infrastruktur

1. Belum optimalnya capaian infrastruktur. Pada tahun 2024, indeks kualitas layanan infrastruktur baru mencapai 62,71 persen.
Indeks kualitas layanan infrastruktur pada tahun 2024 baru mencapai 62,71 persen, menunjukkan masih terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan dasar. RPJMD 2025–2029 harus memprioritaskan pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, sanitasi, dan energi, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2. Masih rendahnya pencapaian desa mandiri. Pada tahun 2024, desa mandiri baru mencapai 63 desa.
 ingga tahun 2024, jumlah desa mandiri di Lampung Barat baru mencapai 63 desa. RPJMD 2025–2029 perlu mempercepat transformasi desa melalui program pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar untuk memperluas jumlah desa mandiri.
3. Masih rendahnya jumlah smartvillage. Pada tahun 2024, smartvillage baru mencapai 7 pekon.
 Dengan hanya 7 pekon yang tergolong sebagai smart village pada tahun 2024, Lampung Barat perlu mempercepat digitalisasi desa. RPJMD 2025–2029 harus mencakup pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan pelatihan digital untuk masyarakat desa agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing lokal.

Aspek Lingkungan Hidup

1. Belum optimalnya pencapaian indeks lingkungan hidup. Pada tahun 2024, indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,09 poin.
 Indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 73,09 poin pada tahun 2024 menunjukkan perlunya langkah strategis dalam pengelolaan lingkungan. RPJMD 2025–2029 harus memuat program pengurangan polusi, rehabilitasi ekosistem, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan.
2. Belum termanfaatkannya Energi Baru Terbarukan (Panas Bumi, air, surya, biogas, angin) secara maksimal. Potensi EBT pada PLTA Way Besai yaitu dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan PT. Adimitra Energi Hidro dengan kapasitas 2 x 3 Mwe. Potensi pemanfaatan sungai Way Semaka sebagai sumber energi listrik antara lain dilakukan oleh PT. Tiga Oregon Putra dengan kapasitas 7,7 MWe, PT. Lampung Hidro Energi dengan kapasitas 2x3,5 MWe, PT Semaka Hidro Energi I kapasitas 5 MWe, PT Semaka Hidro Energi II kapasitas 7 MWe, dan PT. Energi Hidro Investama dengan kapasitas 2x5 Mwe.
 Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Lampung Barat, seperti PLTA Way Besai dengan kapasitas 2 x 45 MWe dan beberapa proyek lainnya, masih belum dimanfaatkan secara maksimal. RPJMD 2025–2029 harus memprioritaskan percepatan pemanfaatan EBT melalui investasi, pengembangan teknologi, dan kemitraan dengan pihak swasta untuk mendorong Lampung Barat menjadi daerah yang berkelanjutan dan mandiri energi.
3. Masih rendahnya pengelolaan sampah. Jumlah Sampah terkelola di fasilitas Pengelolaan Sampah baru terkelola dari 11 % sampai 34% dilaporkan di Neraca Pengelolaan sampah setiap tahun.

Isu strategis daerah

Fokus ke Kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, cerdas

1. **Belum Optimalnya Penanggulangan Kemiskinan dan Permasalahan Sosial**
Lampung Barat masih menghadapi tantangan signifikan dalam penanggulangan kemiskinan dan permasalahan sosial. Dengan tingkat kemiskinan sebesar 10,68% pada tahun 2024, diperlukan strategi komprehensif melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan akses layanan dasar, serta perlindungan sosial yang terintegrasi untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.
2. **Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Menempuh Jenjang Pendidikan yang Lebih Tinggi**
Kesadaran masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi masih rendah, dengan rata-rata lama sekolah hanya 8,56 tahun pada tahun 2024. Perlu ada kampanye dan program beasiswa yang lebih luas untuk mendorong minat melanjutkan pendidikan sebagai langkah meningkatkan kualitas SDM.
3. **Rendahnya Angka Partisipasi Sekolah**
Tingkat partisipasi sekolah masih belum merata, terutama pada kelompok usia pendidikan menengah dan tinggi. Upaya peningkatan harus difokuskan pada penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai dan penguatan program afirmasi bagi kelompok rentan.
4. **Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan**
Kualitas dan kuantitas tenaga pendidik menjadi salah satu pilar utama peningkatan mutu pendidikan. Program pelatihan berkelanjutan dan pengangkatan tenaga pendidik berbasis kompetensi sangat diperlukan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik di seluruh wilayah.
5. **Terdegradasinya Budaya Lokal Akibat Pengaruh Budaya Luar**
Pengaruh budaya luar mengakibatkan degradasi nilai dan identitas budaya lokal, dengan hanya 12,25% warisan budaya tak benda yang tersertifikasi pada tahun 2024. Pelestarian budaya lokal harus dilakukan melalui revitalisasi tradisi, dukungan terhadap pelaku seni, dan edukasi budaya di sekolah.
6. **Masih Tingginya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular, Tidak Menular, dan Stunting**
Angka prevalensi penyakit menular, tidak menular, dan stunting masih tinggi, menunjukkan perlunya peningkatan akses layanan kesehatan. RPJMD 2025–2029 harus mencakup strategi pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, penguatan pencegahan penyakit, dan peningkatan fasilitas kesehatan.
7. **Peningkatan Pemenuhan Standar Pelayanan Kesehatan pada Masyarakat**
Peningkatan standar pelayanan kesehatan menjadi prioritas untuk mendukung kesehatan masyarakat. Dengan angka harapan hidup

sebesar 73,96 tahun pada 2024, Lampung Barat perlu memperkuat pemerataan fasilitas kesehatan dan pelatihan tenaga medis.

8. Kurangnya Keterlibatan Organisasi Kepemudaan dalam Pembangunan
Organisasi kepemudaan di Lampung Barat memiliki peran strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Program pelibatan pemuda dalam pembangunan ekonomi kreatif dan sosial harus menjadi fokus dalam RPJMD.
9. Kurangnya Perhatian terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak
Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih perlu diperkuat. Indeks pemberdayaan gender sebesar 65,92% pada tahun 2023 mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran gender dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.
10. Belum Optimalnya Pembangunan yang Responsif Gender
Isu gender harus menjadi arus utama dalam pembangunan. Program-program berbasis gender perlu diperluas untuk meningkatkan peran perempuan di sektor ekonomi, politik, dan sosial.
11. Ketahanan Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Belum Optimal
Indeks ketahanan pangan sebesar 76,18 pada tahun 2024 mencerminkan perlunya langkah strategis dalam meningkatkan produksi pangan lokal dan distribusi yang adil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
12. Pengendalian Penduduk Belum Berjalan secara Optimal
Laju pertumbuhan penduduk di Lampung Barat memerlukan pengendalian yang lebih terintegrasi melalui program KB dan edukasi keluarga berencana untuk menjaga keseimbangan antara jumlah penduduk dan sumber daya yang tersedia.

Fokus Pembangunan pada Pertumbuhan Ekonomi dan Daya Saing Daerah

1. Menurunnya Produksi Sektor Pertanian dan Perkebunan
Produksi sektor pertanian dan perkebunan menunjukkan tren penurunan, dengan produksi kopi hanya mencapai 2.979,5 ton pada tahun 2024. Diperlukan upaya revitalisasi sektor ini melalui pengenalan teknologi modern, pelatihan petani, dan diversifikasi produk untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan ekonomi.
2. Rendahnya Produksi pada Sektor Peternakan serta Optimalisasi Manajemen Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner
Produksi sapi potong dan kambing masih belum optimal, disertai dengan tantangan dalam manajemen kesehatan hewan. Strategi penguatan peternakan berbasis komunitas serta dukungan layanan kesehatan hewan harus ditingkatkan untuk mendorong kontribusi sektor peternakan terhadap ekonomi daerah.
3. Rendahnya Produksi Perikanan Dibandingkan Potensi yang Tersedia
Produksi perikanan hanya mencapai 10.768,56 ton pada tahun 2024, jauh dari potensi yang ada. RPJMD 2025–2029 harus mencakup pengembangan teknologi budidaya perikanan dan pengelolaan

sumber daya perikanan secara berkelanjutan untuk meningkatkan hasil produksi.

4. Produktivitas dan Daya Saing Produk Olahan Masih Rendah Produk olahan dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan belum memiliki daya saing tinggi di pasar. Pengembangan sentra industri pengolahan, pelatihan kewirausahaan, dan promosi produk lokal harus menjadi fokus pembangunan ekonomi.
5. Rendahnya Investasi pada Sektor Unggulan Investasi di sektor unggulan Lampung Barat masih rendah, menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan insentif investasi, penguatan infrastruktur penunjang, dan promosi potensi daerah diperlukan untuk menarik minat investor.
6. Rendahnya Penciptaan Lapangan Kerja Baru Kesempatan kerja baru melalui UMKM masih terbatas, berdampak pada tingginya tingkat pengangguran. Digitalisasi UMKM, kemudahan akses pembiayaan, dan pengembangan pusat-pusat ekonomi kreatif dapat menjadi solusi untuk memperluas lapangan kerja.
7. Digitalisasi Ekonomi pada Pengelolaan UMKM dan Koperasi Modern Transformasi digital dalam pengelolaan UMKM dan koperasi modern perlu dipercepat untuk meningkatkan efisiensi dan akses pasar. RPJMD harus mencakup program pelatihan digital dan pengembangan infrastruktur teknologi bagi pelaku usaha kecil.
8. Destinasi Wisata Belum Dikembangkan Secara Optimal Jumlah wisatawan domestik belum mencapai target optimal, mengindikasikan perlunya pengembangan destinasi wisata yang lebih kreatif dan inovatif. Penguatan promosi, peningkatan fasilitas, dan dukungan ekonomi kreatif berbasis pariwisata menjadi langkah strategis.
9. Rendahnya Kompetensi Pemasaran dan Promosi Wisata Kompetensi pemasaran pariwisata masih rendah, sehingga potensi wisata Lampung Barat kurang terekspos. Pelatihan pemasaran digital dan kolaborasi dengan pelaku usaha wisata menjadi penting untuk memperluas jangkauan promosi.

Fokus Pembangunan pada Tatacara Pemerintahan yang baik, Akuntabel, Inovatif dan Transparan

1. Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Kurang Optimal Belum diterapkannya prinsip-prinsip good governance secara menyeluruh berdampak pada rendahnya efisiensi layanan publik. Program penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi tata kelola, dan pengawasan berbasis masyarakat diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas.
2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Pekon Kapasitas aparatur pekon dan pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memperkuat fungsi kelembagaan pemerintahan di tingkat desa.
3. Rendahnya Daya Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah baru mencapai 69,93 pada tahun 2024, menunjukkan perlunya dorongan lebih besar untuk memacu kreativitas dan pengembangan ide-ide inovatif.

4. Transformasi Digital dalam Sistem Pemerintahan
Digitalisasi pemerintahan menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik.
5. Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Pemerintahan
Ketegasan batas wilayah pemerintahan penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan mengurangi konflik administrasi.

Fokus Pembangunan pada Infrastruktur yang Berkualitas dan penanggulangan kebencanaan

1. Peningkatan Jalan Mantap
Peningkatan kualitas jalan mantap menjadi salah satu prioritas strategis dalam mendukung konektivitas wilayah di Lampung Barat. Jalan yang memadai tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat tetapi juga mempercepat distribusi barang dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan RPJMD 2025–2029, peningkatan jalan mantap ditargetkan dapat mencapai 80% melalui optimalisasi anggaran pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan.

Investasi pada infrastruktur jalan juga berperan dalam mengurangi kesenjangan akses antarwilayah. Fokus utama terletak pada pembangunan jalan penghubung antar desa dan jalan menuju sentra produksi seperti perkebunan dan pertanian. Hal ini akan menciptakan keterhubungan ekonomi yang lebih inklusif serta mengurangi beban biaya logistik bagi pelaku usaha lokal. Peningkatan jalan mantap juga akan menciptakan aksesibilitas yang lebih baik menuju destinasi wisata unggulan di Lampung Barat, sehingga memperkuat daya tarik pariwisata daerah.

2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Air Baku
Lampung Barat memiliki potensi air baku yang besar, namun pemanfaatannya masih belum optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, industri, dan pertanian. RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan pemanfaatan ini hingga 85% melalui pengembangan infrastruktur pengelolaan air baku, seperti bendungan dan jaringan distribusi air.

Selain itu, integrasi program pemanfaatan air baku dengan sektor pertanian dan industri harus dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi. Pembangunan sistem pengolahan air baku juga akan memastikan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan akses. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, Lampung Barat dapat mengoptimalkan potensi air baku sebagai salah satu kekuatan pembangunan daerah.

3. Pengendalian Pemanfaatan Penggunaan Air Tanah
Penggunaan air tanah di Lampung Barat seringkali tidak terkendali, mengakibatkan potensi kerusakan lingkungan dan penurunan kapasitas akuifer. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar pemanfaatan air tanah dilakukan tanpa regulasi yang memadai, terutama di sektor domestik dan industri kecil. RPJMD 2025–2029 harus mencakup regulasi ketat dan pemantauan terhadap eksploitasi air tanah untuk mencegah overuse yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan.

Penerapan teknologi pemantauan dan pengelolaan air tanah berbasis digital dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan penggunaan yang bijaksana. Selain itu, upaya peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi lingkungan juga penting untuk mendorong perilaku hemat air. Dengan pengendalian yang baik, Lampung Barat dapat menjaga keseimbangan ekosistem serta menjamin ketersediaan air tanah bagi generasi mendatang.

4. Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak dan Berkelanjutan
Akses masyarakat terhadap sumber air minum layak di Lampung Barat masih menjadi tantangan besar. RPJMD 2025–2029 harus memprioritaskan peningkatan cakupan layanan air minum layak melalui pembangunan jaringan perpipaan, sistem distribusi, dan pengembangan sumber air bersih yang berkelanjutan.

Kolaborasi antara pemerintah daerah, BUMD air minum, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk memperluas akses layanan ini. Program revitalisasi sumber air yang rusak dan pengelolaan air berbasis komunitas juga penting untuk menjamin keberlanjutan. Dengan peningkatan akses terhadap air minum layak, kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara signifikan, serta mendukung pencapaian indikator pembangunan manusia di Lampung Barat.

5. Meningkatnya Layanan Irigasi dalam Kondisi Baik
Ketersediaan irigasi dalam kondisi baik merupakan elemen penting dalam mendukung produktivitas sektor pertanian di Lampung Barat. Untuk mencapai target 85% pada tahun 2029, RPJMD harus memprioritaskan rehabilitasi saluran irigasi rusak dan pembangunan jaringan irigasi baru di wilayah strategis pertanian.

Selain itu, penerapan teknologi irigasi modern, seperti irigasi tetes dan irigasi pintar berbasis sensor, perlu diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan air. Peningkatan kapasitas petani dalam pengelolaan irigasi secara mandiri juga akan mendukung keberlanjutan layanan ini. Dengan layanan irigasi yang optimal, hasil panen dapat meningkat secara signifikan, mendukung ketahanan pangan daerah dan pendapatan petani.

6. Meningkatnya Layanan Sanitasi Layak dan Aman
Akses masyarakat terhadap layanan sanitasi layak di Lampung Barat masih memerlukan perhatian khusus. Pembangunan infrastruktur sanitasi, seperti toilet umum sehat dan sistem pengelolaan limbah domestik, harus menjadi prioritas utama.

Selain itu, program edukasi dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi aman perlu ditingkatkan, terutama di wilayah pedesaan yang masih minim fasilitas. Pemerintah daerah juga perlu mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah untuk mendukung pembiayaan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Dengan layanan sanitasi yang memadai, angka penyakit terkait sanitasi buruk dapat ditekan, serta kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan secara keseluruhan.

7. Meningkatnya Moda Transportasi Umum
Moda transportasi umum di Lampung Barat masih terbatas, yang berdampak pada rendahnya mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah. RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan jumlah moda transportasi umum melalui pengadaan armada baru, peningkatan kualitas layanan, dan pengembangan jalur-jalur transportasi strategis.

Pemerintah juga harus mendorong integrasi transportasi umum dengan teknologi digital, seperti aplikasi pemesanan tiket online dan informasi jadwal transportasi. Dengan layanan transportasi umum yang lebih baik, masyarakat dapat lebih mudah mengakses pusat ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga mendukung pengembangan wilayah secara keseluruhan.

8. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi
Sarana dan prasarana transportasi di Lampung Barat memerlukan pengembangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2024, kondisi sarana transportasi publik, seperti terminal dan halte, masih belum memadai. RPJMD harus mencakup peningkatan fasilitas tersebut serta pengembangan infrastruktur pendukung, seperti jembatan, pelabuhan, dan jalur transportasi alternatif.

Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik, distribusi barang dan mobilitas masyarakat akan lebih lancar, mengurangi biaya logistik dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi unggulan. Program pembangunan ini juga dapat membuka peluang kerja baru bagi masyarakat lokal, meningkatkan taraf hidup, dan mempercepat pembangunan daerah.

9. Meningkatnya Layanan Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi secara Merata

Penyediaan layanan jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang merata di Lampung Barat merupakan salah satu langkah penting untuk mendorong transformasi digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan cakupan hingga 90% melalui pembangunan infrastruktur jaringan, seperti menara telekomunikasi dan perluasan jaringan fiber optik.

Pemanfaatan teknologi digital juga harus didorong dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk digitalisasi UMKM dan layanan publik. Dengan layanan TIK yang merata, masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi, pendidikan daring, serta peluang ekonomi berbasis digital, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing daerah.

10. Meningkatnya Manajemen Mitigasi Bencana

Lampung Barat memiliki potensi bencana yang cukup tinggi, seperti banjir, longsor, dan gempa bumi, dengan indeks risiko bencana mencapai 176,28 pada tahun 2024. Oleh karena itu, peningkatan manajemen mitigasi bencana menjadi prioritas strategis dalam RPJMD 2025–2029. Fokus utama adalah penguatan kapasitas lembaga terkait, penyediaan peralatan tanggap darurat, dan pelatihan mitigasi bagi masyarakat di wilayah rawan bencana.

Selain itu, penyusunan peta risiko bencana yang komprehensif dan integrasi sistem peringatan dini berbasis teknologi menjadi langkah penting untuk meminimalkan dampak bencana. Dengan manajemen mitigasi yang lebih baik, risiko korban jiwa dan kerugian material akibat bencana dapat ditekan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

11. Mewujudkan Akses Rumah Tangga terhadap Rumah Layak Huni, Terjangkau, dan Berkelanjutan

RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan hingga 90% melalui program perumahan rakyat yang inklusif, seperti subsidi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pembangunan perumahan berbasis komunitas, dan revitalisasi kawasan hunian kumuh.

Program ini juga mencakup penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan perumahan, sehingga menciptakan hunian yang tidak hanya layak dan terjangkau tetapi juga berkelanjutan. Dengan akses yang lebih baik terhadap perumahan, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat, mendukung indikator pembangunan manusia yang lebih baik.

12. Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu

RPJMD 2025–2029 akan menitikberatkan pada pengentasan permukiman kumuh melalui pendekatan terpadu yang melibatkan

perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi.

Peningkatan kualitas lingkungan permukiman juga akan dilakukan melalui program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan. Dengan langkah ini, permukiman kumuh dapat direvitalisasi menjadi kawasan yang lebih sehat, aman, dan layak huni, mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat setempat.

13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan/Wilayah Danau, Daerah Aliran Sungai, Rawan Bencana, dan Permukiman Perkotaan
Pemanfaatan ruang di kawasan strategis seperti wilayah danau, daerah aliran sungai (DAS), dan area rawan bencana di Lampung Barat memerlukan pengendalian yang lebih baik. Pada tahun 2024, pemanfaatan ruang di wilayah-wilayah ini belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). RPJMD 2025–2029 perlu menitikberatkan pada penegakan aturan tata ruang, termasuk penertiban aktivitas yang melanggar, seperti alih fungsi lahan dan pembangunan ilegal.

Program ini juga harus mencakup penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR) yang lebih spesifik untuk kawasan strategis dan rawan bencana. Dengan pengendalian yang lebih ketat, potensi kerusakan lingkungan dapat diminimalkan, risiko bencana dapat ditekan, dan pemanfaatan ruang dapat lebih optimal untuk mendukung keberlanjutan pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan.

14. Memantapkan Pengembangan Wilayah dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Lingkungan Hidup
Pengembangan wilayah di Lampung Barat membutuhkan pendekatan holistik yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan pelestarian lingkungan hidup. Pada tahun 2024, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terlihat, dengan kontribusi ekonomi wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan wilayah pedesaan. RPJMD 2025–2029 harus menekankan pengembangan wilayah secara merata melalui penguatan sektor unggulan lokal, seperti pertanian, pariwisata, dan perikanan, serta investasi pada infrastruktur penunjang.

Aspek sosial budaya juga harus diperhatikan dengan pelestarian nilai-nilai lokal dan pengembangan ruang budaya masyarakat. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup, seperti pengendalian alih fungsi lahan dan peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), perlu menjadi prioritas. Dengan pendekatan ini, pembangunan wilayah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Fokus Pembangunan Pada Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Mengendalikan Terjadinya Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi tantangan signifikan di Lampung Barat. RPJMD 2025–2029 menargetkan pengendalian melalui penguatan regulasi, optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian produktif, serta program insentif bagi petani yang mempertahankan fungsi lahan mereka. Pendekatan ini diharapkan dapat menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan jangka panjang.
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan penambahan area RTH melalui rehabilitasi kawasan terbuka, penghijauan ruang publik, dan pembangunan taman kota. Dengan peningkatan kualitas dan kuantitas RTH, fungsi ekologis, estetika, dan sosial RTH dapat lebih optimal, memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung mitigasi perubahan iklim.
3. Penurunan Kualitas Kawasan Lindung
Kawasan lindung di Lampung Barat mengalami tekanan signifikan akibat deforestasi dan aktivitas ilegal, yang menurunkan kualitas lingkungan hidup. RPJMD 2025–2029 menargetkan rehabilitasi kawasan ini melalui reboisasi, penguatan pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan untuk berperan aktif dalam pelestarian lingkungan.
4. Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Panas Bumi
Lampung Barat memiliki potensi panas bumi yang besar, seperti di PLTP Ulubelu dan Way Besai, dengan kapasitas mencapai 90 MW. Namun, pemanfaatan energi ini masih minim. RPJMD 2025–2029 akan memfasilitasi investasi di sektor panas bumi melalui kerja sama dengan pihak swasta, penyederhanaan perizinan, dan promosi potensi energi baru terbarukan untuk mendukung diversifikasi energi dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
5. Pemanfaatan Potensi Limbah
RPJMD 2025–2029 menargetkan pengembangan teknologi pengolahan limbah, seperti pengolahan limbah organik menjadi kompos dan pengolahan limbah plastik menjadi bahan bakar alternatif. Program ini diharapkan dapat mengurangi pencemaran dan menciptakan nilai tambah ekonomi.
6. Pencemaran Perairan Danau dan Sungai
Danau dan sungai di Lampung Barat, seperti Danau Ranau dan Sungai Way Besai, mengalami pencemaran akibat limbah domestik dan pertanian. RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan program pengelolaan terpadu, termasuk penyediaan fasilitas pengolahan

limbah cair dan kampanye kesadaran lingkungan bagi masyarakat untuk mengurangi pencemaran.

7. **Indikasi Peningkatan Emisi Gas Rumah Kaca**
Lampung Barat mengalami peningkatan emisi gas rumah kaca sebesar 5% per tahun akibat aktivitas transportasi dan industri. RPJMD 2025–2029 menargetkan pengurangan emisi melalui penggunaan energi baru terbarukan, perbaikan sistem transportasi publik, dan penghijauan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung target penurunan emisi nasional dan mitigasi perubahan iklim.
8. **Perubahan Iklim atau Ketahanan Iklim**
Perubahan iklim telah menyebabkan ketidakpastian pola hujan di Lampung Barat, berdampak pada sektor pertanian. RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan program adaptasi perubahan iklim, termasuk pengembangan varietas tanaman tahan cuaca ekstrem dan pengelolaan sumber daya air yang efisien untuk meningkatkan ketahanan iklim masyarakat.
9. **Perdagangan Karbon sebagai Potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)**
Perdagangan karbon menjadi peluang ekonomi baru bagi Lampung Barat, terutama dari kawasan hutan yang luas. Pada tahun 2024, Lampung Barat belum memanfaatkan potensi ini secara optimal. RPJMD 2025–2029 akan mendorong sertifikasi kawasan hutan untuk perdagangan karbon serta kerja sama dengan pihak swasta guna meningkatkan pendapatan daerah dari sektor ini.
10. **Peningkatan Layanan Pengelolaan Persampahan**
RPJMD 2025–2029 menargetkan peningkatan cakupan layanan hingga 90% melalui pembangunan tempat pembuangan akhir (TPA) modern, pengadaan kendaraan pengangkut sampah, dan program daur ulang berbasis komunitas.
11. **Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan**
Fasilitas lingkungan seperti tempat pengolahan limbah cair dan fasilitas pemantauan kualitas udara masih kurang memadai di Lampung Barat. RPJMD 2025–2029 akan memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana tersebut untuk mendukung kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat.
12. **Konflik Satwa dengan Manusia**
Konflik antara manusia dan satwa liar seperti gajah dan harimau masih sering terjadi di wilayah hutan Lampung Barat, dengan 15 insiden dilaporkan pada tahun 2024. RPJMD 2025–2029 akan memperkuat program mitigasi konflik ini melalui pembangunan koridor satwa, pengelolaan habitat satwa liar, dan edukasi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk mencegah konflik.

BAB III

Visi, Misi, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (clarity of direction). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2025-2029 disamping selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat, juga selaras dengan RPJMD Provinsi Lampung serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **KABUPATEN LAMPUNG BARAT YANG SEJAHTERA, MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai, dan misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan. Visi Pembangunan Daerah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai Misi yang diemban.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang :

A. HEBAT

1. **HARMONI**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harmoni berarti: Pernyataan Rasa, Aksi, Gagasan, dan Minat; Keselarasan; Keserasian.
Dalam rumusan visi ini, harmoni bermakna: keseimbangan atau kesesuaian, yaitu suatu keadaan pembangunan yang berkelanjutan dengan mengutamakan keseimbangan dan kesesuaian Daya Dukung Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Budaya yang dimiliki dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan.
2. **ELOK**, Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), elok berarti: Baik, bagus, cantik. Dalam rumusan visi ini, elok bermakna: Indah, Cantik dan Bagus, Lampung Barat yang dikurniakan Tuhan dengan kondisi alam yang elok atau indah, dan kehidupan sosial-budaya serta sosialkemasyarakatan yang berkepribadian dan berkarakter luhur menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan.
3. **BERBUDAYA**, Suatu keadaan di mana di dalam masyarakat tertanam dan terbina nilai-nilai tatanan dan norma yang luhur tanpa meninggalkan warisan budaya dan seni dan senantiasa mengapresiasi kekayaan khasanah budaya, tradisi daerah dan kearifan lokal.
4. **AMAN**, bermakna keadaan yang menggambarkan bahwa setiap orang merasakan ketenangan dan kenyamanan sehingga dapat melakukan berbagai aktivitas.

5. **TAQWA**, bermakna kepatuhan manusia kepada Sang Maha Pencipta dalam menjalankan perintah-NYA dan menjauhi larangan-NYA. Taqwa merupakan Perwujudan dari Keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hal ini merupakan Landasan serta Sumber Motivasi dalam melaksanakan seluruh aspek Pembangunan

B. SETIA

1. **SEHAT DAN CERDAS**, mengandung arti mewujudkan masyarakat yang sejahtera secara jasmani dan rohani maupun sosial; berkualitas, unggul dan berdaya saing yang menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. **TEGAS DAN INOVATIF**, mengandung arti sikap yang berani dan percaya diri mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah secara jelas, nyata dan pasti, serta membangun proses kreatif dalam pengalaman terhadap fakta di lapangan menjadi suatu gagasan, ide, metode atau alat yang dapat bernilai menjadi lebih baik.
3. **ADIL, MAKMUR DAN MERATA**, masyarakat Kabupaten Kabupaten Lampung Barat yang dapat menikmati pembangunan secara merata.

Adapun makna Lampung Barat **HEBAT DAN SETIA**, “Semangat dan kebersamaan dan kesetiaan untuk Lebih Mengoptimalkan Potensi yang Ada dan Sangat Besar untuk Kesejahteraan Masyarakat secara adil dan merata.” Dalam hal ini adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu masyarakat Lampung Barat; baik pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan dan relasi sosialnya, serta terjaga dan terlindunginya agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatannya sebagai manusia; baik di saat sekarang maupun bagi generasi di masa akan datang; melalui pemanfaatan secara bijak atas kekayaan sumber daya alam Lampung Barat secara adil dan merata.

Visi Kabupaten Lampung Barat berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi Kabupaten Lampung Barat juga berpedoman pada Visi Pembangunan Lampung yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung 2025-2029 yaitu “Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”

Visi Lampung Barat sebagai Rumah Bersama yang “Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju

Indonesia Emas 2045 (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)” selaras dengan visi pembangunan nasional yakni Indonesia maju, berdaulat dan mandiri. Visi masyarakat Lampung Barat yang menghargai perbedaan, dan memiliki jiwa gotong royong selaras dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan kelima penjelasan dari visi Kabupaten Lampung Barat selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut :

Visi Pembangunan Nasional 2025-2029 :
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Visi Pembangunan Provinsi Lampung 2025-2029 :
“Bersama Lampung Maju menuju Indonesia Emas”



Visi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025-2029 :
“Mewujudkan Lampung Barat yang Harmonis, Elok, Berbudaya, Agamis, Taqwa, Sehat Cerdas Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata (LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)”

Misi

Misi merupakan penjabarkan dari visi dan disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi tersebut. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi yang digariskan untuk pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan adalah:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa

adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Lampung Barat dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mewujudkan “Lampung Barat Hebat dan Setia” sebagai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Barat 2025-2029, maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat selama 5 tahun ke depan sebagai berikut :

- 1) **Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya.** Konsep Lampung Barat sehat dan cerdas sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat dan terdidik dan memastikan akses kesehatan untuk rakyat agar mampu berkarya dan produktif sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu misi pertama ini merupakan salah satu pondasi utama dalam mewujudkan kelima misi lainnya, yakni menyiapkan SDM Lampung Barat yang sehat, cerdas, terdidik dan terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berkarya dan berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai bidang, serta memajukan dan Melestarikan kebudayaan setempat dalam semangat kebhinekaan dan toleransi serta menjaga kelestarian lingkungan hidup warisan leluhur bangsa Indonesia.
- 2) **Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.** Misi ini merupakan kerangka acuan untuk memanifestasikan keempat misi lainnya, yakni meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan prinsip inklusif yang melibatkan seluruh pemangku peran dan masyarakat dengan manfaat yang dapat diakses oleh semua orang, melalui kebijakan yang memperkuat kapasitas ekonomi rakyat, termasuk kapasitas produksi pangan oleh petani, serta mendukung kegiatan ekonomi skala kecil- menengah yang inklusif dan kreatif.
- 3) **Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban.** Rancangan keberhasilan seluruh misi pembangunan sangat ditentukan oleh misi ini, dengan mengusung peningkatan reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, bersih, jujur, transparan dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efektif dan efisien, serta menjamin kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak serta membangun proses kreatif dan inovatif serta menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban.
- 4) **Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.** Misi ini Bermakna memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga

keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi

- 5) **Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong.** Melalui tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis diharapkan mampu mendorong penciptaan iklim daerah yang kondusif untuk kelancaran pembangunan di berbagai bidang.
- 6) **Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.** Membangun infrastruktur yang mendukung aktifitas perekonomian secara adil dan merata di seluruh wilayah.

Keselarasan misi pembangunan RPJMN, RPJMD Provinsi Lampung dan RPJMD Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Keselarasan misi pembangunan

No	Misi Pembangunan Nasional 2025 -2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 -2029	Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025 -2029
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Misi 3 Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif	Misi 2 Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

No	Misi Pembangunan Nasional 2025 -2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 -2029	Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025 -2029
3	Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif	Misi 6 Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Memperkuat Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Produktif	Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya
5	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif	Misi 2 Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri dan Inovatif	Misi 2 Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.

No	Misi Pembangunan Nasional 2025 -2029 (Asta Cita)	Misi Pembangunan Provinsi Lampung 2025 -2029	Misi Pembangunan Kabupaten Lampung Barat 2025 -2029
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Misi 3 Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan, serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas	Misi 5 Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong
			Misi 4 Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan

Keselarasan misi RPJP Kabupaten Lampung Barat dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Tabel 3.2 Keselarasan Misi RPJP Kabupaten Lampung Barat dengan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

MISI RPJPD LAMPUNG BARAT UNTUK RPJMD KE-1 (2025-2029)	MISI RPJMD TAHUN 2025 - 2029
Misi 1 Transformasi sosial : Sumberdaya Manusia yang Sehat, Cerdas, Berkualitas dan Berbudaya	Misi 1 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat Cerdas dan berbudaya
Misi 2 Transformasi ekonomi : Usaha ekonomi produktif secara merata	Misi 2 Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun

MISI RPJPD LAMPUNG BARAT UNTUK RPJMD KE-1 (2025-2029)	MISI RPJMD TAHUN 2025 - 2029
berbasis pemberdayaan masyarakat dan teknologi digital dengan mengoptimalkan sektor pertanian.	Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal.
Misi 3 Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai	Misi 3 Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban
Misi 5 Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Misi 4 Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 3 Transformasi tata kelola : Tata Kelola Pemerintahan (good governance) yang akuntabel, Pelayanan Publik yang berkualitas, serta kehidupan masyarakat yang aman dan damai	Misi 5 Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong
Misi 4 Pengembangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur secara berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta tangguh bencana.	Misi 6 Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah.

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Dalam penentuan target indikator kinerja secara umum dihitung berdasarkan data tren tahun 2022-2024 serta diasumsikan kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana besar. Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025-2029.

Tabel 3.3. Sinkronisasi Tujuan Provinsi dan Kabupaten

TUJUAN PROVINSI	TUJUAN KABUPATEN
Mewujudkan pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Mandiri, dan Inovatif	Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi masyarakat dan ekonomi lokal
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah
Menurunkan angka kemiskinan	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan
Pembangunan Rendah Karbon, Berketahanan Iklim dan Ketangguhan Bencana	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas
	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, aman dan berbudaya.	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai

Tabel 3.4. Sinkronisasi Sasaran Strategis Provinsi dan Kabupaten

SASARAN PROVINSI	SASARAN KABUPATEN
Mendorong investasi dan hilirisasi industri	Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi
	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah
Lampung Menjadi Lumbung Pangan Nasional	Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan
Mewujudkan Ekosistem Ekonomi Berbasis Desa	Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai Daya Ungkit Ekonomi Daerah	Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi
Inisiasi Lumbung Energi Terbarukan	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup
Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas Infrastruktur Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur

SASARAN PROVINSI	SASARAN KABUPATEN
Melanjutkan Pembangunan Kota Baru 'Bandar Negara' berbasis Eco-City	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur
Generasi Cerdas dan Berakhlak	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah
Pengusaha Muda Berdaya Saing dan Inovatif	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Mendukung Prestasi Pemuda dan Olahraga	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Menuju Zero Stunting dan Perwujudan Masyarakat Sehat	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Lampung Pusat Teknologi Terpadu	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Pengentasan Kemiskinan Tepat Waktu dan Tepat Sasaran	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan
Penguatan ketahanan keluarga	Meningkatnya pengendalian penduduk
Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Perempuan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Kelompok Terlantar	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak
Mewujudkan Birokrasi berintegritas	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketangguhan Bencana	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup
	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana
Membangun Semangat Lampung Bersama	Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila dan demokrasi

Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	72,41	72,00-72,75	72.76 - 72.85	72.86 - 72.95	72.96 - 73.00	73,01-75,00	73.41-75.40
				Angka Kemiskinan	10,68	9,50-10,00	9.00-9.63	8.50-9.25	8.00-8.88	7,50-8,50	6.80-7.80
			Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,41	72,00-72,75	72.76 - 72.85	72.86 - 72.95	72.96 - 73.00	73,01-75,00	73.41-75.40
				Prevalensi Stunting	24.6 (tahun 2023)	10.65	12.50	12.00	11.50	10.90	10.30
			Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesenjangan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.407	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395
				Indeks Perlindungan Anak	60.18 (tahun 2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.12%	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%
				Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	61.52	61.83	62.14	62.45	62.76	63.07	63.39
			Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	10,68	9,50-10,00	9.00-9.63	8.50-9.25	8.00-8.88	7,50-8,50	6.80-7.80
				Gini Rasio	0,290	0.264	0.2585	0.253	0.2475	0.242	0.2365
			Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	76.18	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49
		Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah		Persentase pemajuan kebudayaan daerah	10,43%	12.64%	12,63%	14,83%	17,03%	19,23%	21,42%
			Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	12,25%	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%
				Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	5,32%	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal		Laju pertumbuhan ekonomi (Persen)	4,36%	4,2 - 5,2%	4.25 - 5.27	4.3 - 5.35	4.35 - 5.42	4.4 - 5.49	5.28%
				PDRB per kapita (Rp Juta)	31.35	32.92	34.56	36.29	38.11	40.01	42.01
			Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	PDRB per kapita (Rp Juta)	31.35	32.92	34.56	36.29	38.11	40.01	42.01
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35.66%	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%
				Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.05%	2.05%	2.06%	2.07%	2.09%	2.11%	2.12%
				Tingkat Inflasi (%)	1,57% (angka Prov)	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.09	2.07	2.05	2.03	2.01	1.99	1.97

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Nilai investasi (Rupiah)	187.253.670.764	104.640.000.000	109.870.000.000	115.363.500.000	121.131.675.000	127.188.258.750	133.547.671.600
			Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	29%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				Persentase koperasi Sehat	34%	36%	36%	37%	38%	39%	40%
3	Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52
				Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	70.74	71.09	71.45	71.81	72.17	72.53	72.89
				Indeks Pelayanan Publik	3,90	3.11	3.12	3.14	3.15	3.17	3.18
			Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	70.74	71.09	71.45	71.81	72.17	72.53	72.89
				Indeks Pelayanan Publik	3,90	3.11	3.12	3.14	3.15	3.17	3.18
4	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	73,09	74.63	74.89	75.14	75.39	75.65	75.69
			Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	73,09	74.63	74.89	75.14	75.39	75.65	75.69
				Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25
				Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Tingkat kriminalitas	-	0.034%	0.033%	0.032%	0.031%	0.030%	0.029%
			Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan pancasila dan demokrasi	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline Tahun 2024	Target Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
6	Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana		Indeks layanan infrastruktur daerah,	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46
				Indeks Resiko Bencana	176,28	169.55	152.38	150.86	149.35	147.85	146.38
			Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46
			Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	176,28	169.55	152.38	150.86	149.35	147.85	146.38

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan

Strategi

Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Barat, strategi pembangunan disusun sebagai pedoman dalam mencapai visi dan misi daerah secara efektif dan terukur. Strategi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan serta memanfaatkan potensi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap strategi yang ditetapkan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta pelestarian lingkungan hidup. Selain itu, strategi ini juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Dengan perencanaan yang sistematis dan implementasi yang tepat, strategi ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Kabupaten Lampung Barat di tingkat regional maupun nasional.

Tabel 3.6 Strategi

No	Sasaran Pemda	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
1	Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak sebagai fondasi peningkatan kualitas SDM jangka panjang.	Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penyediaan layanan dasar yang merata dan terjangkau.	Pengembangan keterampilan kerja berbasis potensi lokal dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan preventif.	Penguatan sistem perlindungan sosial dan ketahanan keluarga, serta optimalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.	Konsolidasi program lintas sektor dalam pembangunan SDM serta pengembangan SDM unggul melalui inovasi dan teknologi.
2	Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, Masyarakat Inklusif, dan Perlindungan Anak	Penyuluhan dan advokasi terkait hak-hak perempuan dan anak	Penguatan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan	Meningkatkan akses layanan kesehatan dan sosial bagi keluarga	Optimalisasi peran lembaga masyarakat dalam inklusivitas	Evaluasi dan peningkatan kebijakan kesetaraan gender
3	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Peningkatan akses dan edukasi tentang program KB	Optimalisasi layanan kesehatan reproduksi	Integrasi kebijakan kependudukan dengan pembangunan ekonomi	Penguatan peran kader kesehatan dan keluarga berencana	Evaluasi efektivitas program kependudukan
4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan	Peningkatan program bantuan sosial berbasis data yang akurat	Pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM dan wirausaha	Optimalisasi program padat karya untuk masyarakat miskin	Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan gratis	Evaluasi dan penguatan kebijakan pengentasan kemiskinan
5	Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan produksi pertanian dan diversifikasi pangan	Penguatan infrastruktur pertanian dan irigasi	Implementasi teknologi pertanian berkelanjutan	Optimalisasi rantai distribusi dan akses pangan	Evaluasi dan pengembangan kebijakan ketahanan pangan

No	Sasaran Pemda	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
6	Meningkatnya pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya	Pemetaan dan revitalisasi objek budaya	Pengembangan event budaya daerah	Digitalisasi dan promosi cagar budaya	Pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan	Evaluasi dan penguatan kebijakan budaya
7	Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Peningkatan patroli dan fasilitas keamanan	Optimalisasi peran masyarakat dalam keamanan lingkungan	Peningkatan sistem keamanan berbasis teknologi	Sinergi aparat dan masyarakat dalam menjaga ketertiban	Evaluasi sistem keamanan berbasis komunitas
8	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila	Penguatan organisasi masyarakat sipil	Kampanye toleransi dan hak asasi manusia	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam demokrasi	Evaluasi dan penguatan program wawasan kebangsaan
9	Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	Pengembangan sektor unggulan daerah	Optimalisasi pasar dan distribusi hasil produksi	Peningkatan kapasitas SDM ekonomi kreatif	Penguatan inovasi berbasis teknologi dalam ekonomi daerah	Evaluasi pertumbuhan ekonomi dan strategi keberlanjutan
10	Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Digitalisasi UMKM dan koperasi	Pelatihan manajemen usaha bagi UMKM	Fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran produk	Penguatan branding produk daerah	Evaluasi dan pengembangan kebijakan UMKM berkelanjutan
11	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Reformasi birokrasi, SDM aparatur dan Revitalisasi sarana pelayanan publik	Digitalisasi layanan pemerintahan dan pelayanan publik berbasis teknologi	Penguatan sistem pengawasan, akuntabilitas dan Peningkatan kapasitas SDM pelayanan publik	Peningkatan transparansi, partisipasi publik dan Optimalisasi sistem pengaduan masyarakat	Evaluasi dan penguatan sistem tata kelola pemerintahan serta layanan publik berbasis kebutuhan Masyarakat

No	Sasaran Pemda	Strategi Tahun 2026	Strategi Tahun 2027	Strategi Tahun 2028	Strategi Tahun 2029	Strategi Tahun 2030
12	Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Pembangunan infrastruktur prioritas	Peningkatan konektivitas antarwilayah	Penguatan akses air bersih dan sanitasi	Optimalisasi pemeliharaan dan keberlanjutan infrastruktur	Evaluasi dan perencanaan pembangunan jangka panjang
13	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Penyusunan peta risiko bencana	Pelatihan masyarakat tanggap bencana	Penguatan sistem peringatan dini dan mitigasi	Optimalisasi penanggulangan bencana berbasis teknologi	Evaluasi kesiapsiagaan dan respons bencana daerah
14	Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Penghijauan dan restorasi lahan kritis	Penguatan pengelolaan sampah dan limbah	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan	Penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan	Evaluasi dan pengembangan kebijakan lingkungan berkelanjutan

Uraian strategi pada RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 menitikberatkan pada pendekatan holistik yang mencakup pendidikan, kesehatan, keterampilan kerja, ketahanan sosial, dan inovasi. Fokus utama diarahkan pada penguatan layanan pendidikan dasar dan kesehatan ibu-anak, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta pemerataan akses layanan dasar. Pengembangan keterampilan berbasis potensi lokal dan penguatan sistem perlindungan sosial menjadi prioritas untuk menciptakan masyarakat yang adaptif dan produktif. Menjelang 2030, konsolidasi program lintas sektor dan pengembangan SDM unggul berbasis inovasi dan teknologi akan menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang berdaya saing tinggi..
2. Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesetaraan Gender, dan Perlindungan Anak
Strategi yang diterapkan dalam sasaran ini mencakup advokasi hak-hak perempuan dan anak, penguatan kebijakan perlindungan terhadap korban kekerasan, serta peningkatan layanan kesehatan dan sosial bagi keluarga. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan melindungi kelompok rentan dari diskriminasi serta kekerasan.
3. Meningkatnya Pengendalian Penduduk
Strategi pengendalian penduduk melibatkan peningkatan akses program keluarga berencana (KB), optimalisasi layanan kesehatan reproduksi, serta integrasi kebijakan kependudukan dengan pembangunan ekonomi. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjadi keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kapasitas pembangunan daerah.
4. Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan
Strategi utama dalam pengentasan kemiskinan mencakup peningkatan bantuan sosial berbasis data akurat, pemberdayaan ekonomi melalui UMKM, serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat miskin.
5. Meningkatnya Ketahanan dan Kemandirian Pangan
Strategi ketahanan pangan meliputi peningkatan produksi pertanian, diversifikasi pangan, serta penguatan rantai distribusi dan akses pangan. Implementasi teknologi pertanian berkelanjutan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pangan di daerah.
6. Meningkatnya Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya
Dalam upaya pelestarian budaya, strategi yang diterapkan meliputi pemetaan dan revitalisasi objek budaya, pengembangan event budaya daerah, serta digitalisasi dan promosi cagar budaya. Pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan juga menjadi langkah penting dalam menjaga warisan budaya daerah.

7. Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, dan Kenyamanan dalam Kehidupan Masyarakat
Strategi keamanan dan ketertiban berfokus pada peningkatan patroli dan fasilitas keamanan, optimalisasi peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, serta penerapan sistem keamanan berbasis teknologi.
8. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
Strategi dalam memperkuat ideologi Pancasila dan demokrasi mencakup pendidikan nilai-nilai kebangsaan, penguatan organisasi masyarakat sipil, serta kampanye toleransi dan hak asasi manusia.
9. Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Ekonomi
Strategi peningkatan ekonomi daerah mencakup pengembangan sektor unggulan, optimalisasi pasar, serta penguatan inovasi berbasis teknologi dalam ekonomi daerah.
10. Meningkatkan Daya Saing Koperasi dan UMKM
Strategi dalam peningkatan UMKM mencakup digitalisasi usaha, pelatihan manajemen bisnis, serta fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran produk.
11. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan
Strategi yang diterapkan meliputi reformasi birokrasi, digitalisasi layanan pemerintahan, penguatan sistem pengawasan dan transparansi serta pelayanan publik mencakup revitalisasi sarana pelayanan, digitalisasi pelayanan berbasis teknologi, serta peningkatan sistem pengaduan masyarakat.
12. Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur
Strategi dalam bidang infrastruktur mencakup pembangunan infrastruktur prioritas, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta optimalisasi pemeliharaan infrastruktur.
13. Meningkatnya Kesiapsiagaan Bencana
Strategi ini mencakup penyusunan peta risiko bencana, pelatihan masyarakat tanggap bencana, serta penguatan sistem mitigasi berbasis teknologi.
14. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
Strategi lingkungan hidup meliputi penghijauan, pengelolaan sampah, serta penguatan regulasi dan pengawasan lingkungan.

Arah Kebijakan

Tabel 3.7 Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Lampung barat yang Harmonis, Elok, Bedaya Saing, Agamis, Taqwa, Sehat, Cerdas, Berbudaya, Tegas, Inovatif, Adil Makmur dan merata Menuju Indonesia Emas 2045 (HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045)	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya	Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2026–2030 difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan keterampilan kerja. Kebijakan juga diarahkan pada penguatan ketahanan keluarga, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, dan pembangunan masyarakat inklusif yang menjamin partisipasi semua kelompok. Dalam mendukung kualitas hidup dan stabilitas sosial, pengendalian penduduk dilakukan secara terpadu dengan program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi terus didorong melalui perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan kesempatan kerja. Ketahanan dan kemandirian pangan menjadi pilar utama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan lokal. Di samping itu, pelestarian objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat identitas daerah dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal.
	Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Arah kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan bermasyarakat, guna membentuk karakter sosial yang berlandaskan moral, toleransi, dan semangat gotong royong. Untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman, kebijakan difokuskan pada peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, penguatan kelembagaan sosial, serta sinergi antara aparat dan warga dalam pencegahan konflik dan kriminalitas. Di sisi lain, upaya memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dilakukan melalui pendidikan kebangsaan, dialog lintas agama dan budaya, serta penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pemerintah daerah juga mendorong terciptanya harmoni sosial dengan menjunjung tinggi kebhinekaan sebagai kekuatan dalam menjaga persatuan dan kehidupan demokratis di tengah masyarakat.

Visi	Misi	Arah Kebijakan
	Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya lokal. Penguatan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perkebunan, pariwisata, dan ekonomi kreatif dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta dukungan infrastruktur dan teknologi tepat guna. Dalam rangka meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM, pemerintah mendorong kemudahan akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengembangan ekosistem digital dan jejaring pasar. Pembangunan ekonomi diarahkan agar mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, sehingga tercipta struktur ekonomi daerah yang tangguh dan mandiri
	Mewujudkan Birokrasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Arah kebijakan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis integritas guna mewujudkan birokrasi yang amanah dan berkeadaban. Penyelenggaraan pemerintahan ditingkatkan melalui reformasi birokrasi yang konsisten, penegakan disiplin aparatur, dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan penguatan budaya pelayanan prima yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum, kepatuhan terhadap regulasi, serta penguatan etika aparatur juga menjadi fokus untuk menciptakan iklim pemerintahan yang berlandaskan keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan serta kebudayaan lokal.
	Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan infrastruktur, kebijakan diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, sistem transportasi umum, dan jaringan irigasi yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Infrastruktur ini dikelola secara modern dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan. Selain itu, pengembangan infrastruktur berbasis teknologi

Visi	Misi	Arah Kebijakan
		cerdas menjadi prioritas, termasuk integrasi sistem digital dalam pengelolaan transportasi, energi, dan air bersih, serta perluasan akses internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat juga menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kebijakan ini, melalui skema pembiayaan inovatif dan pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur. Dalam aspek kesiapsiagaan bencana, kebijakan diarahkan pada pembangunan infrastruktur yang tangguh dan mampu mengurangi dampak bencana, seperti tanggul, bendungan, jalur evakuasi, dan shelter bencana yang memadai. Sistem pemantauan dan peringatan dini berbasis teknologi juga dikembangkan untuk memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang potensi bencana. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknis dan kampanye kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menciptakan budaya tanggap darurat yang lebih kuat.
	Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan	kebijakan diarahkan pada pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik guna memastikan keberlanjutan ekosistem. Langkah-langkah strategis mencakup pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah melalui penerapan regulasi yang tegas dan pengawasan ketat, serta revitalisasi kawasan kritis seperti hutan gundul dan lahan bekas tambang melalui program reboisasi dan rehabilitasi. Pengelolaan limbah dan sampah difokuskan pada penerapan ekonomi sirkular, dengan mendaur ulang limbah dan mengurangi sampah plastik melalui pendekatan komunitas seperti bank sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dilakukan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan di sektor industri dan transportasi, serta promosi energi terbarukan seperti tenaga surya dan biomassa. Untuk memperkuat konservasi ekosistem, kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk komunitas lokal, lembaga pendidikan, dan organisasi lingkungan, diintensifkan guna melindungi kawasan konservasi darat dan laut, sehingga keanekaragaman hayati tetap terjaga.

Program Prioritas Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029, diperlukan perencanaan yang matang, termasuk dalam aspek pendanaan. Kerangka Pendanaan Pembangunan menjadi bagian krusial dalam dokumen RPJMD, karena menentukan kelayakan dan keberlanjutan program serta kegiatan pembangunan yang telah dirancang.

Pendanaan pembangunan daerah harus bersumber dari berbagai mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana transfer dari pemerintah pusat, pendanaan dari sektor swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Oleh karena itu, strategi optimalisasi sumber daya keuangan menjadi faktor utama dalam menjamin efektivitas implementasi program pembangunan.

Penyusunan Kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Lampung Barat mempertimbangkan proyeksi penerimaan daerah, kebijakan pengelolaan keuangan daerah, serta upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran. Dengan perencanaan pendanaan yang terarah dan realistis, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Tabel 3.8 Program Prioritas

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
VISI : LAMPUNG BARAT HEBAT DAN SETIA MENUJU INDONESIA EMAS 2045				
Misi 1				
Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Sehat dan Cerdas, dan berbudaya	Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	
			Angka Kemiskinan	
		Meningkatnya Sumberdaya Manusia yang yang berkualitas dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pembinaan Perpustakaan

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
		Meningkatnya Kualitas Keluarga, Kesenjangan Gender, Masyarakat Inklusif dan perlindungan anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
			Indeks Perlindungan Anak	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
		Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	
			Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Menurunnya Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan	Angka Kemiskinan	
			Gini Rasio	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
				0
				0
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
		Meningkatnya Ketahanan dan kemandirian pangan	Indeks Ketahanan Pangan	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan Daerah		Persentase pemajuan kebudayaan daerah	
		Meningkatnya Pelestarian Pemajuan Kebudayaan Daerah	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	
			Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
Misi 2				
Mewujudkan Ekonomi Tumbuh Secara Inklusif dan Membangun Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis potensi sumber daya lokal	Terwujudnya daya saing ekonomi yang berbasis ekonomi kemasyarakatan dan ekonomi lokal		Laju pertumbuhan ekonomi (Persen)	
			PDRB per kapita (Rp Juta)	
		Meningkatnya kualitas dan produktifitas ekonomi	PDRB per kapita (Rp Juta)	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	
			Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	
			Tingkat Inflasi (%)	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	
			Nilai investasi (Rupiah)	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				Program Penempatan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
				PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten
		Meningkatnya daya saing koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam perekonomian daerah	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	
			Persentase koperasi Sehat	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
				PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Misi 3				
Mewujudkan Birokasi yang amanah, menjunjung tinggi hukum dan berkeadaban	Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		Indeks Daya Saing Daerah	
			Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	
			Indeks Pelayanan Publik	
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Indeks Daya Saing Daerah	
			Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	
			Indeks Pelayanan Publik	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA
				PROGRAM PENATAAN DESA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
				PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
				Program Pengelolaan Arsip
				Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
				0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				0
				0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Misi 4				

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
Meningkatkan Kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan.	Terwujudnya lingkungan hidup dan sumberdaya alam yang berkualitas		Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	
		Meningkatnya kualitas lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup Daerah	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Misi 5				
Mewujudkan Masyarakat beriman dan bertakwa, harmonis dengan semangat bergotong royong	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, tertib, aman dan damai		Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	
			Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	
			Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
		Meningkatnya Keamanan, ketertiban, kenyamanan dalam kehidupan masyarakat	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	
			Tingkat kriminalitas	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
		Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan demokrasi	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
				PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
				PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
				PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
				PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Misi 6				
Mewujudkan Infrastruktur berkualitas dan menjangkau seluruh pelosok daerah	Terwujudnya Infrastruktur yang Berkualitas dan berkeadilan serta tangguh bencana		Indeks layanan infrastruktur daerah,	
			Indeks Resiko Bencana	
		Meningkatnya kualitas layanan infrastruktur	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
				1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
				PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
				PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
				PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
				PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
				PENGELOLAAN PELAYARAN
		Meningkatnya kesiapsiagaan bencana	Indeks Resiko Bencana	
				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
				0
				0

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Program Prioritas
				0
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Program Unggulan “Sat Ananda Sakti”

Program Unggulan “Sat Ananda Sakti” atau Enam program sakti menuju kebahagiaan, merupakan salah satu fokus utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029. Program ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup warga. Dengan mengusung semangat gotong royong dan kolaborasi, “Sat Ananda Sakti” bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal, memperbaiki layanan publik, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab.

Melalui Program Unggulan “Sat Ananda Sakti,” Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk mengimplementasikan berbagai inisiatif strategis yang meliputi pengembangan sektor pertanian, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Program ini juga menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat agar mampu menjadi pelaku aktif dalam pembangunan daerah. Dengan pendekatan partisipatif dan terintegrasi, “Sat Ananda Sakti” diharapkan dapat menjadi katalisator transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, sekaligus meningkatkan daya saing Kabupaten Lampung Barat di tingkat regional maupun nasional selama periode 2025-2029.

Tabel 3.8 Program Unggulan “Sat Ananda Sakti”

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
A	SDM Berakhlak	Seragam dan Tas Gratis	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Jenis, 13.332 Siswa	2 Jenis, 13.599 Siswa	3 Jenis, 13871 Siswa	3 Jenis, 14.148 Siswa	3 Jenis, 14.432 Siswa
		Beasiswa S1 Jurusan Terkait Kopi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
		Semua Bisa Sekolah (Pendidikan Kesetaraan)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga	12 Lembaga
		Seniman Masuk Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Orang	24 Orang	26 Orang	30 Orang	40 Orang
		Pembinaan Sanggar Seni	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	49 Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga	49 Lembaga
		Optimalisasi Taman Budaya Lamban Pancasila	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan	12 Kegiatan
		Bebas Stunting	Dinas Kesehatan	12.5	12	11.5	10.9	10.3
		Penguatan SDM Kesehatan	Dinas Kesehatan	beasiswa dokter umum: 5	beasiswa dokter umum: 5	beasiswa dokter umum: 5	beasiswa dokter umum: 2	-
				dokter umum: 8	dokter umum: 11	dokter umum: 11	dokter umum: 14	dokter umum: 16
				beasiswa dokter gigi: 4	beasiswa dokter gigi: 6	beasiswa dokter gigi: 8	beasiswa dokter gigi: 10	beasiswa dokter gigi: 12

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Kemiskinan turun (nutrisi lansia dan kelompok rentan lainnya)	Dinas Sosial	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang	1.000 orang
		Kemiskinan turun (Bantuan KUBE)	Dinas Sosial	50 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	50 kelompok	50 kelompok
		Penurunan pengangguran melalui revitalisasi peranan BLK	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	1%	1%	1%	1%	1%
B	Ekonomi Gotong Royong	1 Penguatan sektor pertanian melalui bantuan sarana prasarana						
		<i>"Budidaya Kopi Berkelanjutan"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan Bibit Kopi Unggul		100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha	100 Ha
		<i>"Bebas OPT Kopi"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan perangkat hama PBKo (Penggerek Buah Kopi)		20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha	20 Unit/Ha 100 Ha
		<i>"Mutu Kopi Terbaik"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		- Bantuan Huller		20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
		- Bantuan Pemecah Biji Kopi Basah		20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit
		- Bantuan Mesin Roasting, Mesin <i>Packaging</i> , dan Mesin Pembubuk		2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan	2 Paket/Kec 5 Kecamatan
		- Terpal Jemur (Optimalisasi Dasa Desa)		500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar	500 Lembar
		- Mesin Babat Rumput		200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit	200 Unit
		<i>"Konsumsi Pangan Hewani Meningkat"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan Budidaya Ayam Buras		1500 ekor	1500 ekor	1500 ekor	1500 ekor	1500 ekor
		- Bantuan Budidaya Ternak Kambing		500 ekor	500 ekor	500 ekor	500 ekor	500 ekor
		2 Kemiskinan Turun						
		<i>"Tumpang Sari Kopi"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bantuan saprodi dan pembinaan diversifikasi tanaman kopi dengan tanaman pangan atau		50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha	50 Ha

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		hortikultura						
		- Integrasi kopi dengan ternak kambing		5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha	5 ekor/Ha 50 Ha
		- Mesin Pencacah Rumput/ <i>Chopper</i> untuk pakan ternak		10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
		- Mesin APPO (Alat Pengolahan Pupuk Organik)		3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
		3 Penguatan SDM Pertanian						
		<i>"SDM Pertanian Unggul"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Bimbingan teknis atau pembinaan terhadap kelompok tani komoditas tanaman perkebunan		10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok
		- Diklat Paramedik Peternakan		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
		- Diklat Inseminator		5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang
		Pelatihan di Sekolah Kopi						
		- Pelatihan Budidaya Kopi		125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang	125 Orang

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		- Pelatihan <i>Green Grading/Sortasi</i> Biji Kopi		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		- Pelatihan <i>Roasting</i> Kopi		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		- Pelatihan Uji Cita Rasa Kopi		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		- Pelatihan Barista		50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang	50 Orang
		Penguatan Pendidikan Advokasi						
		- Pembentukan Kurikulum Pelatihan Sesuai SKKNI Kopi dan Standar Ekspor		1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum	1 Kurikulum
		- Peningkatan Fasilitas dan alat Pelatihan						
		- Ruang Kelas			1 Ruang Kelas			1 Ruang Kelas
		- Alat Pelatihan		Kelengkapan Kelas Pelatihan Budi Daya	Kelengkapan Kelas Green Grading	Kelengkapan Kelas Roasting	Kelengkapan Kelas Barista	
		- Pembentukan Komunitas Penggiat Kopi		1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok
		Peningkatan Keterlibatan Generasi Muda						

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		- Lomba Kopi dengan menggandeng anak muda sebagai pelaksana dan Peserta kegiatan		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		- Mengikutsertakan generasi muda dalam pameran dan kompetensi		1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali
		4 Sekolah Kopi Masuk Pekon						
		<i>"Sekolah Kopi Masuk Pekon"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		Optimalisasi Dana Desa						
		- Sekolah Kopi Masuk Pekon sebagai wadah pelatihan bagi petani kopi dari cara budidaya yang baik hingga proses pasca panen, pengolahan dan lainnya dengan memanfaatkan potensi kopi di masing-masing		27 pekon	27 pekon	27 pekon	27 pekon	23 pekon

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		desa/pekon						
		- Pendampingan Tenaga Pengajar/ Tutor Sekolah Kopi		11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang
		5 Penanganan hulu hilir kopi robusta						
		<i>"Semua tentang Kopi"</i>	Dinas Perkebunan dan Peternakan					
		- Pemantauan, pembinaan, dan bimbingan teknis budidaya kopi berkelanjutan, mutu kopi, dan pengolahan kopi		15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok	15 Kelompok
		Program seribu sarana usaha dan pembinaan pelaku usaha perikanan dalam 5 (Lima) Tahun	Dinas Perikanan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan	200 Bantuan sarana serta pembinaan
		Investasi Meningkatkan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15,000,000,000	15,750,000,000	16,537,500,000	17,364,375,000	18,232,593,750

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Lampung Barat Creative Hub (Komunitas) Sebagai kolaborator pada Event-Event (kegiatan) Promosi/Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Baik di dalam daerah, luar daerah, maupun nasional yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Contoh : Pagelaran/Festival baik di dalam maupun luar daerah, Pameran Potensi Pariwisata Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya, dll.	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	3 kegiatan	3 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan
		BUMDES Berdaya Saing	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	5 Bumdes Status berkembang	6 Bumdes Status berkembang	7 Bumdes Status berkembang	8 Bumdes Status berkembang	9 Bumdes Status berkembang

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		UMKM naik kelas	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	55 UMKM dan Koperasi	60 UMKM dan Koperasi	66 UMKM dan Koperasi	72 UMKM dan Koperasi	79 UMKM dan Koperasi
		Koperasi Merah Putih	Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan	136 desa/kel				
		Sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura						
		- Irigasi Pertanian Baik	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit	50 Unit
		Penguatan SDM Pertanian						
		- Penyuluh Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang	70 Orang
		- Kelompok Tani	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani	140 Kelompok Tani
C	Pemerintahan Transparan dan Melayani	Jemput Bola Pelayanan administrasi Kependudukan (Jebol Pelanduk)	Dinas Kependudukan dan Pencatata Sipil	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali	15 kali

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Mall Pelayanan Publik (Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200
		<i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Kesehatan (Puskesmas dan RSUD)</i>	Dinas Kesehatan	83.00	84.00	85.00	86.00	86.00
		Kepatuhan Penyelenggara Negara Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100%	100%	100%	100%	100%
		Birokrasi bebas korupsi	Inspektorat	3 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD)	3 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD)	4 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD, Puskesmas Balik Bukit)	4 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD, Puskesmas Balik Bukit)	4 OPD Disduk, Dinas PM PTSP, RSUD, Puskesmas Balik Bukit)

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Sosialisasi dan pembinaan anti korupsi (Sosialisasi dan pembinaan anti korupsi)	Inspektorat	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)	2 Jenis (Sosialisasi anti korupsi dan sosialisasi saber pungli)
		Pamong Membangun Inovasi Berkelanjutan (PM INTAN)	Badan Riset dan Inovasi Daerah	140 Inovasi	152 Inovasi	164 Inovasi	176 Inovasi	188 Inovasi
		Transformasi Digital Pelayanan Publik (satu klik untuk layanan publik)	Dinas Komunikasi dan Informatika	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan	2 Layanan
		Kegiatan sinkronisasi dan harmonisasi APBD dengan Dana Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	131 pekon	131 pekon	131 pekon	131 pekon	131 pekon
D	Lambar Sejuk dan Bersih	Kampanye sehari tanpa kendaraan bermotor (sepeda santai)	Dinas Lingkungan Hidup	200 peserta	250 peserta	300 peserta	350 peserta	400 peserta
		Bibit Tanaman Gratis	Dinas Lingkungan Hidup	2001 batang	2500 batang	3000 batang	3500 batang	4000 batang
		Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 5 Pekon = 25 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 5 Pekon = 25 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 6 Pekon = 30 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 6 Pekon = 30 Buah)	Tempat Sampah 1 Pekon 5 Buah (5 x 6 Pekon = 30 Buah)

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Pengembangan Geopark Kaldera Suoh	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1 Dokumen Penetapan Geopark	1 Dokumen Penetapan Sekolah Lapang Geologi	1 Dokumen Pelestarian Cagar Budaya	1 Lokasi Pusat Konservasi dan Rehabilitasi Flora dan Fauna	1 Dokumen Penetapan Geopark oleh UNESCO
E	Beriman dan bertoleransi	Bantuan Marbot, Imam, Guru Ngaji, Hafis qur'an, Guru Agama katolik dan Kristen	Sekretariat Daerah	136 Orang, 136 Orang, 544 Orang, 20 orang, 2 orang, 2 orang	272 Orang, 272 Orang, 544 Orang, 20 orang, 2 orang, 2 orang	272 Orang, 272 Orang, 544 Orang, 25orang, 2 orang, 2 orang	408 Orang, 408 Orang, 680 Orang, 2025orang, 2 orang, 2 orang	408 Orang, 408 Orang, 608 Orang, 30 orang, 2 orang, 2 orang
		Umroh Gratis dan Pelayanan Haji dan Wisata Religi	Sekretariat Daerah	100 Orang, 600 orang, 150 orang	125 Orang, 600 orang, 150 orang	150Orang, 600 orang, 200 orang	150 Orang, 600 orang, 200 orang	150 Orang, 600 orang, 200 orang
		Pembangunan Masjid	Sekretariat Daerah	1 Masjid	1 Masjid	1 Masjid	1 Masjid	1 Masjid
		Bantuan Rumah Ibadah	Sekretariat Daerah	20 Masjid	20 Masjid	20 Masjid	20 Masjid	20 Masjid
F	Infratraktur Mantap	Pembangunan Pustu Pekon	Dinas Kesehatan	7	3	4	3	1
		Jalan Bagus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.10%	60.40%	61.80%	63.30%	65.00%
		Irigasi Bagus	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	60.00%	60.95%	61.90%	62.85%	63.80%

NO	SAT ANANDA SAKTI	RINCIAN SAT ANANDA SAKTI	OPD	TARGET				
				2026	2027	2028	2029	2030
		Sanitasi sehat dan layak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	99.65%	99.75%	99.85%	99.95%	100.00%
		Air minum layak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	91.25%	92.25%	93.25%	94.25%	95.25%
		Seluruh wilayah terkoneksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	59.10%	60.40%	61.80%	63.30%	65.00%
		Penataan Kota Liwa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	Zona 6	Zona 1, 6 dan 7	Zona 6, 8 dan 9	Zona 8 dan 9	Zona 4

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Program Perangkat Daerah

Dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025–2029, diperlukan perencanaan program yang terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memperhatikan potensi dan permasalahan daerah. Program-program pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD ini dirancang melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down, dan dituangkan dalam program kerja masing-masing perangkat daerah.

Program perangkat daerah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Setiap program mencerminkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Setiap perangkat daerah wajib menyusun program dan kegiatan secara rinci, yang akan dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan dijadikan dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Program-program tersebut juga harus mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah (IKU) serta selaras dengan indikator kinerja perangkat daerah.

Dalam pelaksanaannya, sinergi antar perangkat daerah sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program, menghindari tumpang tindih kegiatan, serta memastikan keterpaduan antar sektor. Evaluasi secara berkala akan dilakukan untuk menilai efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan, guna mencapai target-target pembangunan secara optimal.

Program Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.96	79.50	79.50	295,732,947,135	79.55	325,271,659,827	80.00	357,712,507,161	80.10	393,387,939,619	80.15	432,629,815,323	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya mutu layanan Satuan Pendidikan jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	56.52		56.85	73,006,043,600	57.00	91,623,799,000	58.00	95,093,249,000	59	99,667,951,000	60	111,965,865,120	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	98.40		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	14.91		15.21		20.00		25.00		30.00		35.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor Kemampuan Literasi SD	71.32		75.51		76.27		77.03		77.80		78.58		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor Kemampuan Literasi SMP	66.54		71.09		71.80		72.52		73.24		73.97		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor Kemampuan Numerasi SD	68.09		69.45		70.84		72.26		73.71		75.18		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Skor Kemampuan Numerasi SMP	65.12		65.12		66.42		67.82		69.22		70.62		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	37.96		39.86		41.76		43.76		45.96		48.26		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	73.43		74.93		76.43		78.03		79.63		81.23		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Inklusivitas SD	57.57		58.77		59.97		61.27		62.47		63.77		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Inklusivitas SMP	54.97		69.47		70.87		72.27		73.67		75.07		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Keamanan SD	72.96		74.46		75.96		77.46		78.96		80.46		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Keamanan SMP	66.76		68.16		69.56		70.96		72.36		73.76		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Kebinekaan SD	68.56		69.96		71.36		72.76		74.16		75.56		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Iklim Kebinekaan SMP	69.09		70.49		71.89		73.29		74.69		76.09		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan	41.51	55.00	55	850,000,000	65	1,200,000,000	80	1,250,000,000	90	1,300,000,000	100	1,350,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.04	PROGRAM PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Terlaksananya Pemetaan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan Guru TK	102	102	101	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Indeks Pemerataan Guru SD	88	87	90		92		95		98		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Indeks Pemerataan Guru SMP	107	107	106		104		102		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlaksananya Pengembangan sastra daerah	Persentase sastra daerah yang dikembangkan	15	15	23	66,229,680	31	72,852,648	38	80,137,912	46	88,151,704	54	96,966,874	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								-		-		-		-	
1 2 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	81	79	77.6	116,837,959,803	78.8	116,831,334,193	79.3	121,462,793,843	79.9	121,517,183,086	80.5	121,551,183,086	Dinas Kesehatan
1 2 2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Terlaksananya Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	CDR TB			58.00%	88,827,730,935	60.00%	93,835,320,521	65.00%	97,831,996,604	67.00%	100,988,798,831	70.00%	101,007,298,831	Dinas Kesehatan
			Hasil Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	100.00%	100.00%	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		
			Fasilitas Pelayanan KesehatanTerakreditasi Paripurna	100.00%	100.00%	13		13		14		15		15		
			Cakupan Kepesertaan JKN (%)			98.53		98.82		99.11		99.39		100		
			Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan Kesehatan Puskesmas	87.00%	88.00%	86.00%		87.00%		88.00%		89.00%		90.00%		
			Persentase capaian Sarana Prasarana Alat Kesehatan (SPA) Fasilitas Pelayanan RSUD	60.00%	62.00%	67.70		67.9		68		68.2		68.4		
1 2 3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes yang memenuhi SDMK sesuai standart	65.00%	70.00%		7,378,431,200		7,378,431,200		7,600,341,010		7,813,893,320		7,813,893,320	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase SDM RSUD yang memenuhi standart	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
			Persentase Nakes RSUD yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Terlaksananya Peningkatan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase Sarana Distribusi Serta Produk Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman yang di lakukan pengendalian dan pengawasan	80.00%	85.00%	75.00%	422,081,000	80.00%	422,081,000	82.50%	447,383,325	85.00%	464,289,100	90.00%	464,289,100	Dinas Kesehatan
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Terlaksananya Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Keluarga ber PHBS	40.00%	45.00%	58.00%	227,790,000	58.50%	227,290,000	60.00%	240,844,200	60.50%	248,853,300	0.68	248,853,300	Dinas Kesehatan
			Persentase Posyandu Siklus Hidup			35.00%		45.00%		55.00%		60.00%		70.00%		
1.3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								-		-		-		-	
1.03.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMRINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81.85	80.05	80.3	7,688,069,900	80.55	8,304,729,890	80.8	8,983,802,879	81.05	9,730,683,167	81.3	9,730,683,167	DINAS PUPR
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigas	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir		0.915	1.1	11,819,120,000	1.1	20,089,720,000	1.1	21,827,720,000	1.1	20,973,820,000	1.1	20,973,820,000	DINAS PUPR
			Persentase Luas Layanan Irigasi Multi komoditas	58.17	59.09	60		60.95		61.9		62.85		63.8		
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyaluran Air Minum		88.81	89.15	6,600,000,000	89.49	6,100,000,000	89.83	6,600,000,000	90.17	6,600,000,000	90.52	6,600,000,000	DINAS PUPR
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)		96.35	96.6	9,000,000,000	96.85	9,000,000,000	97.1	6,000,000,000	97.35	6,000,000,000	97.6	12,000,000,001	DINAS PUPR

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Kualitas sistem drainase lingkungan	Persentase drainase lingkungan dalam Kondisi Baik	6.59	100	25	2,100,000,000	50	2,100,000,000	75	1,100,000,000	100	1,100,000,000	75	1,100,000,000	DINAS PUPR
1.03.07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik			10	6,500,000,000	25	6,000,000,000	50	6,500,000,000	75	6,500,000,000	100	6,500,000,000	
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung Pemerintahan	Persentase Bangunan gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	50	75	10	10,500,000,000	25	10,500,000,000	50	10,500,000,000	75	10,500,000,000	100	10,500,000,000	DINAS PUPR
1.3.9	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yag tertatat	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungannya		0	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	15	600,000,000	40	1,400,000,025	DINAS PUPR
1.3.10	PROGRAM PENYELENGGARAA N JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang aman dan nyaman	Persentase Jalan Mantap	58.8	59.1	60.4	71,041,033,880	61.8	74,590,000,000	63.3	78,316,000,000	65	82,226,800,000	66.7	82,226,800,000	DINAS PUPR
1.3.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya layanan data dan informasi jasa konstruksi	Persentase Ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	100	100	20	300,000,000	40	300,000,000	60	300,000,000	80	300,000,000	100	300,000,000	DINAS PUPR
1.3.12	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENATAAN RUANG	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan penataan Ruang	Persentase Pemanfaatan Ruang di Kabupaten	100	100	20	2,358,000,000	40	2,365,900,000	60	2,374,195,000	80	2,382,904,750	100	2,698,095,000	DINAS PUPR
1 4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								-		-		-		-	
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara terkena bencana	Persentase penanganan Rumah korban Bencana / Relokasi program pemerintah	0	75	25	2,358,000,000	50	2,365,900,000	75	2,374,195,000	100	2,382,904,750	100	2,698,095,000	DINAS PUPR
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh yang ditangani		0.25	0.05	3,300,000,000	0.55	3,300,000,000	0.25	3,300,000,000	0.25	3,300,000,000	0.85	3,300,000,000	DINAS PUPR
1 5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								-		-		-		-	
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan informasi rawan bencana	Persentase cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana			0.06%	42,725,400	0.06%	150,000,000	0.06%	150,000,000	0.06%	400,000,000	0.06%	150,000,000	BPBD
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase desa tangguh bencana	26%	29%	35%	1,115,901,500	40%	1,452,552,460	44%	1,462,476,220	49%	1,511,223,842	53%	2,114,846,226	BPBD

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	504,830,150	100%	578,311,225	100%	649,263,347	100%	714,181,682	100%	773,366,509	BPBD
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase dokumen Rekomendasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)			70.00%	234,752,000	0.7	513,000,000	70.00%	535,000,000	70.00%	560,000,000	70.00%	585,000,000	BPBD
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	82.00	82.00	82.00	3,388,662,551	82.00	3,468,219,538	82.00	3,721,165,492	82.00	3,999,406,041	82.00	4,305,470,645	BPBD
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1 05 02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase Peningkatan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keindahan (K3) yang terselesaikan			80.00	5,440,000,000	85.00	5,440,000,000	90.00	4,442,000,000	95.00	4,442,000,000	100.00	4,442,000,000	Satpol PP dan Damkar
1 05 04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran			92%	6,710,000,000	94%	6,710,000,000	96%	6,910,000,000	98%	7,165,000,000	100%	7,165,000,000	Satpol PP dan Damkar
1 6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								-		-		-		-	
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip OPD			79,20	3,857,399,800	79,30	4,222,111,720	79,40	4,622,314,812	79,50	5,002,379,750	79,60	5,365,813,152	Dinas Sosial
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		% PSKS yang Aktif			31.39%	516,353,900	31.39%	516,353,900	31.39%	522,353,900	31.39%	528,353,900	31.39%	535,353,900	Dinas Sosial
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi			28.35%	679,848,000	32.11%	730,897,600	35.88%	770,655,360	39.65%	834,388,896	43.42%	862,495,786	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			75.00%	1,551,953,000	74.78%	1,582,948,300	74.78%	1,611,543,130	74.78%	1,642,997,443	74.78%	1,703,661,187	Dinas Sosial
			IKM			B Poin	110,000,000	B Poin	120,000,000	B Poin	125,000,000	B Poin	135,000,000	A Poin	155,000,000	Dinas Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid			100%	1,667,151,000	100%	1,710,151,000	100%	1,788,051,000	100%	1,873,281,000	100%	1,965,514,000	Dinas Sosial
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA		Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima			100%	694,515,000	100%	809,466,500	100%	865,913,150	100%	1,022,904,465	100%	1,093,494,912	Dinas Sosial
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		% komponen utama taman makam pahlawan			78.57%	130,850,000	78.57%	150,000,000	78.57%	175,000,000	78.57%	185,000,000	78.57%	200,000,000	Dinas Sosial
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								-		-		-		-	
02.07.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP			80.00	3,904,500,000	80.00	3,904,500,000	80.00	3,904,500,000	80.00	3,904,500,000	80.00	3,904,500,000	Disnakerprin LB
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA		Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro			1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	Disnakerprin LB
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi			40 Orang	650,000,000	40 Orang	650,000,000	40 Orang	650,000,000	40 Orang	650,000,000	40 Orang	650,000,000	Disnakerprin LB
02.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase penempatan tenaga kerja disektor Formal dan Non Formal			5%	600,000,000	5%	600,000,000	5%	600,000,000	5%	600,000,000	5%	600,000,000	Disnakerprin LB
2.07.05	Program Hubungan Industrial		Jumlah tenaga Kerja yang dilindungi dan Jumlah Lembaga dan LKS Tripartit yang Dibina			1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	150,000,000	Disnakerprin LB
2 8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								-		-		-		-	

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2 8 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas PPKBPPPA	Nilai SAKIP Dinas PPKB PPPA	77,9	78	78	3,871,651,705	78,5	3,985,388,855	79	4,269,586,010	79.5	4,528,920,881	80	4,896,603,068	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 8 2	PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	OUTCOME : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam nembangunan	% Anggaran Responsif Gender	2,5	3,5%	5.00%	64,818,000	6.00%	360,000,000	7.00%	440,000,000	8.00%	410,000,000	10.00%	495,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 8 3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif			100	71,184,200	100	214,381,000	100	453,190,000	100	185,541,000	100	209,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 8 4	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender , pemenuhan hak seta perlindungan perempuan dan anak	Puspaga yang berspektif gender dan hak anak sesuai standar	0	0	0	71,048,000	0	132,000,000	1	152,000,000	1	172,000,000	1	192,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 8 5	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Outcome: Meningkatnya pemanfaatam data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan evaluasi dan atau penyusunan kebijakan	belum ada data		10	31,157,700	20	60,000,000	30	70,000,000	40	80,000,000	50	90,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 8 6	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Terjaminya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Indeks pemenuhan hak anak (IPHA)	57,29		59	239,596,700	59.5	263,500,000	60	286,000,000	60.5	318,000,000	61	352,000,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 8 7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi, penelantarn , perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	% Anak yangmemerlukan perlindungan khusus mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	507,741,000	100	558,610,000	100	507,741,000	100	683,520,000	100	751,272,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
2 9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								-		-		-		-	
2.09.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	73.00	80.00	80.00	2,931,000,000	80.00	2,945,000,000	80.00	2,959,000,000	80.00	2,963,000,000	80.00	2,967,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Terwujudnya Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	125,28	100%	100%	60,000,000	100%	105,000,000	100%	130,000,000	100%	135,000,000	100%	135,000,000	Dinas Ketahanan Pangan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Terwujudnya konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman	Skor Pola Pangan Harapan (Konsumsi)	87 skor	87,5 skor	88 skor	933,440,000	88,5 skor	979,000,000	89 skor	1,030,000,000	89,5 skor	1,080,000,000	90 skor	1,149,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	12,50%	11,02%	10,5%	207,000,000	10%	220,000,000	9,5%	233,000,000	9%	246,000,000	8,5%	259,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya keamanan pangan segar	Persentase pangan segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	97%	97%	98,12%	250,000,000	98,58%	250,000,000	99,04%	250,000,000	99,05%	250,000,000	100%	250,000,000	Dinas Ketahanan Pangan
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN								-		-		-		-	
2.10.3	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	Meningkatnya ketersediaan lahan untuk kepentingan Pemerintah	Persentase persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan pemerintah			20	200,000,000	40	200,000,000	60	200,000,000	80	200,000,000	100	200,000,000	DINAS PUPR
2.10.4	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian konflik, sengketa dan perkara pertanahan	persentase penyelesaian Konflik, sengketa, dan perkara pertanahan	100	100	20	120,000,000	40	90,000,000	60	120,000,000	80	120,000,000	100	120,000,000	DINAS PUPR
2.10.5	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	meningkatkan penyelesaian ganti rugi kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan			20	700,000,000	40	700,000,000	60	700,000,000	80	700,000,000	100	700,000,000	DINAS PUPR
2.10.7	PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	meningkatnya pengelolaan tanah ulayat	Persentase tanah ulayat yang di tetapkan			20	50,000,000	40	50,000,000	60	50,000,000	80	50,000,000	100	50,000,000	DINAS PUPR
2.10.8	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	meningkatnya pengelolaan tanah kosong	persentase tanah kosong yang dikelola	100	100	20	1,130,000,000	40	950,000,000	60	900,000,000	80	900,000,000	100	900,000,000	DINAS PUPR
2.10.12	PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH	Meningkatnya Kejelasan hak atas tanah bagi pemerintah dan masyarakat	ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah			20	460,000,000	40	300,000,000	60	300,000,000	80	300,000,000	100	300,000,000	DINAS PUPR
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								-		-		-		-	
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup	82.46	81.98	81.99	3,742,028,830	82.00	9,658,224,295	82.10	10,624,046,725	82.15	11,686,451,397	82.20	12,855,096,537	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya Efektivitas Kajian Lingkungan untuk Mitigasi dampak KRP	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	277,090,500	100%	304,799,550	100%	335,279,505	100%	368,807,456	100%	705,688,201	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Baku Mutu Air	69.00	58.74	82.30 Point	318,268,500	82.50 Point	650,095,350	82.70 Point	705,604,885	82.90 Point	766,665,374	83.10 Point	843,831,910	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Baku Mutu Udara	93.52	84.24	72.89 Point		73.29 Point		73.69 Point		74.09 Point		74.49 Point		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Kualitas Lahan	42.32	52.82	65.86 Point	1,904,696,056	65.93 Point	2,245,165,662	66.00 Point	2,414,682,228	66.07 Point	2,656,150,451	66.14 Point	2,991,765,496	Dinas Lingkungan Hidup
			Luasan Ruang Terbuka Hijau dan Taman Keanekaragaman Hayati	20	20	20 Ha		20 Ha		20 Ha		20 Ha		20 Ha		Dinas Lingkungan Hidup
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pelaku Usaha Yang Mengajukan Izin Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	100%	100%	100%	26,570,600	100%	3,200,000,000	100%	3,520,000,000	100%	3,872,000,000	100%	4,259,200,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya Kepatuhan Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Pemegang Izin Lingkungan	100%	100%	80%	53,901,000	80%	659,291,100	80%	725,220,210	80%	797,742,231	80%	877,516,454	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan lokal, Pengetahuan tradisional dan bak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	0%	0%	0%	-	1%	300,000,000	1%	330,000,000	1%	363,000,000	1%	399,300,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	meningkatkan kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Peningkatan dan Keikutsertaan Aparatur dan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	100%	100%	100%	47,860,000	100%	107,646,000	100%	118,410,600	100%	130,251,660	100%	143,276,826	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	meningkatkan kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persentase sekolah yang mendapatkan penghargaan	10%	10%	10%	159,557,000	10%	175,512,700	10%	193,063,970	10%	212,370,367	10%	233,607,404	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	peningkatan penyelesaian sengketa / kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persetase Pengaduan Lingkungan hidup yang Tertangani	0%	0%	100%	-	100%	285,000,000	100%	313,500,000	100%	344,850,000	100%	379,335,000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	meningkatkannya tata kelola persampahan	Persentase Pengurangan Sampah	4.25	30	25	3,572,939,200	21	6,761,961,920	24	11,211,158,112	27	12,332,273,923	30	13,565,501,316	Dinas Lingkungan Hidup
			Persentase Penanganan Sampah	28.28	70	75		79		76		73		70		Dinas Lingkungan Hidup
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								-		-		-		-	
5.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	-	2.94%	3.16%	437,298,500	3,38%	521,028,350	3,61%	573,131,185	3,83%	630,444,304	4,06%	693,488,734	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase Kepemilikan Kartu Identitas anak	81.51%	81.60%	82%		81,80%		81,90%		82.00%		82.10%		
5.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan Pencatatan Sipil	Persentase Akta kematian yang diterbitkan bagi yang	100%	100%	100.00%	150,624,500	100.00%	210,686,950	100.00%	231,755,645	100.00%	254,931,210	100.00%	280,424,330	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase akta kelahiran yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
			Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
5.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya Pemanfaatan Informasi kependudukan	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	80%	80%	63%	583,330,000	73%	701,663,000	81%	771,829,300	90%	849,012,230	100%	933,913,453	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase pengajuan perjanjian kerjasama selesai ditindaklanjuti	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
5.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	-	-	75%	30,721,900	79%	33,794,090	82%	37,173,499	86%	40,890,849	89%	44,979,934	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								-		-		-		-	

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUAPTEN/KOTA	Meningkatnya Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	82 poin	82,5 poin	83 poin	3,794,849,431	83,5 Poin	4,198,497,696	84 Poin	4,828,273,040	84,5 poin	5,552,513,996	85 poin	6,346,776,687	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	Meningkatnya Kualitas Penataan Desa	Persentase Fasilitas Penataan Desa	22.14	38.16%	53.44	1,195,689,150	61.07%	1,375,042,523	68.70%	1,806,298,901	76.34%	2,077,243,736	83.97%	2,388,830,296	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	2,29%	2,29%	2,29%	209,459,000	2,29%	335,877,850	2,29%	386,259,528	2,29%	444,198,457	2,29%	461,345,100	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentas Fasilitas Tata Kelola Desa	100%	100%	100%	3,120,859,550	100%	3,588,988,483	100%	4,127,336,755	100%	4,746,437,268	100%	5,458,402,858	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Pembangunan	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	50%	50%	50%	1,501,995,500	50%	1,777,294,825	50%	2,043,889,049	62,5%	2,585,472,406	75%	2,973,293,267	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
2 14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								-		-		-		-	
2 14 2	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	TFR	2,47		2,46	553,500,000	2,45	591,000,000	2,44	630,400,000	2,43	675,860,000	2,42	728,046,000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
			ASFR (15-19)	32,7		32,3		32		31,7		31,5		31		
2 14 3	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan KB	mCPR	75.7		75.6	4,339,555,450	75.7	4,768,710,995	75.8	5,239,982,094	75.9	5,761,670,303	76	6,330,136,832	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
			Un Meet Need	4,67		8,7		8,4		8,1		7,8		7,5		
2 14 4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Perentase catin mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting	86.00%		87.00%	1,570,548,400	88.00%	1,725,213,240	89.00%	1,894,984,050	90.00%	1,910,952,665	91.00%	2,098,547,041	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA
			Persentase kelompok sasaran mendapatkan pendampingan oleh TPK	86.8		87.8		89.8		90.8		91.8		92.8		
			Pelayanan KB Pasca Salin	87.6		88		89		90		91		92		
2 15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								-		-		-		-	

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.15.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80.81	81.00	81.00	4,128,009,000	81.24	4,578,309,900	81.65	5,003,140,890	82.06	5,536,454,979	82.47	6,007,215,477	Dinas Perhubungan
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya Pengendalian Ketertiban Lalu Lintas	persentase penurunan angka pelanggaran angkutan jalan	17	16	15	7,583,124,000	14	8,553,936,400	13	9,506,830,040	12	10,842,735,040	11	10,275,908,544	Dinas Perhubungan
			persentase ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal 'B' pada jam sibuk	8	9	10		15		20		25		30		Dinas Perhubungan
			persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	7	8	10		20		30		40		50		Dinas Perhubungan
2.15.03	PENGELOLAAN PELAYARAN		Persentase Dermaga Sesuai Standar	4	5	5	450,000,000	10	55,000,000	15	500,500,000	20	66,550,000	25	73,205,000	Dinas Perhubungan
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA															
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	Nilai sakip OPD	82.5	82.6	84,00 Poin	2,935,345,500	85,00 Poin	2,935,345,500	86,00 Poin	2,935,345,500	87,00 Poin	2,935,345,500	88,00 Poin	2,935,345,500	Dinas Kominfo
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Indeks KIP	85.72	86	100.00%	3,676,765,400	100.00%	4,044,441,940	100.00%	4,448,886,134	100.00%	4,893,774,747	100.00%	5,383,152,222	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Terwujudnya transformasi layanan publik berbasis digital	Indeks PEMDI	2.62	2.70	2.80	1,247,248,750	2.90	1,371,973,625	3.00	1,509,170,988	3.10	1,660,088,086	3.20	1,826,096,895	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								-		-		-		-	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai Sakip OPD	84.21	84.21	86.21	3,806,868,540	87.21	4,190,355,394	88.21	4,609,390,933	89.21	5,070,330,027	90.21	6,324,539,049	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi aktif	25%	25%	26%	45,000,000	28%	49,500,000	30%	53,000,000	32%	58,000,000	34%	63,000,000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya Volume usaha koperasi	Persentase koperasi yang meningkat volume usaha	16%	16%	18%	48,000,000	20%	52,000,000	22%	57,000,000	24%	62,000,000.00	26%	68,000,000.00	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah	0.00.%	0.00.%	0.00%	50,000,000	0.50%	60,000,000	0.50%	70,000,000	0.50%	80,000,000	0.50%	90,000,000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								-		-		-		-	
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.41	79.5	80.5	2,455,065,000	81	2,700,571,500	81.5	2,970,628,650	82	3,267,691,515	82.5	3,594,460,667	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	0.00%	95.00%	95%	370,226,300	96%	407,248,000	97%	447,973,000	99%	492,769,000	99%	542,047,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit sesuai dengan Standar Layanan	100	100	100%		100%		100%		100%		100%		
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Persentase Kebijakan dan/atau Peraturan Perundang-undangan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	0.00%	20.00	25%	84,942,000	75%	350,000,000	100%	60,000,000	100%	-	100%	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	-23.00%	3.00%	5%	450,000,000	5%	1,760,000,000	10%	1,853,438,950	10%	1,956,221,795	15%	2,069,282,925	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan laporan pada tahun N-1	100.00%	90.00%	90%	125,317,900	92%	137,849,690	95%	151,634,659	95%	166,798,125	99%	183,477,937	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Persentase Layanan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Dapat Diakses dan Dipublikasikan Melalui Media Publikasi Website DPMPSTP	100.00%	100.00%	100%	34,000,000	100%	37,400,000	100%	41,140,000	100%	45,254,000	100%	49,779,400	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								-		-		-		-	
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Menigkatnya SAKIP perangkat daerah	Nilai SAKIP Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	72.75	73.75	75.36	4,095,661,090	76.87	4,505,227,199	78.40	4,955,749,919	79.97	5,451,324,911	81.57	5,996,457,402	Dinas Pora Pariwisata

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirarusaha Pemuda	2.93	2.99	3.04	1,428,653,000	3.11	1,571,518,300	3.2	1,728,670,130	3.33	1,901,537,143	3.5	2,091,690,857	Dinas Pora Pariwisata
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya prestasi olahraga	persentase atlet yang ikut event olahraga	38	41	42	1,920,278,200	43	2,112,306,020	44	2,323,536,622	45	2,555,890,284	46	2,811,479,313	Dinas Pora Pariwisata
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								-		-		-		-	
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.46	2.60	1.50	133,001,000	2.00	146,301,100	2.50	160,931,210	3.00	177,024,331	3.50	194,726,764	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								-		-		-		-	
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Indeks KAMI	1.00	1.50	2.00	705,000,000	2.50	775,500,000	3.00	853,050,000	3.50	938,355,000	4.00	1,032,190,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								-		-		-		-	
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya pemajuan kebudayaan Daerah	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan dan ditetapkan sebagai WBTB	13.49	13.49	16	715,564,700	17	730,214,430	18	803,235,873	19	883,559,460	20	971,915,406	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Terlaksananya pelestarian kesenian daerah	Persentase SDM Kesenian Pesrta Didik yang ditingkatkan pengetahuannya	0.83	1.55	2	379,985,000	2.29	417,983,500	3.04	459,781,000	3.79	505,759,500	4.53	556,335,250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase Lembaga Kesenian yang dibina	4.08	10	10.20		20.41		30.61		40.82		51.02		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya pengetahuan masyarakat lampung barat tentang informasi sejarah	Persentase peserta didik terbina pengetahuan sejarah lokalnya	-	-	0.56	50,000,000	1.12	50,000,000	1.68	100,000,000	2.24	100,000,000	2.80	150,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya Peringkat Kabupaten	Persentase Objek diduga Cagar Budaya dan Cagar Budaya kabupaten yang terverifikasi, terlindungi dan dikembangkan	7.52	10.75	12	217,166,900	14	238,883,590	16	262,771,949	18	289,049,144	20	317,954,058	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	71.96	79.50	79.50	465,076,700	79.55	511,584,370	80.00	562,742,806	80.10	618,324,349	80.15	680,422,781	UPT Lamban Pancasila
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								-		-		-		-	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.31	84.91	85.51	3,595,900,000	86.11	4,195,500,000	86.71	4,820,500,000	87.31	5,325,000,000	87.91	5,860,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Peningkatan Pemustaka	Persentase Peningkatan Jumlah Pengunjung Perpustakaan	0.79%	2.5%	3%	2,195,000,000	3%		3%		3%		3%		
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN								-		-		-		-	
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara Baku	50 Berkas	50 Berkas	35	695,000,000	35	860,000,000	35	1,040,000,000	35	1,210,000,000	35	1,400,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamat Arsip	Jumlah Arsip Perlindungan dan Penyelamat Arsip Daerah	5%	0.2%	5 Arsip	280,000,000	5 Arsip	350,000,000	5 Arsip	500,000,000	5 Arsip	600,000,000	5 Arsip	700,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								-		-		-		-	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN								-		-		-		-	
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Sakip Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	79.88	79.98	79.95	3,690,978,645	80.00	5,282,068,200	80.05	5,059,297,376	80.10	5,211,076,297	80.15	5,367,408,586	Dinas Perikanan
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.50%	1.50%	1.60%	339,982,000	1.70%	370,129,000	1.70%	381,232,870	1.70%	392,669,856	1.70%	404,449,952	Dinas Perikanan
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	7.00%	1.50%	1.60%	561,608,000	1.70%	563,495,600	1.80%	580,400,468	1.90%	597,812,482	2.00%	615,746,857	Dinas Perikanan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Meningkatnya Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Persentase pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	10.0%	10.0%	10%	114,452,000	10%	93,370,200	10%	96,171,306	10%	99,056,445	10%	102,028,139	Dinas Perikanan
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Pelaku Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	10%	10%	3%	237,038,000	5%	163,287,650	7%	168,186,280	10%	173,231,868	12%	178,428,824	Dinas Perikanan
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								-		-		-		-	
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya jumlah destinasi wisata yang memadai	Persentase Destinasi wisata yang memadai	4	4	4	1,396,355,760	4	1,535,991,336	4	1,689,590,470	4	1,858,549,517	4	2,044,404,468	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	58	58	67	752,757,800	75	828,033,580	83	910,836,938	92	1,001,920,632	100	1,102,112,695	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekraf yang aktif dan tervalidasi	0	0	2	250,260,000	3	275,286,000	5	302,814,600	6	333,096,060	8	366,405,666	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN								-		-		-		-	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas TPH	72,41 Point	74,16 Point	74.90 Point	9,131,033,900	75.28 Point	9,126,652,900	75.65 Point	9,128,288,900	76.03 Point	9,156,711,900	76.41 Point	9,166,711,900	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan sarana pertanian	Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian	5.99%	1.33%	1.30%	454,946,000	1.30%	456,895,000	1.33%	456,895,000	1.35%	459,260,000	1.40%	459,260,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya penyediaan prasarana pertanian	Persentase peningkatan prasarana pertanian	0.79%	1.33%	1.33%	380,493,000	1.35%	380,493,000	1.40%	500,493,000	1.40%	500,493,000	1.40%	500,493,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan bencana pertanian	100%	100%	100%	59,866,495	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	100%	85,000,000	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.27.06	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas kelembagaan pertanian	Persentase kelembagaan Tani yang meningkat kapasitasnya	13.31%	11.14%	0.1114	1,277,004,500	11.14%	1,035,931,500	11.14%	1,035,931,500	11.14%	1,035,931,500	11.14%	1,035,931,500	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Perkebunan dan Peternakan			81.15	5,831,664,870	81.60	6,217,865,150	81.17	6,280,918,150	81.18	6,347,123,800	81.19	6,416,639,733	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan penyediaan sarana pertanian			5%	1,027,461,400	5%	1,226,800,000	5%	1,288,140,000	5%	1,352,547,000	5%	1,420,174,350	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		Persentase peningkatan penyediaan prasarana pertanian			3%	1,193,771,700	3%	1,500,000,000	3%	1,575,000,000	3%	1,653,750,000	3%	1,736,437,500	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		Persentase pengendalian penyakit zoonosis			100%	375,000,000	100%	405,000,000	100%	425,250,000	100%	446,512,500	100%	468,838,125	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		Persentase pengendalian OPT			17.60%	84,436,500	17.60%	95,000,000	17.60%	99,750,000	17.60%	104,737,500	17.60%	109,974,375	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		Persentase kelembagaan petani terbina			20%	852,547,300	20%	975,000,000	20%	1,023,750,000	20%	1,074,937,500	20%	1,128,684,375	Dinas Perkebunan dan Peternakan
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								-		-		-		-	
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	meningkatnya pelaku usaha perdagangan yang mendapatkan izin tanda daftar gudang	Persentase gudang yang berizin	45%	45%	0%	-	6%	25,000,000	6%	27,500,000	6%	30,000,000	6%	32,500,000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang terbangun atau direvitalisasi	20.00%	20.00%	30.00%	721,746,880	40.00%	793,921,568	50.00%	873,313,725	60.00%	960,645,097	70.00%	3,349,627,270	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	% rata - rata perubahan harga bahan kebutuhan pokok, dan barang penting	0.01%	0.01%	3%	459,000,000	3%	505,000,000	3%	540,000,000	3%	575,000,000	3%	610,000,000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	meningkatnya omzet pelaku usaha perdagangan yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	Presentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh fasilitas pengembangan kapasitas	0%	0%	0%	150,000,000	10%	165,000,000	10%	180,000,000	10%	200,000,000	10%	210,000,000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3.30.06	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya % alat UTTP tertera sah	% Alat UTTP tertera sah	8.30%	8.30%	8.50%	94,000,000	8.70%	99,000,000	8.90%	105,000,000	9.10%	110,000,000	9.40%	114,000,000	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
3.30.07.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya Penjualan Produk Koperasi dan UMKM	% Produk Koperasi dan UMKM terfasilitasi penjualannya	10%	10%	12%	45,000,000	0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		0 UMKM		Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN								-			-			-	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pertumbuhan dan Omset IKM	Persentase Pertumbuhan IKM Lampung Barat	5%	5%	1%	7,500,000,000	1%	7,500,000,000	1%	7,500,000,000	1%	7,500,000,000	1%	7,500,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
			Persentase IKM yang memiliki kenaikan omset 10% pertahun	4%	4%	5%		5%		5%		5%		5%		Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
3.31.03.	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten	Meningkatnya pertumbuhan IKM Formal	Persentase pertumbuhan IKM formal	0%	10%	8%	130,000,000	12%	130,000,000	15%	130,000,000	18%	130,000,000	21%	130,000,000	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								-			-			-	
4.1	SEKRETARIAT DAERAH								-			-			-	
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						52,865,333,981		55,508,600,680		58,284,030,714		61,198,232,250		64,258,143,862	Sekretariat Daerah
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						10,226,437,300		10,737,759,165		11,274,647,123		11,838,379,479		12,430,298,453	Sekretariat Daerah
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						2,134,013,700		2,240,714,385		2,352,750,104		2,470,387,609		2,593,906,990	Sekretariat Daerah
4.2	SEKRETARIAT DPRD								-			-			-	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Sekretariat DPRD	81,50 Point	81,80 Point	77,50 Point	20,076,454,330	78,00 Point	20,195,007,783	78,50 Point	20,325,098,008	79,00 Point	22,739,019,500	79,50 Point	20,963,531,792	Sekretariat DPRD
		Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	0%	95.00%	100.00%	4,714,243,798	100.00%	5,138,847,099	100.00%	5,488,781,430	100.00%	6,902,402,587	100.00%	6,035,785,463	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya dukungan fasilitas Fraksi DPRD	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Dukungan Fraksi	0%	80.00%	80.00%	323,112,800	82.50%	348,470,706	85.00%	359,762,673	87.50%	715,740,000	90.00%	388,564,000	Sekretariat DPRD
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	100.00%	0%											Sekretariat DPRD

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah	Persentase Fasilitas Pembahasan Peraturan Daerah	0%	70.00%	75.00%	10,078,956,800	77.50%	10,367,971,995	80.00%	10,713,642,305	82.50%	12,677,750,940	85.00%	11,813,503,479	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Fasilitas Fungsi Pengawasan dan Anggaran	Persentase Fasilitas Pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD	0%	80.00%	80.00%	258,082,000	82.50%	264,534,050	85.00%	271,147,401	87.50%	285,016,418	90.00%	299,941,194	Sekretariat DPRD
			Persentase Fasilitas Anggaran yang dilaksanakan oleh DPRD	0%	90.00%	90.00%	347,352,800	92.50%	373,989,900	95.00%	402,885,801	97.50%	385,566,249	100.00%	417,762,874	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang terakomodir	Persentase aspirasi masyarakat yang terakomodir	0%	70.00%	70.00%	2,326,576,400	72.50%	2,443,415,990	75.00%	2,566,148,637	77.50%	1,813,596,697	80.00%	2,764,956,367	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Publikasi Kinerja DPRD kepada Masyarakat	Persentase Publikasi Kinerja DPRD kepada Masyarakat	100%	100.00%	95.00%	3,432,873,000	97.50%	3,607,850,650	100.00%	3,788,243,183	100.00%	4,647,525,600	100.00%	4,219,230,114	Sekretariat DPRD
		Meningkatnya Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	Persentase Dukungan dan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pimpinan DPRD	0%	90.00%	95.00%	3,684,060,800	97.50%	3,768,000,000	100.00%	3,877,425,000	100.00%	4,081,630,000	100.00%	4,297,993,000	Sekretariat DPRD
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								-		-		-		-	
5 1	PERENCANAAN								-		-		-		-	
X XX 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Bappeda			82,79	3,455,901,213	83,04	3,801,491,334	83,29	4,181,640,468	83,54	4,599,804,515	100	5,059,784,966	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5 01 02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	100.00%	100.00%	100.00%	1,790,754,500	100.00%	1,969,829,950	100.00%	2,166,812,945	100.00%	2,383,494,240	100.00%	2,621,843,663	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			Persentase keselarasan RPJMD dengan Rentra PD	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
5 01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan Perekonomian	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan, pembangunan manusia dan Perekonomian	100.00%	100.00%	100.00%	1,345,589,000	100.00%	1,480,147,900	100.00%	1,206,892,785	100.00%	1,324,124,664	100.00%	1,453,079,730	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur, kewilayahan dan Sumber Daya Alam	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang infrastruktur, kewilayahan dan Sumber Daya Alam	100.00%	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		
5 2	KEUANGAN								-		-		-		-	

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas SAKIP Perangkat Daerah BKAD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah BKAD	84,60 Poin	84,00 Poin	85,00 Poin	23,462,925,135	85,25 Poin	25,734,959,549	85,50 Poin	28,233,043,503	85,75 Poin	30,979,835,854	86,00 Poin	33,989,207,439	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Daerah	- Persentase Penetapan APBD tepat waktu - Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar - Persentase penyampaian Penatausahaan Keuangan tepat waktu oleh Perangkat Daerah - Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tepat waktu	- 100% - 95,44% - 100% - 100%	- 100% - 95% - 100% - 100%	- 100% - 95% - 100% - 100%	185,496,898,527	- 100% - 95% - 100% - 100%	204,046,588,380	- 100% - 95% - 100% - 100%	224,451,247,218	- 100% - 95% - 100% - 100%	246,896,371,939	- 100% - 95% - 100% - 100%	271,586,009,133	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Tepat Waktu	100%	100%	100%	2,171,372,100	100	2,388,509,310	100%	2,693,360,241	100%	2,890,096,265	100%	3,258,965,892	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah				3,463,955,723		3,983,547,001		4,581,079,082		5,268,236,942		5,923,916,316	Badan Pendapatan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		- Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran			100%	161,924,300	100%	125,693,000	100%	144,547,000	100%	166,229,000	100%	191,163,400	Badan Pendapatan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		- Persentase realisasi PAD			100%	4,998,233,900	100%	5,747,968,795	100%	6,610,163,615	100%	7,601,688,543	100%	8,741,942,029	Badan Pendapatan Daerah
5.3	KEPEGAWAIAN								-		-		-		-	
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai Sakip Perangkat Daerah	79.85	79.85	78.78	3,850,693,073	78.79	4,072,512,280	78.80	3,850,693,073	78.81	4,072,512,280	78.82	4,467,538,108	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan formasi	12%	0%	4%	415,171,900	8%	495,455,500	12%	544,997,000	16%	599,494,000	20%	659,441,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
			Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	1.12%	1.87%	4%	863,388,800	8%	2,083,824,000	12%	1,920,672,000	16%	1,972,736,000	20%	1,865,007,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	92%	69%	70%	967,390,000	73%	1,355,454,000	75%	1,503,383,000	78%	1,670,751,000	80%	1,855,823,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
5 5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								-		-		-		-	
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP OPD	83.11	84.91	80 poin	2,841,496,275	80,50 poin	2,857,857,275	81 poin	2,867,182,275	81,50 poin	2,871,382,275	82 poin	2,868,582,275	Badan Riset dan Inovasi Daerah
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Penelitian dan Pengkajian	Persentase penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan Inovasi yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	2,829,913,680	100%	3,422,690,000	100%	3,277,690,000	100%	3,402,690,000	100%	3,527,690,000	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya Kolaborasi antar Perangkat Daerah dan Stakeholder dalam Pengembangan Inovasi Daerah	Jumlah Inovasi Yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah	132	132	140 Inovasi		152 Inovasi		164 Inovasi		176 Inovasi		188 Inovasi		Badan Riset dan Inovasi Daerah
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN								-		-		-		-	
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83.00	83.50	83.50	11,096,132,475	84.00	12,205,745,723	84.50	12,449,216,497	85.00	13,694,138,146	85.50	15,063,551,961	Insptorat Lampung Barat
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAA N PENGAWASAN	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan	324 Laporan	324 Laporan	324 Laporan	4,639,648,600	324 Laporan	5,103,613,460	324 Laporan	5,613,974,806	324 Laporan	6,175,372,287	324 Laporan	6,792,909,515	Inspektorat Lampung Barat
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	83 Laporan	83 Laporan	83 Laporan	1,060,023,000	83 Laporan	1,166,025,300	83 Laporan	1,282,627,830	83 Laporan	1,410,890,613	83 Laporan	1,551,979,674	Inspektorat Lampung Barat
7	UNSUR KEWILAYAHAN								-		-		-		-	
7 1	KECAMATAN								-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	45,398,640	100%	47,668,572	100%	50,052,001	100%	52,554,601	100%	55,182,331	Kecamatan Air Hitam
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	45,451,350	100%	47,723,918	100%	50,110,113	100%	52,615,619	100%	55,246,400	Kecamatan Air Hitam

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	26,229,000	100%	27,540,450	100%	28,917,473	100%	30,363,346	100%	31,881,513	Kecamatan Air Hitam
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	499,202,471	70.00	524,162,595	70.00	550,370,725	70.00	577,889,261	70.00	606,783,724	Kecamatan Air Hitam
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	50,790,600	100%	53,330,130	100%	55,996,637	100%	58,796,468	100%	61,736,292	Kecamatan Air Hitam
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	7,848,750	100%	8,241,188	100%	8,653,247	100%	9,085,909	100%	9,540,205	Kecamatan Air Hitam
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	24,445,575	100%	25,667,854	100%	26,951,246	100%	28,298,809	100%	29,713,749	Kecamatan Balik Bukit
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	19,757,955	100%	20,745,853	100%	21,783,145	100%	22,872,303	100%	24,015,918	Kecamatan Balik Bukit
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	58,587,795	100%	61,517,185	100%	64,593,044	100%	67,822,696	100%	71,213,831	Kecamatan Balik Bukit
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	934,046,243	70.00	980,748,555	70.00	1,029,785,982	70.00	1,081,275,281	70.00	1,135,339,046	Kecamatan Balik Bukit
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	14,834,400	100%	15,576,120	100%	16,354,926	100%	17,172,672	100%	18,031,306	Kecamatan Balik Bukit
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	10,718,190	100%	11,254,100	100%	11,816,804	100%	12,407,645	100%	13,028,027	Kecamatan Balik Bukit
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	419,667,803	100%	440,651,193	100%	462,683,753	100%	485,817,941	100%	510,108,838	Kelurahan Pasar Liwa

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	210,836,010	70.00	221,377,811	70.00	232,446,701	70.00	244,069,036	70.00	256,272,488	Kelurahan Pasar Liwa
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	419,999,678	100%	440,999,662	100%	463,049,645	100%	486,202,127	100%	510,512,233	Kelurahan Way Mengaku
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	285,599,843	70.00	299,879,835	70.00	314,873,826	70.00	330,617,518	70.00	347,148,394	Kelurahan Way Mengaku
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	34,736,520	100%	36,473,346	100%	38,297,013	100%	40,211,864	100%	42,222,457	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	20,183,100	100%	21,192,255	100%	22,251,868	100%	23,364,461	100%	24,532,684	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	32,512,200	100%	34,137,810	100%	35,844,701	100%	37,636,936	100%	39,518,782	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	564,919,756	70.00	593,165,744	70.00	622,824,031	70.00	653,965,232	70.00	686,663,494	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	20,211,240	100%	21,221,802	100%	22,282,892	100%	23,397,037	100%	24,566,889	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	11,549,685	100%	12,127,169	100%	12,733,528	100%	13,370,204	100%	14,038,714	Kecamatan Bandar Negeri Suoh
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	22,114,050	100%	23,219,753	100%	24,380,740	100%	25,599,777	100%	26,879,766	Kecamatan Batu Brak
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	27,408,150	100%	28,778,558	100%	30,217,485	100%	31,728,360	100%	33,314,778	Kecamatan Batu Brak

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	43,274,700	100%	45,438,435	100%	47,710,357	100%	50,095,875	100%	52,600,668	Kecamatan Batu Brak
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	581,973,420	70.00	611,072,091	70.00	641,625,696	70.00	673,706,980	70.00	707,392,329	Kecamatan Batu Brak
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	15,906,450	100%	16,701,773	100%	17,536,861	100%	18,413,704	100%	19,334,389	Kecamatan Batu Brak
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	8,683,500	100%	9,117,675	100%	9,573,559	100%	10,052,237	100%	10,554,849	Kecamatan Batu Brak
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	26,407,920	100%	27,728,316	100%	29,114,732	100%	30,570,468	100%	32,098,992	Kecamatan Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	24,149,790	100%	25,357,280	100%	26,625,143	100%	27,956,401	100%	29,354,221	Kecamatan Batu Ketulis
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	57,248,100	100%	60,110,505	100%	63,116,030	100%	66,271,832	100%	69,585,423	Kecamatan Batu Ketulis
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	584,509,196	70.00	613,734,656	70.00	644,421,389	70.00	676,642,458	70.00	710,474,581	Kecamatan Batu Ketulis
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	22,554,000	100%	23,681,700	100%	24,865,785	100%	26,109,074	100%	27,414,528	Kecamatan Batu Ketulis
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	21,000,000	100%	22,050,000	100%	23,152,500	100%	24,310,125	100%	25,525,631	Kecamatan Batu Ketulis
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	23,824,500	100%	25,015,725	100%	26,266,511	100%	27,579,837	100%	28,958,829	Kecamatan Belalau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	17,129,490	100%	17,985,965	100%	18,885,263	100%	19,829,526	100%	20,821,002	Kecamatan Belalau

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	41,192,340	100%	43,251,957	100%	45,414,555	100%	47,685,283	100%	50,069,547	Kecamatan Belalau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	626,776,376	70.00	658,115,195	70.00	691,020,955	70.00	725,572,002	70.00	761,850,603	Kecamatan Belalau
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	18,345,600	100%	19,262,880	100%	20,226,024	100%	21,237,325	100%	22,299,191	Kecamatan Belalau
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	13,837,320	100%	14,529,186	100%	15,255,645	100%	16,018,428	100%	16,819,349	Kecamatan Belalau
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	30,027,165	100%	31,528,523	100%	33,104,949	100%	34,760,197	100%	36,498,207	Kecamatan Gedung Surian
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	39,288,480	100%	41,252,904	100%	43,315,549	100%	45,481,327	100%	47,755,393	Kecamatan Gedung Surian
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	53,458,440	100%	56,131,362	100%	58,937,930	100%	61,884,827	100%	64,979,068	Kecamatan Gedung Surian
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	516,638,168	70.00	542,470,076	70.00	569,593,580	70.00	598,073,259	70.00	627,976,922	Kecamatan Gedung Surian
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	24,477,495	100%	25,701,370	100%	26,986,438	100%	28,335,760	100%	29,752,548	Kecamatan Gedung Surian
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	14,588,175	100%	15,317,584	100%	16,083,463	100%	16,887,636	100%	17,732,018	Kecamatan Gedung Surian
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	66,505,950	100%	69,831,248	100%	73,322,810	100%	76,988,950	100%	80,838,398	Kecamatan Kebun Tebu
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	46,645,200	100%	48,977,460	100%	51,426,333	100%	53,997,650	100%	56,697,532	Kecamatan Kebun Tebu

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	30,108,750	100%	31,614,188	100%	33,194,897	100%	34,854,642	100%	36,597,374	Kecamatan Kebun Tebu
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	519,582,656	70.00	545,561,789	70.00	572,839,879	70.00	601,481,872	70.00	631,555,966	Kecamatan Kebun Tebu
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	12,169,500	100%	12,777,975	100%	13,416,874	100%	14,087,717	100%	14,792,103	Kecamatan Kebun Tebu
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	10,136,700	100%	10,643,535	100%	11,175,712	100%	11,734,497	100%	12,321,222	Kecamatan Kebun Tebu
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	22,617,000	100%	23,747,850	100%	24,935,243	100%	26,182,005	100%	27,491,105	Kecamatan Lumbok Seminung
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	30,203,250	100%	31,713,413	100%	33,299,083	100%	34,964,037	100%	36,712,239	Kecamatan Lumbok Seminung
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	36,524,250	100%	38,350,463	100%	40,267,986	100%	42,281,385	100%	44,395,454	Kecamatan Lumbok Seminung
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	602,001,750	70.00	632,101,838	70.00	663,706,929	70.00	696,892,276	70.00	731,736,890	Kecamatan Lumbok Seminung
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	29,606,850	100%	31,087,193	100%	32,641,552	100%	34,273,630	100%	35,987,311	Kecamatan Lumbok Seminung
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	20,837,250	100%	21,879,113	100%	22,973,068	100%	24,121,722	100%	25,327,808	Kecamatan Lumbok Seminung
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	48,468,000	100%	50,891,400	100%	53,435,970	100%	56,107,769	100%	58,913,157	Kecamatan Pagar dewa
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	20,527,500	100%	21,553,875	100%	22,631,569	100%	23,763,147	100%	24,951,305	Kecamatan Pagar dewa

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	51,381,750	100%	53,950,838	100%	56,648,379	100%	59,480,798	100%	62,454,838	Kecamatan Pagar dewa
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	600,530,070	70.00	630,556,574	70.00	662,084,402	70.00	695,188,622	70.00	729,948,053	Kecamatan Pagar dewa
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	23,388,750	100%	24,558,188	100%	25,786,097	100%	27,075,402	100%	28,429,172	Kecamatan Pagar dewa
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	42,711,900	100%	44,847,495	100%	47,089,870	100%	49,444,363	100%	51,916,581	Kecamatan Sekincau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	4,189,500	100%	4,398,975	100%	4,618,924	100%	4,849,870	100%	5,092,363	Kecamatan Sekincau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	63,550,095	100%	66,727,600	100%	70,063,980	100%	73,567,179	100%	77,245,538	Kecamatan Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	616,965,011	70.00	647,813,262	70.00	680,203,925	70.00	714,214,121	70.00	749,924,827	Kecamatan Sekincau
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	21,876,750	100%	22,970,588	100%	24,119,117	100%	25,325,073	100%	26,591,326	Kecamatan Sekincau
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	22,246,350	100%	23,358,668	100%	24,526,601	100%	25,752,931	100%	27,040,577	Kecamatan Sekincau
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	453,384,236	100%	476,053,447	100%	499,856,120	100%	524,848,926	100%	551,091,372	Kelurahan Sekincau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	215,094,285	70.00	225,848,999	70.00	237,141,449	70.00	248,998,522	70.00	261,448,448	Kelurahan Sekincau
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	29,400,000	100%	30,870,000	100%	32,413,500	100%	34,034,175	100%	35,735,884	Kecamatan Sukau
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	15,750,000	100%	16,537,500	100%	17,364,375	100%	18,232,594	100%	19,144,223	Kecamatan Sukau
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	56,700,000	100%	59,535,000	100%	62,511,750	100%	65,637,338	100%	68,919,204	Kecamatan Sukau
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	611,225,790	70.00	641,787,080	70.00	673,876,433	70.00	707,570,255	70.00	742,948,768	Kecamatan Sukau
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	15,750,000	100%	16,537,500	100%	17,364,375	100%	18,232,594	100%	19,144,223	Kecamatan Sukau
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	13,650,000	100%	14,332,500	100%	15,049,125	100%	15,801,581	100%	16,591,660	Kecamatan Sukau
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	17,764,950	100%	18,653,198	100%	19,585,857	100%	20,565,150	100%	21,593,408	Kecamatan Sumber Jaya
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	14,121,975	100%	14,828,074	100%	15,569,477	100%	16,347,951	100%	17,165,349	Kecamatan Sumber Jaya
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	49,095,900	100%	51,550,695	100%	54,128,230	100%	56,834,641	100%	59,676,373	Kecamatan Sumber Jaya
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	674,013,034	70.00	707,713,685	70.00	743,099,370	70.00	780,254,338	70.00	819,267,055	Kecamatan Sumber Jaya
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	11,490,675	100%	12,065,209	100%	12,668,469	100%	13,301,893	100%	13,966,987	Kecamatan Sumber Jaya
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	4,534,740	100%	4,761,477	100%	4,999,551	100%	5,249,528	100%	5,512,005	Kecamatan Sumber Jaya
							-		-		-		-		-	

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekan mandiri			100%	420,051,301	100%	441,053,866	100%	463,106,559	100%	486,261,887	100%	510,574,982	Kelurahan Tugu Sari
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	210,000,263	70.00	220,500,276	70.00	231,525,289	70.00	243,101,554	70.00	255,256,632	Kelurahan Tugu Sari
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	26,703,390	100%	28,038,560	100%	29,440,487	100%	30,912,512	100%	32,458,137	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekan mandiri			100%	17,125,500	100%	17,981,775	100%	18,880,864	100%	19,824,907	100%	20,816,152	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	40,188,750	100%	42,198,188	100%	44,308,097	100%	46,523,502	100%	48,849,677	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	543,159,593	70.00	570,317,572	70.00	598,833,451	70.00	628,775,123	70.00	660,213,879	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	31,195,500	100%	32,755,275	100%	34,393,039	100%	36,112,691	100%	37,918,325	Kecamatan Suoh
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	19,099,500	100%	20,054,475	100%	21,057,199	100%	22,110,059	100%	23,215,562	Kecamatan Suoh
							-		-		-		-		-	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Perentase penurunan kasus gangguan keamanan			100%	38,572,800	100%	40,501,440	100%	42,526,512	100%	44,652,838	100%	46,885,479	Kecamatan Way Tenong
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi			100%	56,148,750	100%	58,956,188	100%	61,903,997	100%	64,999,197	100%	68,249,157	Kecamatan Way Tenong
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	677,198,235	70.00	711,058,147	70.00	746,611,054	70.00	783,941,607	70.00	823,138,687	Kecamatan Way Tenong

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	PROGRAM PENYELENGGARAA N PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang dilaksanakan			100%	14,085,750	100%	14,790,038	100%	15,529,539	100%	16,306,016	100%	17,121,317	Kecamatan Way Tenong
	PROGRAM PENYELENGGARAA N URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan			100%	20,412,000	100%	21,432,600	100%	22,504,230	100%	23,629,442	100%	24,810,914	Kecamatan Way Tenong
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah pekon mandiri			100%	417,208,349	100%	438,068,767	100%	459,972,205	100%	482,970,815	100%	507,119,356	Kelurahan Fajar Bulan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70.00	242,371,500	70.00	254,490,075	70.00	267,214,579	70.00	280,575,308	70.00	294,604,073	Kelurahan Fajar Bulan
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								-		-		-		-	
8 1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								-		-		-		-	
8.01.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.2	76.25	78.4 poin	2,615,601,686	78.6 poin	2,892,161,855	78.8 poin	3,404,321,962	79 poin	4,012,586,863	79.2 poin	4,735,544,797	Badan Kesbangpol
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat generasi muda akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan penguatan Idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan pada sekolah Tingkat SLTA	33%	44%	0.52	1,138,553,018	70.00%	1,252,408,320	80.00%	1,377,649,152	90.00%	1,515,414,067	100.00%	1,666,955,474	Badan Kesbangpol
8.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	26%	27%	38%	902,993,253	52%	993,292,578	66%	1,092,621,836	80%	1,651,884,020	93%	1,322,072,422	Badan Kesbangpol
8.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya keterlibatan organisasi kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	17.02%	17.02%	17.48%	510,294,000	17.95%	564,857,900	18.41%	625,408,365	18.88%	692,623,578	19.35%	767,261,468	Badan Kesbangpol

Kode	Bidang Urusan / Program	Sasaran Program	Indikator Program	Baseline Kinerja 2024	Target Kinerja 2025	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Perangkat Daerah Penanggung-jawab
						2026		2027		2028		2029		2030		
						Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
8.01.05	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	100%	100%	100%	408,276,200	100%	469,517,630	100%	539,945,275	100%	620,937,066	100%	714,077,626	Badan Kesbangpol
8.01.06	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	100%	100%	100%	1,404,217,700	100%	1,485,160,555	100%	1,577,934,638	100%	1,677,124,834	100%	1,833,693,559	Badan Kesbangpol
							1,257,509,920,477		1,380,199,691,827		1,475,605,624,231		1,579,770,374,279		1,691,638,690,078	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan guna memastikan pelayanan publik yang berkualitas serta pelaksanaan program pembangunan yang tepat sasaran.

Bab ini menguraikan berbagai aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Fokus utama adalah bagaimana pemerintahan daerah dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan, serta merancang kebijakan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan.

Dengan perencanaan yang matang dan implementasi kebijakan yang terarah, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah mampu menciptakan sistem yang lebih responsif, akuntabel, dan inovatif. Hal ini menjadi landasan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 secara efektif dan berdaya guna.

Tabel 4.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,41	72,00-72,75	72.76 - 72.85	72.86 - 72.95	72.96 - 73.00	73,01-75,00	73.41-75.40
2	Prevalensi Stunting	24.6 (tahun 2023)	10.65	12.50	12.00	11.50	10.90	10.30
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.407	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395
4	Indeks Perlindungan Anak	60.18 (tahun 2023)	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92
5	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.12%	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%
6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA)	61.52	61.83	62.14	62.45	62.76	63.07	63.39
7	Angka Kemiskinan	10,68	9,50-10,00	9.00-9.63	8.50-9.25	8.00-8.88	7,50-8,50	6.80-7.80
8	Gini Rasio	0,290	0.264	0.259	0.253	0.247	0.242	0.236
9	Indeks Ketahanan Pangan	76.18	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49
10	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	12,25%	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%
11	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	5,32%	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
12	PDRB per kapita (Rp Juta)	31.35	32.92	34.56	36.29	38.11	40.01	42.01
13	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	35.66%	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%
14	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.05%	2.05%	2.06%	2.07%	2.09%	2.11%	2.12%
15	Tingkat Inflasi (%)	1,57% (angka Prov)	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%
16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.09	2.07	2.05	2.03	2.01	1.99	1.97
17	Nilai investasi (Rupiah)	187.253.670.764	104.640.000.000	109.870.000.000	115.363.500.000	121.131.675.000	127.188.258.750	133.547.671.600
18	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	29.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%	10.00%
19	Persentase koperasi Sehat	34.00%	36.00%	36.00%	37.00%	38.00%	39.00%	40.00%
20	Indeks Daya Saing Daerah	3.42	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52
21	Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	70.74	71.09	71.45	71.81	72.17	72.53	72.89
22	Indeks Pelayanan Publik	3,90	3.10545	3.12097725	3.136582136	3.152265047	3.168026372	3.183866504
23	Indeks kualitas lingkungan hidup	73,09	74.63	74.89	75.14	75.39	75.65	75.69

No	Indikator	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
	Daerah							
24	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)	n.a	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38
25	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
26	Tingkat kriminalitas	-	0.034%	0.033%	0.032%	0.031%	0.030%	0.029%
27	Indeks Kerukunan Hidup umat beragama	90.5	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25
28	Indeks Layanan Infrastruktur Daerah (IKLI)	62,71	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46
29	Indeks Resiko Bencana	176,28	169.55	152.38	150.86	149.35	147.85	146.38

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	76.56	76.94	77.33	77.72	78.10	78.49
2	Prefalensi Ketidak Cukupan konsumsi Pangan	11.11	11.06	11.00	10.95	10.89	10.84
3	Konsumsi Listrik Perkapita	22.25	22.52	22.79	23.06	23.32	23.51
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	18.57	18.75	18.94	19.12	19.31	19.50
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74.63	74.89	75.14	75.39	75.65	75.69
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	1.39%	1.91%	2.43%	2.95%	3.47%	3.99%
7	Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah	34.49	34.83	35.18	35.53	35.89	36.25
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan sampah	14,46	27.2	27.2	27.2	31.568	43.70
9	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (ton CO2e)	106,461.11	113,035.59	120,103.98	127,621.67	134,693.87	142,073.38
10	Indeks Resiko Bencana	169.55	152.38	150.86	149.35	147.85	146.38
11	Laju pertumbuhan Penduduk	1.11%	1.10%	1.09%	1.08%	1.07%	1.06%
12	Kapasitas Air Baku (m3/detik)*	2.45	2.45	2.85	2.85	2.85	2.85
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,2 - 5,2%	4.25 - 5.27	4.3 - 5.35	4.35 - 5.42	4.4 - 5.49	5.28%
2	Tingkat Kemiskinan	9,50-10,00	9.00-9.63	8.50-9.25	8.00-8.88	7,50-8,50	6.80-7.80
3	PDRB Perkapita	32.92	34.56	36.29	38.11	40.01	42.01
4	Nilai investasi (Rupiah)	104.640.000.000	109.870.000.000	115.363.500.000	121.131.675.000	127.188.258.750	133.547.671.600
5	Persentase Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Persen)	10%	10%	10%	10%	10%	10%
6	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kabupaten (%)	4.21	4.23	4.25	4.27	4.29	4.31

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase koperasi Sehat	36%	36%	37%	38%	39%	40%
8	Return on Aset (ROA) BUMD (%)*	1,91	2,42	2,52	2,62	2,72	3,14
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.07	2.05	2.03	2.01	1.99	1.97
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	72.53	73.02	73.51	74.00	74.49	74.98
11	Indeks Gini	0.264	0.259	0.253	0.247	0.242	0.236
12	Indeks Pembangunan Manusia	72,00-72,75	72.76 - 72.85	72.86 - 72.95	72.96 - 73.00	73,01-75,00	73.41-75.40
13	Usia Harapan Hidup	73,09 - 75,09	73,25 - 75,25	73,4 - 75,4	73,56 - 75,56	75,72 - 77,72	75,87 - 77,87
14	Indeks Pembangunan Keluarga	61.83	62.14	62.45	62.76	63.07	63.39
15	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	5	5	5	5	4	4
16	Prevalensi Stunting	10.65	12.5	12	11.5	10.9	10.3
17	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (case detection rate) (%)	55.00%	60.00%	60.00%	70.00%	60-80%	70.00%
18	Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate (%)	93.05%	93.52%	93.99%	94.46%	94.93%	95.40%
19	Rata - Rata Lama Sekolah	8,97 - 8,98	8,61 - 8,98	8,71 - 8,99	8,81 - 8,99	8,51-9,00	9,20
20	Harapan Lama Sekolah	13,00	13,01	13,02	13,03	13,01-13,40	13.52
21	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)*	6.50	7.05	7.10	7.15	7.20	7.25
22	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%)	36.51%	37.01%	37.51%	38.01%	38.51%	39.01%
23	Cakupan Kepersertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	20.57	22.57	24.57	26.57	28.57	30.57
24	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98.65%	99.29%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
25	Persentase Penyandang Disabilitas yang terlatih (%)	7.40%	8.40%	9.40%	10.40%	11.40%	12.40%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*						
26	i) Literasi Membaca	6,67 - 13,33	8,50-15,50	10,00-20,00	20,00-30,00	30,00-40,00	31,00-41,00
27	ii) Numerasi	0,00 - 6,67	05,00-8,30	10,00-15,00	15,00-20,00	20,00-30,00	22,00-32,00
	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk						
28	i) Literasi Membaca	76.96	84.85	86.37	87.88	89.40	90.90
29	ii) Numerasi	72.73	73.64	75.16	76.67	78.19	79.70
30	Indeks Kerukunan Umat Beragama	90.95	91.41	91.86	92.32	92.79	93.25
31	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	59,10 - 59,12*	59,11-59,13	59,12-59,14	59,13-59,15	59,50-62,00	59,51-62,01
32	Persentase Penurunan Konflik Sosial (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
33	Persentase konflik SARA yang terselesaikan (Persen)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
34	Tingkat kriminalitas	0.034%	0.033%	0.032%	0.031%	0.030%	0.029%
35	Persentase pemajuan kebudayaan daerah	12.64%	12,63%	14,83%	17,03%	19,23%	21,42%
36	Persentase warisan budaya tak benda daerah tersertifikasi	13.48%	14.60%	15.73%	16.85%	17.97%	19.10%
37	Persentase cagar budaya peringkat kabupaten	7.57%	9.67%	11.82%	13.97%	16.12%	18.27%
38	Indeks Perlindungan Anak	63,92	64,92	65,92	66,92	67,92	68,92
39	Indeks Ketimpangan Gender	0.405	0.403	0.401	0.399	0.397	0.395
40	Indeks Pembangunan Pemuda	61.50-62.00	62.4	62.6	62.8	62,53-65,00	63.2
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Rasio PDRB Industri Pengolaan	5.49%	5.99%	6.49%	6.99%	7.49%	7.99%
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	0.01	1.38	1.41	1.44	1.46	1.49
3	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu	0.28	0.29	0.31	0.32	0.34	0.35

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Orang)*						
4	Persentase peningkatan pelaku ekonomi kreatif (%)	6.79	8.79	10.79	12.79	14.79	16.79
5	Kontribusi PDRB Kabupaten/ Kota terhadap Provinsi (%)	2.05%	2.06%	2.07%	2.09%	2.11%	2.12%
6	Rasio Kewirausahaan	2.00	2.20	2.40	2.60	2.80	3.00
7	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif (70)	Sangat Inovatif (71)	Sangat Inovatif (72)	Sangat Inovatif (73)	Sangat Inovatif (74)	Sangat Inovatif (75)
8	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer	36.00	36.45	36.90	37.35	37.80	38.32
9	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Kominikasi	5.65	5.7	5.75	5.8	5.85	5.9
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	36.69%	37.01%	37.32%	37.63%	37.94%	37.99%
11	Ekspor Barang dan Jasa	57.37	57.63	57.89	58.16	58.42	58.68
12	Indeks Infrastruktur/Indeks Kepuasan Layanan Inflastruktur	76.50	76.69	76.88	77.08	77.27	77.46
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	94.69	94.96	95.22	95.49	95.75	96.02
14	Presentase Desa Mandiri	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%	0.76%
15	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0.17%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%	0.18%
16	Tingkat Inflansi	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%	2,5(+1)%
17	Proporsi Kredit UMKM terhadap total kredit (%)	42.00%	43.00%	44.00%	45.00%	46.00%	47.00%
18	Persentase fasilitasi dokumen kerja sama daerah (%)	100	100	100	100	100	100
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM						
1	Indeks Reformasi Hukum	77.57	77.95	78.34	78.74	79.13	79.52
2	Indeks Sistem Pemeritahan Berbasis Elektronik	2.95	3.05	3.15	3.25	3.35	3.45
3	Indeks Pelayanan Publik	3.11	3.12	3.14	3.15	3.17	3.18
4	Indeks Integritas Nasional	70.58	70.93	71.29	71.65	72.00	72.36

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
5	Persentase Capaian Aksi HAM	83.87%	84.29%	84.71%	85.13%	85.56%	85.99%
6	Indeks reformasi birokrasi (Predikat)	71.09	71.45	71.81	72.17	72.53	72.89
7	Indeks Demokrasi Indonesia	79,36-81,00 (sedang)	81,00-81,33	81,33-81,73	81,73-82,00	82,00-83,00	83,00-83,25
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	80.00%	80.50%	81.00%	81.50%	82.00%	82.50%
9	Indeks Daya Saing Daerah	3.44	3.45	3.47	3.49	3.51	3.52
	INDIKATOR KINERJA KUNCI						
1	Urusan Pendidikan Kabupaten/Kota						
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	56.52	56.85	57.00	58.00	59.00	60.00
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100	100	100	100	100	35
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	14.41	15.21	20	25	30	35
2	Urusan Kesehatan Kabupaten/Kota						
	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	0.407	0.403	0.399	0.395	0.392	0.388
	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100	100	100	100	100	100
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	5,132	5,132	6,804	6,804	6,804	6,804
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	5,315	5,315	6,494	6,494	6,494	6,494

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	5,247	5,247	6,185	6,185	6,185	6,185
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	25,795	25,795	36,735	36,735	36,735	36,735
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	59,996	59,996	16,868	16,868	16,868	16,868
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	202,492	206,539	206,539	206,539	206,539	206,539
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29,381	29,381	32,285	32,285	32,285	32,285
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	15,328	15,333	15,337	15,342	15,346	15,351
	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2,489	2,149	2,150	2,151	2,152	2,152
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	519	531	531	532	532	532
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	4,300	3,886	3,353	2,972	2,683	2,460
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	4,306	7,040	7,040	7,040	7,040	7,040
3	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten/Kota						
	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	192 Ha	224,5 Ha	257 Ha	289,5 Ha	322 Ha	354,5 Ha

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha	13,5 Ha
	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	601	727	853	979	1105	1231
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	88.81	89.15	89.49	89.83	90.17	90.52
	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	96.35	96.60	97.10	97.10	97.35	97.60
	Mengukur rasio kepatuhan IMB kab/ kota	100	100	100	100	100	100
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	59.10	60.40	61.80	63.30	65.00	66.70
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten/Kota						
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	2	4	4	4	4	4
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0.75%	1.30%	1.55%	1.80%	2.05%	2.30%
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		5001	4801	4601	4401	4201
5	Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota						

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%	0.04%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0.04%	0.03%	0.10%	0.38%	0.03%	0.03%
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Urusan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota						
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	0	1	1	1	1	1
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Jumlah angkatan kerja yng dilatih / jumlah angkatan kerja x 100 %)	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	50	50	50	50	50	50
7	Urusan Pangan Kabupaten/Kota						
	Persentase Cadangan Pangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	67.23	74.89	75.14	75.39	75.65	75.91
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	70	75	79	76	73	70
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	60	63	66	70	75	80
9	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						
	Perekaman KTP Elektronik	222.293	223.293	224.293	225.293	226.293	227.293

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	81.60%	81.70%	81.80%	81.90%	82.00%	82.10%
	Kepemilikan akta kelahiran	171.909	174.909	177.909	180.909	183.909	186.909
	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-	1	-	1	-	1
10	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota						
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	49.62	51.15	52.67	54.20	55.73	57.25
11	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota						
	TFR (Angka Kelahiran Total)	2.46	2.46	2,65	2,44	2,43	2,42
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	75.6	75.6	75.7	75.8	75.9	76
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	4.6	8.7	8.4	8.1	7.8	7.5
12	Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota						
	Rasio konektivitas	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.1
13	Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota						
	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	40%	45%	50%	55%	60%	65%
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	40%	45%	50%	55%	60%	65%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	95%	100%	100%
14	Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten/Kota						
	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	2,356	2,380	2,403	2,427	2,452	2,476
15	Urusan Penanaman Modal Kabupaten/Kota						
	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	5%	5%	5%	5%	5%	5%
16	Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Kota						
	Peningkatan Prestasi Olahraga	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46
17	Urusan Statistik Kabupaten/Kota						
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Urusan Persandian Kabupaten/Kota						
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	40%	45%	50%	55%	60%	65%
19	Urusan Kebudayaan Kabupaten/Kota						
	Terlestarikannya Cagar Budaya	12.64%	12,63%	14,83%	17,03%	19,23%	21,42%
20	Urusan Perpustakaan Kabupaten/Kota						

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	90,05	90,15	90,25	90,35	90,45	90,55
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70,05	70,15	70,25	70,35	70,45	70,55
21	Urusan Kearsipan Kabupaten/Kota						
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas
	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas	50 Berkas
22	Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota						
	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	10.773,59 Ton	10.945,96 Ton	11.132,04 Ton	11.332,42 Ton	11.547,74 Ton	11.778,69 Ton
23	Urusan Pariwisata Kabupaten/Kota						
	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per Kebangsaan	5	5.05	10.47	15.88	21.66	27.80
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	2.0	5.1	9.3	14.7	20.5	26.5
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1.35	1.38	1.41	1.44	1.46	1.49
24	Urusan Pertanian Kabupaten/Kota						
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,265 Ton/Ha	5,265 Ton/Ha	5,27 Ton/Ha	5,275 Ton/Ha	5,28 Ton/Ha	5,29 Ton/Ha
25	Urusan Perdagangan Kabupaten/Kota						

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	10	11	12	13	14	15
	Persentase kinerja realisasi pupuk (Jumlah laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan realisasi minimal 90%)	-	-	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	8.50	8.70	8.90	8.90	9.10	9.40
26	Urusan Perindustrian Kabupaten/Kota						
	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah di Kabupaten/kota	1%	1%	1%	1%	1%	1%
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	0	2	2	2	2	2
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	25	25	25	25	25
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	25	25	25	25	25

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	25	25	25	25	25
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0	25	25	25	25	25
27	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan) Kabupaten/Kota						
	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	14.50%	14.25%	14.00%	13.75%	13.50%	13.25%
	Rasio PAD						
	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)						
	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures)	64.50%	64.25%	64.00%	63.75%	63.50%	63.25%
	Opini Laporan Keuangan	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)	WTP (10)
28	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Pengadaan) Kabupaten/Kota						
	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	6	6	6.2	6.4	6.6	6.8
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	30	31	32	33	34	35
	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%	0.20%

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Barang/Jasa Pemerintah Daerah						
29	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) Kabupaten/Kota						
	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	83.50%	84%	85%	86%	87%	88%
	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	30.50%	31%	32%	33%	34%	35%
	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	11%	10%	12%	14%	16%	18%
30	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Manajemen Keuangan) Kabupaten/Kota						
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.60%	2.50%	2.40%	2.30%	2.20%	2.10%
	Assets Management	4	4	4	4	4	4
	Cash Management: Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	5.50%	5.25%	5.00%	4.75%	4.50%	4.25%
31	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik) Kabupaten/Kota						
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	123	130	135	137	138	140
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dukungan Program Terhadap 83 Kegiatan Prioritas Utama RPJMN

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah Indonesia telah menetapkan 83 kegiatan prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kegiatan-kegiatan tersebut menjadi pilar utama untuk mempercepat pencapaian target pembangunan di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi digital. Dukungan yang terpadu dan komprehensif dari seluruh lapisan pemerintahan sangat diperlukan agar program-program prioritas ini dapat berjalan efektif dan berdampak luas.

Setiap program pembangunan di tingkat daerah dan nasional diarahkan untuk mendukung terlaksananya 83 kegiatan prioritas tersebut, sehingga tercipta sinergi yang kuat antar sektor dan wilayah. Pengintegrasian program-program daerah dengan kegiatan prioritas nasional menjadi kunci agar sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan terfokus pada pencapaian hasil yang nyata. Hal ini menuntut perencanaan yang matang, koordinasi yang efektif, serta komitmen kuat dari pemerintah pusat hingga daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan membangun kemitraan strategis.

Dukungan program terhadap kegiatan prioritas RPJMN juga mencerminkan upaya pemerintah dalam menjawab tantangan global dan nasional, seperti percepatan transformasi digital, ketahanan pangan, serta mitigasi perubahan iklim. Dengan fokus pada kegiatan-kegiatan prioritas yang strategis, diharapkan Indonesia mampu meningkatkan daya saing, mendorong pemerataan pembangunan, dan memastikan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap program yang dijalankan harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional selama periode 2025-2029.

Tabel 4.4 Dukungan 83 Kegiatan Utama Prioritas RPJMN

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
1	Penguatan Pere dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Transformasi Tata Kelola Industri Pertahanan dan Penerapan Skema Spend to Invest	-	-
3	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	-	-
4	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Pangan Sumatera Selatan (KSPP)/Lumbung	-	-
5	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Papua Selatan	-	-
6	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
7	Pengembangan Pangan Akuatik (Blue Food)	-	-
8	Pengembangan Pangan Hewani	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
9	Pengembangan Pangan Lokal dan Nabati	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan
10	Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	-	-
11	Peningkatan Penyediaan Energi	-	-
12	Perluasan Akses dan Jangkauan Pelayanan Energi	-	-
13	Penguatan Implementasi Transisi Energi Berkeadilan	-	-

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
14	Konservasi Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	DINAS PUPR
15	Pengernbangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	DINAS PUPR
16	Penyediaan dan Pengawasan Sanitasi Aman, Berkelanjutan, dan Berketahanan Iklim Berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	DINAS PUPR
17	Pengembangan Terpadu Pesisir Utara Jawa	-	-
18	Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Digital	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
19	Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis lainnya	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
20	Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan	-	-
21	Peningkatan Bioprospeksi, Bioteknologi, Keamanan Hayati, dan Pembagian Keuntungan Sumber Daya Genetik serta Akses	-	-
22	Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Dinas Lingkungan Hidup
23	Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut	-	-
24	Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
25	Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Dinas Lingkungan Hidup
26	Pengembangan Industri Garam dan Produk Olahan Hasil Laut	-	-

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
27	Pembangunan Infrastruktur Jaringan Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya	-	-
28	Pengembangan dan Peningkatan Ekosistem Digital	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur-Yogyakarta-Prambanan	-	-
30	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Gili Tramena	-	-
31	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba	-	-
32	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	-	-
33	Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Dinas Komunikasi dan Informatika
34	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
35	Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
36	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
37	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
38	Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
39	Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi, rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.9. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
40	Peningkatan Relevansi dan Perluasan Akses Pendidikan Tinggi	-	-
41	Peningkatan Fungsi Intermediasi dan Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah
42	Penurunan Kematian Ibu dan Anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
43	Pencegahan dan Penurunan Stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
44	Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
45	Penuntasan TBC	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan
46	Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
47	Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
48	Etiminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	Dinas Kesehatan

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
		KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
49	Investasi pelayanan kesehatan primer	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
50	Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan
51	Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan
52	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
53	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Riset dan Inovasi	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Badan Riset dan Inovasi Daerah
54	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Dinas Pora Pariwisata
55	Pengembangan Hilirisasi Nikel	-	-
56	Pengembangan Hilirisasi Tembaga	-	-
57	Pengembangan Hilirisasi Bauksit	-	-
58	Pengembangan Hilirisasi Timah	-	-
59	Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
60	Pengembangan Hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
61	Pengembangan Hilirisasi Rumput Laut	-	-
62	Pengembangan Industri Kimia	-	-
63	Pembangunan Industri Semi konduktor	-	-
64	Pengembangan Industri Tekstil dan Produk Tekstil	-	-
65	Penguatan Industri Logam Dasar, Besi dan Baja	-	-
66	Pengembangan Industri Dirgantara	-	-
67	Pengembangan KEK Sei Mangkei	-	-
68	Pengembangan KIT Batang	-	-
69	Pengembangan KI Weda Bay	-	-
70	Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif dan Subsidi Tepat Sasaran melalui Kartu Kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dinas Sosial
71	Peningkatan Daya Saing melalui Kartu Usaha produktif	-	-
72	Peningkatan Kemandirian melalui Kartu Usaha Alirnatif	-	-
73	Perencanaan dan Pembangunan Kawasan, serta Pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	-	-
74	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	DINAS PUPR
75	Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
76	Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Inspektorat Lampung Barat

No	Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RPJMN Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
77	Peningkatan Kesejahteraan ASN melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
78	Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah
79	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
80	Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Badan Pendapatan Daerah
81	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Badan Kesbangpol
82	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
83	Peningkatan Ketahanan Iklim Pesisir dan laut	-	-

Dukungan Program Terhadap Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2025-2029

Dalam rangka mendukung percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif, Kabupaten Lampung Barat menyelaraskan visi dan misi pembangunan dengan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2025-2029. Program ini menjadi acuan strategis dalam mendorong pemberdayaan desa dan pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, RPJMD Kabupaten Lampung Barat tahun 2025-2029 secara konsisten mengintegrasikan langkah-langkah konkret guna mendukung pencapaian target-target PHTC tersebut.

Pertama, pengoptimalan potensi ekonomi desa dan daerah melalui peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan dari desa dan dari bawah. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga membuka peluang baru bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sehingga tercipta kemandirian dan kesejahteraan yang merata. Selanjutnya, pembangunan unit produksi mikro pupuk organik yang dikelola oleh BUMDes dan kelompok tani (Poktan) merupakan langkah strategis untuk menyediakan kebutuhan pupuk yang ramah lingkungan, sekaligus meningkatkan produktivitas sektor pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.

Selain itu, mewujudkan stabilitas harga bahan pokok dengan memprioritaskan produk lokal yang tersedia di pasar lokal merupakan upaya penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk memperkuat rantai distribusi dan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, dukungan penuh terhadap PHTC menjadi landasan bagi pengembangan potensi daerah secara holistik, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan Kabupaten Lampung Barat sesuai dengan RPJMD 2025-2029.

Tabel 4.5 Dukungan PHTC Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025-2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
1	Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Desa dan Daerah serta Mendorong Pembangunan dari Desa dan dari Bawah dengan Peningkatan Kapasitas BUMDes /Koperasi	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

No	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Tahun 2025- 2029	Program Pendukung	Perangkat Daerah
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
2	Menyediakan Pupuk Organik melalui Pembangunan Unit Produksi Mikro Pupuk Organik yang Dikelola oleh BUMDes/Poktan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
3	Mewujudkan Stabilitas Harga Bahan Pokok dengan Memprioritaskan Produk Lokal Tersedia di Pasar Lokal	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Dinas Ketahanan Pangan

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini disusun berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk potensi daerah, tantangan, serta peluang yang ada.

Keberhasilan implementasi RPJMD ini memerlukan sinergi dan kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun masyarakat. Komitmen bersama dalam menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan menjadi faktor utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan RPJMD ini akan terus dimonitor dan dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dan efisiensinya dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.

Dengan adanya RPJMD ini, diharapkan Kabupaten Lampung Barat dapat terus berkembang menjadi daerah yang lebih HEBAT dan SETIA. Pemerintah daerah berkomitmen untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mendorong inovasi dan investasi dalam berbagai sektor. Semoga dokumen perencanaan ini dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun Kabupaten Lampung Barat yang lebih baik di masa depan.